



## PUTUSAN

Nomor 82/PHPU.D-VIII/2010

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. Andi Maddusila Andi Idjo**  
Usia : 60 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Komplek Bumi Permata Hijau, Jalan Bumi 22 Blok A.15 Nomor 14, Makassar, Sulawesi Selatan
2. Nama : **Jamaluddin Rustam, S.H., M.H.**  
Usia : 44 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Advokat/Konsultan Hukum  
Alamat : Jalan Hertasning VI Blok E8 Nomor 12M, Makassar, Sulawesi Selatan

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2010 Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Juli 2010, memberikan kuasa kepada i) Nasiruddin Pasigai, S.H., M.H.; ii) Jamaluddin Rustam, S.H., M.H.; iii) Syahrir Cakkari, S.H.; iv) Danial, S.H.; v) Muh. Rusdi, S.H.; vi) Mashuri Pandu Daya, S.H.; dan vii) Rakhmad Sujono, S.H., semuanya adalah advokat/penasihat

hukum yang berkantor di Jalan Veteran Selatan II Nomor 18, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa**, berkedudukan di Jalan A Mallombasang Nomor 69 Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Juli 2010, memberikan kuasa kepada i) Dr. Bambang Widjojanto, S.H.,M.H.; ii) Iskandar Sonhadji, S.H.; iii) Marhumah Majid, S.H.; dan iv) Adnan Buyung Azis, S.H., semuanya adalah Advokat pada Kantor Widjojanto, Sonhadji & Associates, yang beralamat di City Lofts Sudirman 21<sup>st</sup> Floor Suite 2108, Jalan KH Mas Mansyur Nomor 121, Jakarta Pusat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Termohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **H. Ichsan Yasin Limpo, S.H., M.H.**  
 Umur : 49 tahun  
 Pekerjaan : Bupati Kabupaten Gowa  
 Alamat : Jalan Masjid Raya (Komplek Rujab)  
 Sungguminasa, Kabupaten Gowa,  
 Sulawesi Selatan
2. Nama : **H Abd. Razak Badjidu, S.Sos.**  
 Usia : 58 tahun  
 Pekerjaan : Wakil Bupati Kabupaten Gowa  
 Alamat : Jalan Masjid Raya (Komplek Rujab)  
 Sungguminasa, Kabupaten Gowa,  
 Sulawesi Selatan

Adalah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2010;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Juli 2010, memberikan kuasa kepada i) Mappinawang, S.H.; ii) Sofyan, S.H.; iii) Yasser Wahab, S.H.; dan iv) Husaimah Husain, S.H., semuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum "Mappinawang & Rekan" yang beralamat di Jalan Topaz Raya Ruko Zamrud I Blok

G/12, Makassar, Sulawesi Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pihak Terkait;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;  
 Mendengar keterangan dari Pemohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban/tanggapan tertulis dari Termohon dan Pihak Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 6 Juni 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 7 Juli 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 263/PAN.MK/2010, dan diregistrasi dengan Nomor 82/PHPU.D-VIII/2010 pada tanggal 19 Juli 2010, serta telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 6 Juli 2010 yang diterima dalam persidangan tanggal 21 Juli 2010, menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor: 135/KPU-GW/IV/2010, tertanggal 20 April 2010, Tentang Hasil Penelitian Syarat Calon Kepala daerah dan wakil Kepala daerah Kabupaten Gowa Tahun 2010, yang ditujukan kepada Pasangan Calon Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2010 : Drs. Andi Maddusila Andi Idjo Jamaluddin Rustam, SH,MH. Bahwa dari hasil penelitian Syarat Pengajuan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2010, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa menyatakan bahwa Pasangan Calon Drs. Andi Maddusila Andi Idjo dan Jamaluddin Rustam, SH, MH, Memenuhi Syarat untuk menjadi Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2010.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, Nomor: 06 Tahun 2010, tanggal 21 April 2010, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa

tahun 2010. Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa Provinsi Sulawesi Selatan peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2010-2015, menempati Nomor Urut 2 (dua), yang penempatan nomor urut pasangan calon selengkapnya sebagai berikut:

- Nomor urut 1 adalah Ahmad Pidris Zain dan Abdul Ravy Rasyid
  - Nomor Urut 2 adalah Drs. Andi Maddusila Andi Idjo dan Jamaluddin Rustam, SH, MH.
  - Nomor Urut 3 adalah Drs. Andi Mappaturung dan Drs. H.M. Burhanuddin Matakko
  - Nomor Urut 4 adalah H. Ichsan Yasin Limpo, SH dan H. Abd. Razak Badjidu, S.Sos
3. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Periode 2010-2015 telah dilaksanakan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa) pada hari Rabu Tanggal 23 Juni 2010;
  4. Bahwa Pemohon mengajukan Keberatan dan Permohonan penyelesaian perselisihan atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa Periode 2010-2015 yang ditetapkan oleh Termohon dengan Surat Keputusan Nomor 12 Tahun 2010 tanggal 2 Juli 2010;
  5. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum kepala daerah;
  6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman

Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);

7. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Gowa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa (Termohon) telah menetapkan, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Andi Maddusila Andi Idjo dan Jamaluddin Rustam, SH,MH) memperoleh suara sebanyak 134,409 suara, dengan perincian perolehan masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :
  - Ahmad Pidris Zain dan Abdul Ravy Rasyid suara sah 2.206 (dua ribu dua ratus enam)
  - Drs. Andi Maddusila Andi Idjo dan Jamaluddin Rustam, SH, MH suara sah 134.409 (seratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan)
  - Andi Mappatunrung dan Bahrudin Matakko suara sah 2.165 (dua ribu seratus enam puluh lima)
  - H. Ichsan Yasin Limpo dan Razak Bajidu suara sah 184.628 (seratus delapan puluh empat enam ratus dua puluh delapan)
8. Bahwa Termohon melalui Surat Keputusan Nomor 12 Tahun 2010 tanggal 2 Juli 2010 telah menetapkan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 4 (empat), yakni H. Ichsan Yasin Limpo, SH, MH dan Abd. Razak Bajidu sebagai Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Gowa Periode 2010-2015 dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010;
9. Bahwa hasil Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Gowa Periode 2010-2015 dalam Pemilukada Kabupaten Gowa Tahun 2010 yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tersebut diatas karena proses penyelenggaraan pemilukada dan proses penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Termohon Cacat Formil, yang dilaksanakan secara tidak jujur dan tidak adil dan penuh dengan praktek kecurangan yang bersifat massif terstruktur dan terencana berdasarkan dokumen dokumen yang secara sengaja dibuat dan dipersiapkan oleh Termohon dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Gowa. Apalagi seharusnya Termohon berpedoman pada Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana yang terdapat pada Pasal 2 asas penyelenggra pemilu

yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu dan lain-lain;

10. Bahwa selain itu, Termohon dalam melakukan penyelenggaraan Pemilukada, Termohon juga mengabaikan asas kepastian hukum bagi calon peserta pemilukada kabupaten Gowa, sehingga Calon Bupati H. Ikhsan Yasin Limpo mencalonkan diri sebagai Calon Bupati, padahal syarat formal tentang Pendidikan dan atau Jenjang Pendidikan yang dapat dibuktikan dengan Ijazah mulai dari Ijazah Sekolah Dasar (SD/MI) atau yang disamakan, Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang disamakan tidak dapat diperlihatkan aslinya dan tidak dilampirkan dalam persyaratan calon sebagaimana syarat ketentuan menurut UU, Sehingga dengan tidak dipenuhinya syarat dimaksud seharusnya Termohon tidak meluluskan pencalonan Ichsan Yasin Limpo sebagai Calon Bupati Kabupaten Gowa pada Pemilukada tahun 2010 – 2015;
11. Bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara bagi keseluruhan pasangan calon dalam pemilukada kabupaten Gowa Tahun 2010. Kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggran tersebut telah menguntungkan pasangan calon atas nama H. Ichsan Yasin Limpo, sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Termohon. Dengan demikian Termohon telah bersikap memperlakukan peserta Pemilukada secara tidak adil, tidak jujur dan memihak, dimana tindakan Termohon yang demikian itu telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf b UU No.22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
12. Bahwa kesalahan-kesalahan dan Pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan terkait Pemilukada yang dilakukan Termohon tersebut dengan cara:
  - a. Termohon secara sengaja/sadar dan melawan hukum telah membiarkan dan meloloskan sebagai pasangan calon Kepala Daerah Kabupaten Gowa Pasangan calon nomor urut 4 (empat) atas nama H. Ihsan Yasin Limpo yang tidak memenuhi syarat administrasi sebab tidak dapat memperlihatkan asli Ijasah Sekolah Dasar (SD), bahwa masih dalam kaitan itu Termohon telah meluluskan H.Ichsan YasinLimpo sebagai calon kepala daerah pada Pemilukada kab.Gowa tahun 2010 dengan hanya

melampirkan surat keterangan No.421.6 / 026/ SDN.MSD.I / 03/2005 bertanggal Makassar 4 Maret 2005 yang berisi keterangan bahwa yang bersangkutan pernah sekolah pada SD Pembangunan II yang sekarang menjadi SDN Monginsidi I sampai dengan kelas VII pada tahun 1976.

Bahwa keberadaan surat keterangan a quo tidak dapat dijadikan sebagai pengganti Ijazah SD sebagaimana di syaratkan dalam Undang-undang, apalagi secara substantif tidak diterangkan secara jelas dan tegas apakah H. Ichsan Yasin limpo ketika bersekolah pada SD tersebut telah menamatkan pendidikannya atau tidak.

Bahwa kejanggalan lain secara materil dalam surat keterangan a quo adalah bahwa pada tahun 1976 semua SD yang ada tidak ada yang menyelenggarakan pendidikan sampai kelas VII, semua SD hanya menyelenggarakan pendidikan hingga kelas VI, sehingga dengan surat keterangan yang secara materil a quo tidak benar maka hal itu semakin menambah kejelasan bahwa yang bersangkutan tidak pernah bersekolah secara normal pada SD tersebut.

Bahwa sesuai ketentuan pencalonan khususnya diuraikan dan dimaksudkan dalam pasal 58 huruf c UU No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Juncto UU No.12 tahun 2008 Tentang Perubahan UU No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Jo PP No.6 Tahun 2005 beserta perubahannya, serta Peraturan KPU No.68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tekhnis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 1, 2, 3, 4 yang keseluruhan ketentuan Perundang-undangan tersebut maupun peraturan tekhnis KPU mensyaratkan agar calon kepala Daerah melampirkan foto copy ijazah SD yang sudah dilegalisir, bukan surat keterangan lain, sehingga dengan tidak dilampirkannya foto copy ijazah SD yang telah dilegalisir tersebut menurut hukum menyebabkan calon bersangkutan tidak memenuhi syarat administrasi.

- b. Bahwa bukan hanya permasalahan Ijazah SD Calon Kepala Daerah atas nama H. Ichsan Yasin Limpo yang menyebabkan yang bersangkutan secara administrasi harus di gugurkan, melainkan juga Ijazah SLTP yang digunakan yaitu Ijazah SLTP yang di diklaim di peroleh dan dikeluarkan pada sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Jongaya yang saat ini

berubah namanya menjadi SMP Negeri 27 juga terdapat beberapa kejanggalan yang menyebabkan legalitas ijazah tersebut menjadi hilang, kejanggalan atas ijazah SMP Calon kepala daerah Ichsan Yasin Limpo *a quo* dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Ijazah SMP *a quo* yang diajukan sebagai alat kelengkapan administrasi pencalonan tidak dilegalisir terlebih dahulu oleh sekolah bersangkutan dan tidak dapat diperlihatkan aslinya, dengan demikian persyaratan calon sesuai dengan yang dimaksudkan dalam pasal 58 huruf c UU No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Juncto UU No.12 tahun 2008 Tentang Perubahan UU No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Jo PP No.6 Tahun 2005 beserta perubahannya, serta Peraturan KPU No.68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tekhnis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 1, 2, 3, 4 tidak dapat dipenuhi yang menyebabkan calon bersangkutan harus dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi sebagai pasangan calon sehingga harus digugurkan dan tidak dapat diikuti sebagai pasangan calon pada pemilukada kab.Gowa tahun 2010.
2. Bahwa sesuai dengan data yang ada pada SMP Negeri Jongaya, Ijazah dengan No.1191 terdaftar atas nama Abd.Rahman, anak dari LOSE, bukan terdaftar atas nama Ichsan atau saat ini dikenal bernama Ichsan Yasin Limpo, daftar nilai yang tertera dalam foto copi ijazah SMP yang diajukan oleh Ichsan yasin Limpo sebagai syarat calon adalah persis sama dengan daftar nilai milik Abd.Rahman dengan susunan nilai angka ijazah secara berurutan dari atas kebawah adalah sebagai berikut: 6, 6, 6, 6, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7 dengan jumlah 103.
3. Bahwa kejanggalan lain pada Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar SMP Negeri Jongaya yang dimiliki atas nama Ichsan terdapat dibagian stempel pada Ijazah dimaksud, dimana pada bagian depan dari Ijazah tersebut dicap dengan stempel "SMP JONGAYA", sebaliknya pada cap stempel di bagian belakang dari Ijazah tersebut di cap dengan stempel SMP 27.



Penggunaan dua stempel sekolah yang berbeda pada satu ijazah yang sama apalagi asli ijazah tersebut tidak dapat diperlihatkan dan dilegalisir sebagai mana dipersyaratkan Undang-Undang semakin membuktikan ketidak aslian ijazah tersebut.

4. Bahwa foto siswa yang digunakan oleh Ichsan pada Ijazah SMP Jongaya tersebut menggunakan foto dengan baju kaos bundar leher dan bergaris-garis hitam serta rambut yang agak panjang, kesemua penampilan dalam foto ijazah tersebut membuktikan ketidak aslian dari ijazah tersebut sebab menurut ketentuan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, dimana pada tahun 1976 semua siswa SMP harus menggunakan seragam sekolah yaitu baju putih dan celana biru serta rambut pendek dan rapi apalagi ketika siswa harus berfoto untuk kepentingan pembuatan sertifikat ijazah sekolah.
5. Bahwa ketidakaslian Ijazah SMP Jongaya milik Ichsan Yasin Limpo yang digunakan dalam pencalonan sebagai Kepala Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2010 telah diakui dan dipertegas oleh kepala Sekolah SMP Jongaya dengan Surat keterangan No.86/422.1/6/SMP.27/2020 bertanggal Makassar 21 Juni 2010, dimana surat keterangan kepala SMP Negeri 27 makassar tersebut pada intinya menerangkan bahwa Ichsan, Stb No.1191 anak dari M Yasin Limpo :
  - a. Tidak pernah menjadi peserta ujian SMP Negeri Jongaya pada tahun 1976 dan tidak terdaftar dalam daftar nama-nama calon peserta evaluasi belajar tahun 1976.
  - b. Nomor Induk Siswa 1191 adalah milik Abd Rahman kelahiran Sapaya tanggal 1 Mei 1959 anak dari LOSE dengan Nomor ujian 091.
  - c. Surat keterangan yang pernah dikeluarkan pada tanggal 20 april 2010 No.64/IV/SMPN 27/2010 terpaksa dibuat dan ditandatangani karena yang bersangkutan di tekan dan dipaksa oleh seseorang bernama Idris Faisal Kadir Dalle, S.H., dkk.
6. Bahwa permasalahan keaslian Ijazah milik Ichsan Yasin Limpo sebagai bakal calon maupun sebagai calon kepala daerah Kabupaten Gowa pada Pemilu pada tahun 2010 telah dilaporkan masyarakat Kabupaten Gowa maupun beberapa Lembaga swadaya Masyarakat

yang ada di kabupaten Gowa sebelum penetapan pasangan calon oleh Termohon, di antara yang melaporkan mengenai keaslian ijazah tersebut adalah sebagai berikut:

- LSM Gempar telah melaporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Gowa dengan Laporan Pengaduan No.011/LSP3M/GP/II/2010 tertanggal 10 Pebruari 2010 Perihal Ijazah SMP Milik Pak Ichsan Yasin Limpo palsu, dimana surat pengaduan tersebut telah di tindak lanjuti oleh Panwaslukada kabupaten Gowa kepada KPU Kab.Gowa dengan Nomor surat No.26/Panwaslukada-GW/IV/2010 tanggal 17 April 2010, yang pada intinya Panwaslukada meminta kepada KPU kabupaten Gowa untuk melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang berkompeten tentang permasalahan ijazah milik Ichsan Yasin Limpo yang diadakan oleh masyarakat sampai dengan sebelum penentuan calon bupati dan wakil bupati pemilukada Kabupaten Gowa tahun 2010, namun rekomendasi panwaslukada ini tidak ditindak lanjuti oleh KPU kabupaten Gowa bahkan dengan sengaja Termohon mengabaikan rekomendasi panwas tersebut.
- Forum Solidaritas masyarakat Gowa juga telah mengadakan permasalahan ijazah milik Ichsan tersebut kepada ketua Bawaslu dengan surat tertanggal 24 Mei 2010 yang pada intinya Forum Solidaritas Masyarakat Gowa menyampaikan kepada bawaslu bahwa ijazah SMP Negeri jongaya milik bapak Ichsan Yasin Limpo yang menjadi calon kepala daerah Kabupaten Gowa pada pemilukada Kabupaten Gowa tahun 2010 adalah di duga kuat palsu, namun surat dari forum masyarakat ini pun tidak diindahkan sebagaimana mestinya sehingga yang bersangkutan tetap di nyatakan dan ditetapkan sebagai pasangan calon oleh Termohon.
- Bahwa mengenai Ijazah palsu milik Ichsan Yasin Limpo, juga telah dilaporkan oleh masyarakat yang bernama Arifuddin Siala kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana tanda terima surat masuk tertanggal 15 Mei 2010 No. 0171/B.G1/V/2010 Perihal Laporan Pengaduan Masyarakat.

- Laporan yang sama berkenaan dengan Ijazah palsu milik Ichsan Yasin Limpo juga telah diajukan oleh masyarakat GOWA kepada Kapolri sebagaimana tanda terima surat tertanggal 14 Juni 2010, dan sebelumnya juga telah dilaporkan secara resmi oleh masyarakat Gowa kepada Polwiltabes Makassar yang saat ini prosesnya dalam tahap penyidikan.

Apabila dibandingkan antara surat keterangan nomor: 421.6/026/SDN.MSD.I/03/2005 tanggal 4 Maret 2005 tentang Ichsan Pernah Sekolah Pada SD Pembangunan II yang Sekarang Bernama SD Monginsidi I dengan *fotocopy* ijazah SMP Negeri Jongaya milik Ichsan, maka terdapat kejanggalan yang sangat prinsipil yaitu:

1. Tanggal kelahiran pada surat keterangan, yaitu tertanggal **16 Maret 1963**, sedangkan pada ijazah SMP milik Ichsan tanggal kelahirannya **9 Maret 1961**, sehingga terjadi perbedaan pada tanggal dan tahun kelahiran. Bahwa jika diamati tahun kelahiran, nampak tahun kelahiran pada ijazah SMP lebih tua dari surat keterangan tersebut di atas, berdasarkan fakta tersebut di atas telah membuktikan bahwa kedua dokumen tersebut tidak benar karena tidak bersesuaian.
2. Bahwa berdasarkan surat keterangan nomor: 421.6/026/SDN.MSD.I/03/2005 tanggal 4 Maret 2005, saudara Ichsan telah menempuh proses pendidikan SD sampai dengan Kelas VII **pada tahun 1976**, pada kesempatan yang sama saudara Ichsan juga telah dinyatakan tamat SMP pada tahun yang sama, yaitu **tahun 1976**.

Sungguh aneh dan ajaib, tidak masuk akal dan tidak mungkin seseorang dinyatakan tamat SD dan SMP secara bersamaan *in casu* tamat di SD pada tahun 1976 dan tamat pula di SMP pada tahun 1976. Tapi ini adalah fakta yang terjadi dan telah digunakan oleh pasangan calon nomor urut 4 sebagai persyaratan administrasi pencalonan yang ternyata diloloskan oleh KPU Kabupaten Gowa sekalipun telah dilakukan bebrbagai macam upaya keberatan, laporan serta gerakan moral berupa demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat Kab. Gowa yang telah diberitakan dan diliput oleh media elektronik dan media cetak.

Bahwa dengan demikian dokumen dokumen berkenaan dengan ijazah dan surat keterangan milik Ichsan Yasin Limpo yang dijadikan kelengkapan

administrasi sebagai syarat pencalonan bupati pada Pemilu Kabupatena Gowa Tahun 2010 adalah terindikasi cacat yuridis, formil, dan cacat materil.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tentang syarat administrasi pencalonan sebagaimana diuraikan diatas maka menurut hukum Termohon sebagai penyelenggara harus menggugurkan Ichsan Yasin Limpo sebagai Calon Kepala Daerah pada Pemilu Kabupatena Gowa Tahun 2010, akan tetapi Termohon telah menjalankan tugas dan kewenangannya secara tidak mandiri, tidak profesional, tidak akuntable dan tidak menjamin kepastian hukum sebagai mana diwajibkan dalam pasal 2 UU No.22 tahun 2007 sehingga Ichsan Yasin Limpo tetap diikuti sebagai pasangan calon pada Pemilu Tahun 2010.

Bahwa menurut Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Kabupaten Gowa No.02 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tekhnis Tata Cara Pencalonan Pemilu Kab.Gowa Tahun 2010, seharusnya Termohon melakukan verifikasi terhadap **kelengkapan dan keabsahan** berkas administrasi surat pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari, dan apabila ditemukan keganjilan dan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Kabupaten Gowa melakukan klarifikasi kebenaran dokumen tersebut. Setiap klarifikasi disertai berita acara hasil klarifikasi yang diketahui oleh instansi yang berwenang.

Namun dalam permasalahan ijazah calon Kepala Daerah Ichsan Yasin Limpo ini, Termohon tidak pernah melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap validasi ijazah milik Ichsan Yasin Limpo *a quo* dan bahkan Termohon tidak transparan dan tidak menghiraukan keberatan masyarakat tersebut dan tetap berjalan sesuai tahapan yang telah Termohon Tetapkan, sehingga dengan fakta *a quo* jelas Termohon telah menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan yang ada padanya sehingga sangat merugikan kepentingan Pemohon dan kepentingan masyarakat Kabupaten Gowa secara umum serta mencederai demokrasi yang pada dasarnya merupakan sarana atau wadah rakyat menjalankan kedaulatannya dalam hal memunculkan pemimpin yang amanah dan mampu memberi kesejahteraan.

Bahwa dengan fakta *a quo* maka telah terbukti menurut hukum bahwa Pemilukada Kabupaten Gowa yang telah dilaksanakan Termohon pada Tanggal 23 Juni 2010 adalah cacat hukum karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf c UU No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Juncto UU No.12 tahun 2008 Tentang Perubahan UU No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Jo PP No.6 Tahun 2005 beserta perubahannya, serta Peraturan KPU No.68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tekhnis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 1, 2, 3, 4. dan oleh karenanya harus di batalkan karena telah menetapkan Ichsan Yasin Limpo sebagai pasangan calon nomor urut 4 padahal yang bersangkutan tidak memenuhi syarat menurut hukum sebagai Calon kepala Daerah.

Bahwa secara hukum sdr. Ichsan Yasin Limpo seharusnya tidak dapat ditetapkan oleh Termohon sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Gowa untuk mengikuti Pemilukada Kabupaten Gowa periode 2010-2015 karena syarat pencalonannya bertentangan dengan syarat wajib sebagaimana yang dimaksud dalam dalam pasal 58 huruf c UU No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Juncto UU No.12 tahun 2008 Tentang Perubahan UU No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Jo PP No.6 Tahun 2005 beserta perubahannya, serta Peraturan KPU No.68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tekhnis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 1, 2, 3, 4.

13. Bahwa Termohon pada tanggal 7 Mei 2010 berdasarkan Berita Acara Nomor 11/BA/KPU-GW/V/2010 telah melaksanakan rapat pleno terbuka dan menetapkan Penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Gowa Tahun 2010, adalah sebagai berikut:

TABEL 1

**REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH OLEH KPU KABUPATEN GOWA TAHUN 2010**

NO	KECAMATAN	DPT PEMILUKADA 2010	JUMLAH	JUMLAH
----	-----------	---------------------	--------	--------

		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PPS	TPS
1.	BONTOMARANNU	9.263	10.647	19.910	9	37
2.	BUNGAYA	5.647	6.169	11.816	7	36
3.	MANUJU	4.735	5.040	9.775	7	33
4.	PARIGI	4.805	5.401	10.206	5	34
5.	SOMBA OPU	38.442	41.982	80.424	14	148
6.	TOMPOBULU	10.898	11.984	22.882	8	69
7.	BAJENG	19.951	21.701	41.652	14	77
8.	BAJENG BARAT	8.050	8.708	16.758	7	31
9.	BAROMBONG	10.918	11.727	22.645	7	41
10.	BIRINGBULU	12.784	13.491	26.275	11	79
11.	BONTONOMPO SELATAN	9.774	11.236	21.010	9	40
12.	TOMBOLO PAO	9.190	9.406	18.596	9	57
13.	BONTOLEMPANGAN	5.732	6.192	11.924	8	36
14.	BONTONOMPO	12.493	14.480	26.973	14	50
15.	PALLANGGA	31.529	34.184	65.713	16	122
16.	PARANGLOE	5.380	5.972	11.352	7	32
17.	PATTALLASANG	7.198	7.706	14.904	8	32
18.	TINGGIMONCONG	<b>7.267</b>	7.608	14.875	7	41
<b>JUMLAH</b>		<b>214.056</b>	<b>233.634</b>	<b>447.690</b>	<b>167</b>	<b>995</b>

Sungguminasa, 7 Mei 2010

Sumber : KPU Kab.Gowa 2010

Bahwa dari Pemilukada yang diselenggarakan Termohon pada tanggal 23 Juni 2010, ditemukan berbagai permasalahan yang merupakan bentuk pelanggaran secara sistematis dan massive terhadap peraturan perundang-undangan, dimana berbagai bentuk penyimpangan a quo dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut:

#### **I. TENTANG DPT TIDAK BERSYARAT**

1. Bahwa menyadari banyaknya pengaduan masyarakat menyangkut permasalahan DPT di Kabupaten Gowa sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan validasi yang hasilnya disampaikan pada Termohon untuk dilakukan pemutakhiran kembali sebelum hari pemungutan suara.

2. Bahwa pada pertemuan antara semua tim pasangan calon bupati kabupaten Gowa bertempat pada Kantor KPU Kabupaten Gowa, Pemohon telah melakukan keberatan atas DPT yang diajukan Termohon, adapun inti dari keberatan Pemohon yaitu masih banyak warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilukada Kabupaten Gowa tidak terdata dan tidak tercantum dalam DPT, disisi lain telah terjadi penambahan jumlah pemilih yang berdomisili diluar wilayah kabupaten Gowa dan pemilih dibawah umur, penambahan dimaksud kemudian terakomodir dalama DPT meskipun diduga kuat bukan warga kabupaten Gowa dan tidak memiliki Kartu Keluarga dan KTP kabupaten Gowa, dengan demikian penambahan dimaksud sudah dapat dipastikan bahwa pemilih yang bersangkutan tidak memiliki NIK (Nomor Induk Keluarga). Bahwa meskipun telah dilakukan upaya keberatan dari pihak Pemohon, namun demikian tidak ditindak lanjuti oleh pihak Termohon dan tetap mempertahankan DPT yang dianggap bermasalah dan cacat yuridis.
3. Bahwa DPT yang ditetapkan oleh Termohon sebagai rujukan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya terdapat wajib pilih yang bermasalah dan sangat serius dengan kategori sebagai berikut:
  - a. Terdapat 32.244 pemilih dalam DPT yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan;
  - b. Terdapat 27.639 Pemilih dengan NIK Rekayasa;
  - c. Terdapat 170 Pemilih di Bawah Umur yaitu pemilih yang telah terdaftar dalam DPT tetapi belum berumur 17 (tujuh belas) tahun pada tanggal 23 Juni 2010;
  - d. Terdapat 3.019 Penggandaan pemilih pada kategori NIK Ganda dalam DPT.
4. Bahwa pencantuman pemilih yang terdapat dalam DPT pada Pemilukada Kabupaten Gowa Tahun 2010 dengan NIK Ganda yaitu 1 (satu) NIK digunakan secara berulang-ulang oleh beberapa wajib pilih) dilakukan oleh Termohon dengan dua pola yaitu dengan cara Penggandaan NIK yang digunakan oleh beberapa Pemilih dan Penggandaan Pemilih dengan Nama dan Alamat yang sama, sedangkan modus penyebarannya dilakukan oleh Termohon dengan pola penyebaran dalam bentuk Pemilih Ganda dalam TPS yang sama, Pemilih Ganda Lintas TPS dalam Desa/Kelurahan, Pemilih

Ganda Lintas Desa/ Kelurahan dalam satu kecamatan dan Pemilih Ganda Lintas Kecamatan.

5. Bahwa wajib pilih fiktif (rekayasa) yang terdaftar dalam DPT tersebut di atas yang tergolong sebagai pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif totalnya berjumlah 63.072 pemilih dengan tingkat sebaran kejadiannya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Gowa. Karena itu, Termohon telah melakukan Pelanggaran serius yang membuktikan tidak profesionalnya Termohon dalam melakukan pemutakhiran DPT yang dapat dibuktikan di 18 (delapan belas) Kecamatan, yaitu Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Tinggi Moncong, Kecamatan Barombong, Kecamatan Bontonompo, Kecamatan Tombolopao, Kecamatan Bontolempangan, Kecamatan Bajeng Barat, Kecamatan Pattalasang, Bontomarannu, Kecamatan Bajeng, Kecamatan Manuju, Kecamatan Biringbulu, Kecamatan Paranglae, Kecamatan Parigi, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kecamatan Pallangga dan Kecamatan Bungaya, sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini :

**TABEL 1:  
REKAPITULASI PEMILIH TANPA NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN  
(PEMILIH TANPA NIK)**

KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	NIK Rekayasa	%	PEMILIH
BONTONOMPO	TAMALLAYANG	01	57	9.55	597
BONTONOMPO	TAMALLAYANG	02	78	13.24	589
BONTONOMPO	TAMALLAYANG	03	88	14.67	600
BONTONOMPO	TAMALLAYANG	04	127	27.55	461
BONTONOMPO	TAMALLAYANG	06	81	13.71	591
BAJENG	BONTOSUNGGU	01	111	18.50	600
BAJENG	BONTOSUNGGU	02	82	13.67	600
BAJENG	BONTOSUNGGU	03	97	16.61	584
BAJENG	BONTOSUNGGU	04	76	14.50	524
BAJENG	BONTOSUNGGU	05	57	9.73	586
BAJENG	BONTOSUNGGU	06	85	16.63	511
BAJENG	BONTOSUNGGU	07	178	31.90	558
BAJENG	MARADEKAYA	01	122	26.29	464
BAJENG	MARADEKAYA	02	52	13.33	390
BAJENG	MARADEKAYA	03	144	24.00	600
BAJENG	MARADEKAYA	04	127	27.19	467



BAJENG	MARADEKAYA	05	153	28.92	529
BAJENG	MARADEKAYA	06	193	32.17	600
BAJENG	MARADEKAYA	07	203	33.83	600
BAJENG	PANCIRO	01	186	34.51	539
BAJENG	PANCIRO	02	142	24.65	576
BAJENG	PANCIRO	04	92	21.30	432
BAJENG	PANCIRO	05	238	41.83	569
BAJENG	PANCIRO	06	82	17.52	468
BAJENG	PANCIRO	07	121	21.04	575
TOMPOBULLU	MALAKAJI	01	2	0.77	261
TOMPOBULLU	MALAKAJI	03	2	0.47	426
TOMPOBULLU	MALAKAJI	04	3	0.57	524
TOMPOBULLU	MALAKAJI	05	11	2.74	402
TOMPOBULLU	MALAKAJI	06	10	3.80	263
TOMPOBULLU	MALAKAJI	07	27	4.90	551
TOMPOBULLU	MALAKAJI	08	25	15.72	159
TOMPOBULLU	RAPPOLEMBA	06	2	0.87	229
TOMPOBULLU	RAPPOLEMBA	12	1	0.22	463
PARANGLOE	BARISALO	01	37	13.31	278
PARANGLOE	BARISALO	02	56	18.36	305
PARANGLOE	BARISALO	03	70	22.36	313
PARANGLOE	BARISALO	04	19	6.57	289
PARANGLOE	BARISALO	05	57	15.66	364
PARANGLOE	BARISALO	06	97	25.59	379
BONTOMARANNU	ROMANGLOMPOA	01	44	7.83	562
BONTOMARANNU	ROMANGLOMPOA	02	49	8.63	568
BONTOMARANNU	ROMANGLOMPOA	03	11	1.97	559
BONTOMARANNU	ROMANGLOMPOA	04	33	5.75	574
BONTOMARANNU	ROMANGLOMPOA	05	56	9.84	569
BONTOMARANNU	ROMANGLOMPOA	06	179	29.98	597
PALLANGGA	TETEBATU	01	183	35.60	514
PALLANGGA	TETEBATU	02	113	18.96	596
PALLANGGA	TETEBATU	03	102	17.35	588
PALLANGGA	TETEBATU	04	67	13.29	504
PALLANGGA	TETEBATU	05	119	21.52	553
PALLANGGA	TETEBATU	06	182	31.71	574
PALLANGGA	BONTOALA	01	195	33.33	585
PALLANGGA	BONTOALA	02	38	6.34	599
PALLANGGA	BONTOALA	03	96	21.48	447
PALLANGGA	BONTOALA	04	177	31.33	565

PALLANGGA	BONTOALA	05	61	13.99	436
PALLANGGA	BONTOALA	06	489	100.00	489
PALLANGGA	BONTOALA	07	210	36.21	580
PALLANGGA	BONTOALA	08	143	27.71	516
PALLANGGA	BONTOALA	09	432	72.97	592
PALLANGGA	BONTOALA	10	32	5.52	580
PALLANGGA	BONTOALA	11	153	39.84	384
PALLANGGA	BONTOALA	12	21	4.99	421
PALLANGGA	BONTOALA	13	117	20.45	572
PALLANGGA	BONTOALA	14	143	30.69	466
PALLANGGA	BONTOALA	15	59	20.07	294
PALLANGGA	BONTOALA	16	277	46.63	594
PALLANGGA	BONTOALA	17	237	40.31	588
PALLANGGA	BONTOALA	18	3	0.60	500
PALLANGGA	BONTOALA	19	276	66.83	413
PALLANGGA	BONTOALA	20	208	46.33	449
PALLANGGA	BONTOALA	21	250	53.65	466
PALLANGGA	BONTOALA	22	142	30.21	470
PALLANGGA	BONTOALA	23	291	62.31	467
SOMBA OPU	SUNGGUMINASA	01	207	34.67	597
SOMBA OPU	SUNGGUMINASA	02	167	32.87	508
SOMBA OPU	SUNGGUMINASA	03	447	76.15	587
SOMBA OPU	SUNGGUMINASA	04	66	14.63	451
SOMBA OPU	SUNGGUMINASA	05	93	17.03	546
SOMBA OPU	SUNGGUMINASA	06	184	32.34	569
SOMBA OPU	SUNGGUMINASA	07	197	32.83	600
SOMBA OPU	SUNGGUMINASA	08	242	40.33	600
SOMBA OPU	SUNGGUMINASA	09	57	9.50	600
SOMBA OPU	BONTO-BONTOA	01	155	28.08	552
SOMBA OPU	BONTO-BONTOA	02	222	40.88	543
SOMBA OPU	BONTO-BONTOA	03	100	18.59	538
SOMBA OPU	BONTO-BONTOA	04	184	31.03	593
SOMBA OPU	BONTO-BONTOA	05	264	47.23	559
SOMBA OPU	BONTO-BONTOA	06	147	29.52	498
SOMBA OPU	BONTO-BONTOA	07	426	83.53	510
SOMBA OPU	BONTO-BONTOA	08	511	86.76	589
SOMBA OPU	BONTO-BONTOA	09	424	72.85	582
SOMBA OPU	BONTO-BONTOA	10	502	83.67	600
SOMBA OPU	BONTO-BONTOA	11	226	44.84	504
SOMBA OPU	BONTO-BONTOA	12	352	76.19	462

SOMBA OPU	BONTO-BONTOA	13	180	36.07	499
SOMBA OPU	BONTO-BONTOA	14	265	52.48	505
SOMBA OPU	PACCINONGANG	01	165	31.73	520
SOMBA OPU	PACCINONGANG	02	187	30.11	621
SOMBA OPU	PACCINONGANG	03	192	39.10	491
SOMBA OPU	PACCINONGANG	04	150	28.90	519
SOMBA OPU	PACCINONGANG	05	156	35.78	436
SOMBA OPU	PACCINONGANG	06	363	60.00	605
SOMBA OPU	PACCINONGANG	07	255	43.59	585
SOMBA OPU	PACCINONGANG	08	565	94.80	596
SOMBA OPU	PACCINONGANG	09	227	38.61	588
SOMBA OPU	PACCINONGANG	10	178	46.72	381
SOMBA OPU	PACCINONGANG	11	239	39.90	599
SOMBA OPU	PACCINONGANG	12	122	20.37	599
SOMBA OPU	PACCINONGANG	13	217	43.14	503
SOMBA OPU	PACCINONGANG	14	138	26.80	515
SOMBA OPU	PACCINONGANG	15	526	100.00	526
SOMBA OPU	PACCINONGANG	16	487	100.00	487
SOMBA OPU	PACCINONGANG	17	196	36.77	533
SOMBA OPU	PACCINONGANG	18	308	71.96	428
SOMBA OPU	PACCINONGANG	19	202	40.89	494
SOMBA OPU	PACCINONGANG	20	536	90.39	593
SOMBA OPU	PACCINONGANG	21	504	100.00	504
SOMBA OPU	PACCINONGANG	22	504	97.49	517
TOMBOLOPAO	KANREAPIA	01	195	35.71	546
TOMBOLOPAO	KANREAPIA	02	79	18.20	434
TOMBOLOPAO	KANREAPIA	03	31	10.37	299
TOMBOLOPAO	KANREAPIA	04	46	16.20	284
TOMBOLOPAO	KANREAPIA	05	69	20.12	343
TOMBOLOPAO	KANREAPIA	06	41	12.81	320
TOMBOLOPAO	KANREAPIA	07	55	17.46	315
TOMBOLOPAO	KANREAPIA	08	27	6.55	412
BIRINGBULU	TARING	01	102	35.66	286
BIRINGBULU	TARING	02	66	14.51	455
BIRINGBULU	TARING	03	62	23.94	259
BIRINGBULU	TARING	04	104	23.58	441
BIRINGBULU	TARING	05	89	33.33	267
BIRINGBULU	TARING	06	71	37.17	191
BIRINGBULU	TARING	07	142	30.80	461
BIRINGBULU	TARING	08	169	48.15	351

BIRINGBULU	TARING	09	146	51.05	286
BIRINGBULU	TARING	10	84	39.44	213
BIRINGBULU	TARING	11	75	14.56	515
BIRINGBULU	BERUTALLASA	01	142	36.22	392
BIRINGBULU	BERUTALLASA	02	41	10.05	408
BIRINGBULU	BERUTALLASA	03	78	17.49	446
BIRINGBULU	BERUTALLASA	04	5	1.56	320
BIRINGBULU	BERUTALLASA	05	68	19.77	344
BIRINGBULU	BERUTALLASA	06	25	5.79	432
BIRINGBULU	BERUTALLASA	07	77	20.32	379
BIRINGBULU	BERUTALLASA	08	49	14.67	334
BIRINGBULU	BERUTALLASA	09	72	20.99	343
BIRINGBULU	BERUTALLASA	10	19	4.85	392
BAROMBONG	KANJILO	01	41	7.54	544
BAROMBONG	KANJILO	02	146	26.94	542
BAROMBONG	KANJILO	03	16	3.04	526
BAROMBONG	KANJILO	04	20	3.47	577
BAROMBONG	KANJILO	05	479	81.88	585
BAROMBONG	KANJILO	06	497	83.67	594
BAROMBONG	KANJILO	07	184	31.29	588
BAROMBONG	KANJILO	08	169	28.74	588
PATTALASANG	TIMBUSENG	01	128	25.70	498
PATTALASANG	TIMBUSENG	02	221	43.42	509
PATTALASANG	TIMBUSENG	03	189	37.95	498
PATTALASANG	TIMBUSENG	04	330	76.21	433
PATTALASANG	TIMBUSENG	05	354	99.72	355
PATTALASANG	TIMBUSENG	06	88	27.59	319
PATTALASANG	TIMBUSENG	07	232	100.00	232
PATTALASANG	TIMBUSENG	08	170	100.00	170
MANUJU	PATTALIKKANG	01	95	25.27	376
MANUJU	PATTALIKKANG	02	38	17.43	218
MANUJU	PATTALIKKANG	03	60	24.19	248
MANUJU	PATTALIKKANG	04	56	14.78	379
MANUJU	PATTALIKKANG	05	32	10.85	295
MANUJU	PATTALIKKANG	06	26	12.87	202
MANUJU	PATTALIKKANG	07	46	14.84	310
BONTOLEMPANGANG	BONTOLEMPANGANG	01	39	15.85	246
BONTOLEMPANGANG	BONTOLEMPANGANG	02	122	28.11	434
BONTOLEMPANGANG	BONTOLEMPANGANG	03	52	11.35	458
BONTOLEMPANGANG	BONTOLEMPANGANG	04	161	37.79	426

BONTOLEMPANGANG	BONTOLEMPANGANG	05	162	40.40	401
BONTOLEMPANGANG	PARANGLOMPOA	01	285	93.75	304
BONTOLEMPANGANG	PARANGLOMPOA	02	170	60.71	280
BONTOLEMPANGANG	PARANGLOMPOA	03	220	58.67	375
BONTOLEMPANGANG	PARANGLOMPOA	04	143	47.83	299
BONTOLEMPANGANG	PARANGLOMPOA	05	233	100.00	233
BONTOLEMPANGANG	PARANGLOMPOA	06	208	50.12	415
BAJENG BARAT	GENTUNGANG	01	589	100.00	589
BAJENG BARAT	GENTUNGANG	02	586	100.00	586
BAJENG BARAT	GENTUNGANG	03	558	100.00	558
BAJENG BARAT	GENTUNGANG	04	588	100.00	588
BAJENG BARAT	GENTUNGANG	05	538	100.00	538
BAJENG BARAT	GENTUNGANG	06	524	100.00	524
BAJENG BARAT	GENTUNGANG	07	504	100.00	504
			<b>32,142</b>		<b>89,091</b>

TABEL 2:  
REKAPITULASI PEMILIH DENGAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN  
REKAYASA (PEMILIH DENGAN NIK INVALID)

KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	NIK Rekayasa	%	PEMILIH
BONTONOMPO	TAMALLAYANG	01	156	26.13	597
BONTONOMPO	TAMALLAYANG	02	194	32.94	589
BONTONOMPO	TAMALLAYANG	03	184	30.67	600
BONTONOMPO	TAMALLAYANG	04	100	21.69	461
BONTONOMPO	TAMALLAYANG	05	195	31.81	613
BONTONOMPO	TAMALLAYANG	06	157	26.57	591
BAJENG	BONTOSUNGGU	01	136	22.67	600
BAJENG	BONTOSUNGGU	02	67	11.17	600
BAJENG	BONTOSUNGGU	03	225	38.53	584
BAJENG	BONTOSUNGGU	04	167	31.87	524
BAJENG	BONTOSUNGGU	05	172	29.35	586
BAJENG	BONTOSUNGGU	06	125	24.46	511
BAJENG	BONTOSUNGGU	07	61	10.93	558
BAJENG	MARADEKAYA	01	185	39.87	464
BAJENG	MARADEKAYA	02	110	28.21	390
BAJENG	MARADEKAYA	03	274	45.67	600
BAJENG	MARADEKAYA	04	130	27.84	467
BAJENG	MARADEKAYA	05	201	38.00	529
BAJENG	MARADEKAYA	06	180	30.00	600
BAJENG	MARADEKAYA	07	301	50.17	600
BAJENG	PANCIRO	01	61	11.32	539

BAJENG	PANCIRO	02	76	13.19	576
BAJENG	PANCIRO	03	194	40.17	483
BAJENG	PANCIRO	04	58	13.43	432
BAJENG	PANCIRO	05	98	17.22	569
BAJENG	PANCIRO	06	174	37.18	468
BAJENG	PANCIRO	07	108	18.78	575
TOMPOBULLU	MALAKAJI	01	157	60.15	261
TOMPOBULLU	MALAKAJI	02	197	47.02	419
TOMPOBULLU	MALAKAJI	03	259	60.80	426
TOMPOBULLU	MALAKAJI	04	330	62.98	524
TOMPOBULLU	MALAKAJI	05	219	54.48	402
TOMPOBULLU	MALAKAJI	06	182	69.20	263
TOMPOBULLU	MALAKAJI	07	443	80.40	551
TOMPOBULLU	MALAKAJI	08	119	74.84	159
TOMPOBULLU	RAPPOLEMBA	01	185	75.51	245
TOMPOBULLU	RAPPOLEMBA	02	206	83.40	247
TOMPOBULLU	RAPPOLEMBA	03	254	88.50	287
TOMPOBULLU	RAPPOLEMBA	04	350	81.59	429
TOMPOBULLU	RAPPOLEMBA	05	212	75.71	280
TOMPOBULLU	RAPPOLEMBA	06	136	59.39	229
TOMPOBULLU	RAPPOLEMBA	07	175	66.29	264
TOMPOBULLU	RAPPOLEMBA	08	256	74.20	345
TOMPOBULLU	RAPPOLEMBA	09	171	61.73	277
TOMPOBULLU	RAPPOLEMBA	10	273	56.64	482
TOMPOBULLU	RAPPOLEMBA	11	134	54.25	247
TOMPOBULLU	RAPPOLEMBA	12	274	59.18	463
TINGGIMONCONG	MALINO	01	132	25.43	519
TINGGIMONCONG	MALINO	02	67	17.82	376
TINGGIMONCONG	MALINO	03	46	11.19	411
TINGGIMONCONG	MALINO	04	97	26.29	369
TINGGIMONCONG	MALINO	05	41	15.59	263
TINGGIMONCONG	MALINO	06	59	19.09	309
TINGGIMONCONG	MALINO	07	157	29.68	529
TINGGIMONCONG	MALINO	08	146	27.14	538
TINGGIMONCONG	MALINO	09	121	27.50	440
TINGGIMONCONG	MALINO	10	250	60.68	412
TINGGIMONCONG	MALINO	11	194	56.07	346
PARANGLOE	BARISALO	01	63	22.66	278
PARANGLOE	BARISALO	02	26	8.52	305
PARANGLOE	BARISALO	03	68	21.73	313
PARANGLOE	BARISALO	04	73	25.26	289
PARANGLOE	BARISALO	05	140	38.46	364
PARANGLOE	BARISALO	06	56	14.78	379
BONTOMARANNU	ROMANGLOMPOA	01	259	46.09	562

BONTOMARANNU	ROMANGLOMPOA	02	228	40.14	568
BONTOMARANNU	ROMANGLOMPOA	03	277	49.55	559
BONTOMARANNU	ROMANGLOMPOA	04	289	50.35	574
BONTOMARANNU	ROMANGLOMPOA	05	274	48.15	569
BONTOMARANNU	ROMANGLOMPOA	06	254	42.55	597
PALLANGGA	TETEBATU	01	35	6.81	514
PALLANGGA	TETEBATU	02	76	12.75	596
PALLANGGA	TETEBATU	03	8	1.36	588
PALLANGGA	TETEBATU	04	17	3.37	504
PALLANGGA	TETEBATU	05	21	3.80	553
PALLANGGA	TETEBATU	06	44	7.67	574
PALLANGGA	BONTOALA	01	84	14.36	585
PALLANGGA	BONTOALA	02	96	16.03	599
PALLANGGA	BONTOALA	03	94	21.03	447
PALLANGGA	BONTOALA	04	84	14.87	565
PALLANGGA	BONTOALA	05	124	28.44	436
PALLANGGA	BONTOALA	07	31	5.34	580
PALLANGGA	BONTOALA	08	38	7.36	516
PALLANGGA	BONTOALA	09	56	9.46	592
PALLANGGA	BONTOALA	10	194	33.45	580
PALLANGGA	BONTOALA	11	56	14.58	384
PALLANGGA	BONTOALA	12	76	18.05	421
PALLANGGA	BONTOALA	13	74	12.94	572
PALLANGGA	BONTOALA	14	38	8.15	466
PALLANGGA	BONTOALA	15	108	36.73	294
PALLANGGA	BONTOALA	16	110	18.52	594
PALLANGGA	BONTOALA	17	93	15.82	588
PALLANGGA	BONTOALA	18	81	16.20	500
PALLANGGA	BONTOALA	19	15	3.63	413
PALLANGGA	BONTOALA	20	49	10.91	449
PALLANGGA	BONTOALA	21	34	7.30	466
PALLANGGA	BONTOALA	22	31	6.60	470
PALLANGGA	BONTOALA	23	36	7.71	467
SOMBA OPU	SUNGGUMINASA	01	106	17.76	597
SOMBA OPU	SUNGGUMINASA	02	7	1.38	508
SOMBA OPU	SUNGGUMINASA	04	14	3.10	451
SOMBA OPU	SUNGGUMINASA	05	3	0.55	546
SOMBA OPU	SUNGGUMINASA	06	14	2.46	569
SOMBA OPU	SUNGGUMINASA	07	17	2.83	600
SOMBA OPU	SUNGGUMINASA	08	15	2.50	600
SOMBA OPU	SUNGGUMINASA	09	43	7.17	600
SOMBA OPU	BONTO-BONTOA	01	70	12.68	552
SOMBA OPU	BONTO-BONTOA	02	82	15.10	543
SOMBA OPU	BONTO-BONTOA	03	82	15.24	538

SOMBA OPU	BONTO-BONTOA	04	65	10.96	593
SOMBA OPU	BONTO-BONTOA	05	51	9.12	559
SOMBA OPU	BONTO-BONTOA	06	52	10.44	498
SOMBA OPU	BONTO-BONTOA	07	30	5.88	510
SOMBA OPU	BONTO-BONTOA	08	30	5.09	589
SOMBA OPU	BONTO-BONTOA	09	30	5.15	582
SOMBA OPU	BONTO-BONTOA	10	18	3.00	600
SOMBA OPU	BONTO-BONTOA	11	86	17.06	504
SOMBA OPU	BONTO-BONTOA	12	36	7.79	462
SOMBA OPU	BONTO-BONTOA	13	90	18.04	499
SOMBA OPU	BONTO-BONTOA	14	124	24.55	505
SOMBA OPU	PACCINONGANG	01	72	13.85	520
SOMBA OPU	PACCINONGANG	02	79	12.72	621
SOMBA OPU	PACCINONGANG	03	128	26.07	491
SOMBA OPU	PACCINONGANG	04	74	14.26	519
SOMBA OPU	PACCINONGANG	05	76	17.43	436
SOMBA OPU	PACCINONGANG	06	34	5.62	605
SOMBA OPU	PACCINONGANG	07	13	2.22	585
SOMBA OPU	PACCINONGANG	09	38	6.46	588
SOMBA OPU	PACCINONGANG	10	35	9.19	381
SOMBA OPU	PACCINONGANG	11	27	4.51	599
SOMBA OPU	PACCINONGANG	12	40	6.68	599
SOMBA OPU	PACCINONGANG	13	15	2.98	503
SOMBA OPU	PACCINONGANG	14	40	7.77	515
SOMBA OPU	PACCINONGANG	17	36	6.75	533
SOMBA OPU	PACCINONGANG	18	33	7.71	428
SOMBA OPU	PACCINONGANG	19	29	5.87	494
SOMBA OPU	PACCINONGANG	20	7	1.18	593
SOMBA OPU	PACCINONGANG	22	3	0.58	517
BUNGAYA	SAPAYA	01	201	57.43	350
BUNGAYA	SAPAYA	02	97	78.86	123
BUNGAYA	SAPAYA	03	180	86.12	209
BUNGAYA	SAPAYA	04	236	80.82	292
BUNGAYA	SAPAYA	05	107	39.93	268
BUNGAYA	SAPAYA	06	189	46.10	410
BUNGAYA	SAPAYA	07	188	48.96	384
BUNGAYA	SAPAYA	08	212	49.42	429
TOMBOLOPAO	KANREAPIA	01	140	25.64	546
TOMBOLOPAO	KANREAPIA	02	86	19.82	434
TOMBOLOPAO	KANREAPIA	03	52	17.39	299
TOMBOLOPAO	KANREAPIA	04	44	15.49	284
TOMBOLOPAO	KANREAPIA	05	129	37.61	343
TOMBOLOPAO	KANREAPIA	06	81	25.31	320
TOMBOLOPAO	KANREAPIA	07	82	26.03	315



TOMBOLOPAO	KANREAPIA	08	105	25.49	412
BIRINGBULU	TARING	01	149	52.10	286
BIRINGBULU	TARING	02	336	73.85	455
BIRINGBULU	TARING	03	175	67.57	259
BIRINGBULU	TARING	04	278	63.04	441
BIRINGBULU	TARING	05	169	63.30	267
BIRINGBULU	TARING	06	108	56.54	191
BIRINGBULU	TARING	07	261	56.62	461
BIRINGBULU	TARING	08	166	47.29	351
BIRINGBULU	TARING	09	118	41.26	286
BIRINGBULU	TARING	10	114	53.52	213
BIRINGBULU	TARING	11	16	3.11	515
BIRINGBULU	BERUTALLASA	01	14	3.57	392
BIRINGBULU	BERUTALLASA	02	208	50.98	408
BIRINGBULU	BERUTALLASA	03	368	82.51	446
BIRINGBULU	BERUTALLASA	04	314	98.13	320
BIRINGBULU	BERUTALLASA	05	273	79.36	344
BIRINGBULU	BERUTALLASA	06	407	94.21	432
BIRINGBULU	BERUTALLASA	07	302	79.68	379
BIRINGBULU	BERUTALLASA	08	285	85.33	334
BIRINGBULU	BERUTALLASA	09	270	78.72	343
BIRINGBULU	BERUTALLASA	10	372	94.90	392
BAROMBONG	KANJILO	01	145	26.65	544
BAROMBONG	KANJILO	02	346	63.84	542
BAROMBONG	KANJILO	03	276	52.47	526
BAROMBONG	KANJILO	04	212	36.74	577
BAROMBONG	KANJILO	05	50	8.55	585
BAROMBONG	KANJILO	06	28	4.71	594
BAROMBONG	KANJILO	07	89	15.14	588
BAROMBONG	KANJILO	08	90	15.31	588
PATTALASANG	TIMBUSENG	01	50	10.04	498
PATTALASANG	TIMBUSENG	02	38	7.47	509
PATTALASANG	TIMBUSENG	03	45	9.04	498
PATTALASANG	TIMBUSENG	04	72	16.63	433
PATTALASANG	TIMBUSENG	05	1	0.28	355
PATTALASANG	TIMBUSENG	06	25	7.84	319
MANUJU	PATTALIKKANG	01	14	3.72	376
MANUJU	PATTALIKKANG	02	3	1.38	218
MANUJU	PATTALIKKANG	03	3	1.21	248
MANUJU	PATTALIKKANG	04	10	2.64	379
MANUJU	PATTALIKKANG	05	16	5.42	295
MANUJU	PATTALIKKANG	06	22	10.89	202
MANUJU	PATTALIKKANG	07	7	2.26	310
BONTOLEMPANGANG	BONTOLEMPANGANG	01	188	76.42	246

BONTOLEMPANGANG	BONTOLEMPANGANG	02	235	54.15	434
BONTOLEMPANGANG	BONTOLEMPANGANG	03	345	75.33	458
BONTOLEMPANGANG	BONTOLEMPANGANG	04	219	51.41	426
BONTOLEMPANGANG	BONTOLEMPANGANG	05	134	33.42	401
BONTOLEMPANGANG	PARANGLOMPOA	01	6	1.97	304
BONTOLEMPANGANG	PARANGLOMPOA	02	104	37.14	280
BONTOLEMPANGANG	PARANGLOMPOA	03	25	6.67	375
BONTOLEMPANGANG	PARANGLOMPOA	04	138	46.15	299
BONTOLEMPANGANG	PARANGLOMPOA	06	29	6.99	415
BONTONOMPO SELATAN	SENGKA	01	297	51.12	581
BONTONOMPO SELATAN	SENGKA	02	258	44.41	581
BONTONOMPO SELATAN	SENGKA	03	300	54.15	554
BONTONOMPO SELATAN	SENGKA	04	187	36.38	514
BONTONOMPO SELATAN	SENGKA	05	242	41.44	584
BONTONOMPO SELATAN	SENGKA	06	258	51.81	498
BONTONOMPO SELATAN	SENGKA	07	218	44.49	490
PARIGI	MANIMBAHOI	01	62	20.88	297
PARIGI	MANIMBAHOI	02	76	22.29	341
PARIGI	MANIMBAHOI	03	64	19.51	328
PARIGI	MANIMBAHOI	04	63	23.08	273
PARIGI	MANIMBAHOI	05	93	24.28	383
PARIGI	MANIMBAHOI	06	75	22.80	329
PARIGI	MANIMBAHOI	07	63	23.60	267
			<b>27,638</b>		<b>98,995</b>

Tabel 3  
PEMILIH DI BAWAH UMUR

NO.	URUT DPT KPU	NO_PLH	NAMA	TMP_LHR	TGL_LHR	UMUR	STATUS	J_KL	ALAMAT	TPS	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN
1	588	7306013006930002	AMRAN	BONTOCARADDE	30 06 1993	16 11 23	B	1	BONTOCARADDE; RT 002; RW 003	06	TAMALLAYANG	BONTONOMPO
2	443		DARMI	BONTOCARADDE	06 09 1993	16 9 17	B	2	BONTOCARADDE; RT 002; RW 004	06	TAMALLAYANG	BONTONOMPO
3	444		RENI ANGGARENI	UJUNG PANDANG	06 10 1993	16 8 17	B	2	BONTOCARADDE; RT 002; RW 004	06	TAMALLAYANG	BONTONOMPO
4	23	7306010104660001	SUPRIADI DAENG TOLA	PASSALLANGNGANG	02 04 1998	12 2 21	P	1	RAPPOKALELLENG; RT 001; RW 003	01	TAMALLAYANG	BONTONOMPO
5	475	7306014089800001	JUMRIANI	MAKASSAR	04 08 1998	11 10 19	S	2	GANGGA; RT 002; RW 002	05	TAMALLAYANG	BONTONOMPO
6	549		JULIANA	LIMBUNG	01 07 1993	16 11 22	B	2	BTN. SINAR BOMBONG, BLOK M. 12	07	BONTOSUNGGU	BAJENG
7	504	7306024703940002	IRMA YASARI	TANETEA	07 03 1994	16 3 16	S	2	TANETEA;RW003;RT002	04	BONTOSUNGGU	BAJENG
8	443		ASRUL	MANGNGEBOKI	01 07 1993	16 11 22	B	1	MANGNGEBOKI;RT 001;RT	04	MARADEKAYA	BAJENG
9	481		MEGAWATI	GOWA	01 07 1993	16 11 22	S	2	TAMACINNA; RT 002 RW 003	07	MARADEKAYA	BAJENG
10	482		HASAN BASRI	GOWA	01 07 1993	16 11 22	B	1	TAMACINNA; RT 002 RW 002	07	MARADEKAYA	BAJENG
11	483		M. DG. NYAMPA	GOWA	01 07 1993	16 11 22	B	1	TAMACINNA; RT 002 RW 002	07	MARADEKAYA	BAJENG
12	484		DG. TAJI	GOWA	01 07 1993	16 11 22	S	2	TAMACINNA; RT 002 RW 002	07	MARADEKAYA	BAJENG
13	485		MUSTARI DG TOMPO	GOWA	01 07 1993	16 11 22	S	1	TAMACINNA; RT 002 RW 003	07	MARADEKAYA	BAJENG
14	486		SURIANI	GOWA	01 07 1993	16 11 22	B	2	TAMACINNA; RT 002 RW 003	07	MARADEKAYA	BAJENG
15	487		NURHAYATI	GOWA	01 07 1993	16 11 22	S	2	TAMACINNA; RT 002 RW 003	07	MARADEKAYA	BAJENG
16	488		MARIA	GOWA	01 07 1993	16 11 22	B	2	TAMACINNA;RT 002 RW 003	07	MARADEKAYA	BAJENG
17	600		SUDARMAN	TAMACINNA	13 11 1993	16 7 10	B	1	TAMACINNA; RT 002; RW 001	06	MARADEKAYA	BAJENG
18	592		NURLIA COLLENG	TAMACINNA	12 12 1993	16 6 11	B	2	TAMACINNA; RT 002; RW 001	06	MARADEKAYA	BAJENG
19	429		HASPIAH	MANGNGEBOKI	01 07 1994	15 11 22	S	2	MANGNGEBOKI;RT 002;RW	04	MARADEKAYA	BAJENG
20	431		MUSLIHA	MANGNGEBOKI	01 07 1994	15 11 22	S	2	MANGNGEBOKI;RT 001;RW	04	MARADEKAYA	BAJENG
21	423		DG LINO	TAMACINNA II	02 05 1995	15 1 21	S	2	TAMACINNA II.RT 004;RW 001	05	MARADEKAYA	BAJENG

22	430		NURJANNAH	MANGNGEBOKI	01	07	1995	14	11	22	S	2	MANGNGEBOKI;RT 002;RW	04	MARADEKAYA	BAJENG
23	456		SYAHARIAH DG LONNA	TAMACINNA II	07	07	1995	14	11	16	S	2	TAMACINNA II.RT 002;RW 001	05	MARADEKAYA	BAJENG
24	531		SULPIANI	GOWA	01	07	1993	16	11	22	B	2	BONTO RAMBA	01	PANCIRO	BAJENG
25	565		ANNISA NUR SAHARA. R	MAKASSAR	01	07	1993	16	11	22	B	2	POROS BAROMBONG	05	PANCIRO	BAJENG
26	537		MIRNAWATI	S.MINASA	24	07	1993	16	10	30	B	2	MATTIROBAJI	07	PANCIRO	BAJENG
27	548		MUH. JAIS	U.PANDANG	24	08	1993	16	9	30	B	1	MATTIROBAJI	07	PANCIRO	BAJENG
28	553		DIDIT SETIADI	MT.BAJI	23	09	1993	16	9		B	1	MATTIROBAJI	07	PANCIRO	BAJENG
29	450	S730602010-03450	A N T I	GOWA	04	11	1993	16	7	19	B	2	JL. MAKKARANI, BONTORAMBA	03	PANCIRO	BAJENG
30	547		RIKI HADIR	U.PANDANG	12	12	1993	16	6	11	B	2	MATTIROBAJI	07	PANCIRO	BAJENG
31	538		MUH. FAJRI	S.MINASA	31	12	1993	16	5	23	B	1	MATTIROBAJI	07	PANCIRO	BAJENG
32	464	S730602010-03464	RISMALIKA	PANCIRO	28	08	1994	15	9	26	S	2	JL. MAKKARANI, BONTORAMBA	03	PANCIRO	BAJENG
33	459		PARTI BT. PONO	JAWA	11	12	1994	15	6	12	S	2	BONTORAMBA SELATAN; RT 002; RK 003	02	PANCIRO	BAJENG
34	551	7306030107910381	HASAN YANCU	CAMPAGAYA	01	07	1993	16	11	22	B	1	CAMPAGAYA;RT 005 RW 002	07	MALAKAJI	TOMPOBULLU
35	261	7306030509930001	NURHIDAYAH	MALAKAJI	05	09	1993	16	9	18	B	2	BARUKEKE	01	MALAKAJI	TOMPOBULLU
36	470	7306033012850001	JOHAN	MALAKAJI	0	0	0	125	25	25	S	1	MALAKAJI	04	MALAKAJI	TOMPOBULLU
37	425	7306033520394	TINA	CAMBA	12	03	1994	16	3	11	S	2	BONGKIALLA	12	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
38	443	7306034107650229	BIA	GOWA	07	01	1995	15	5	16	S	2	BONGKIALLA	12	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
39	249	7306044501940002	MARIA VIVI	MALINO	05	01	1994	16	5	18	S	2	JL. BAHARI; RT 003 ; RW 002	05	MALINO	TINGGIMONCONG
40	369	2104047112920032	SABANIA	MALAKAJI	05	05	1994	16	1	18	S	2	KOMP. LAPANGAN TEMBAK; RT 00 ; RW 00	09	MALINO	TINGGIMONCONG
41	370	7306044107940076	NUNI	MALINO	01	07	1994	15	11	22	S	2	BULUSALILI; RT 001; RW 006	09	MALINO	TINGGIMONCONG
42	196		A. NURJANNAH DG. REA	SELAYAR	26	10	1995	14	7	28	S	2	BONTOJAI	03	BARISALO	PARANGLOE
43	520		YOHANES EKA PUTRA H	MAKASSAR	07	11	1993	16	7	16	B	1	KOMP. PKG JL. CEMARA	02	ROMANGLOMPOA	BONTOMARANNU
44	572	7306084908830003	ROSMALANINGSIH	GOWA	09	08	1993	16	10	14	B	2	PEKANGLABBU 001/001	02	TETEBATU	PALLANGGA
45	582	7306072510930004	RANDIANTO	GOWA	25	10	1993	16	7	29	B	1	PEKANGLABBU 001/013	02	TETEBATU	PALLANGGA
46	587	7306070512930002	ILHAM	GOWA	05	12	1993	16	6	18	B	1	PEKANGLABBU 001/016	02	TETEBATU	PALLANGGA
47	92	7306072410730001	ABDUL RAHIM	PATTALASANG GOWA	0	0	0	37	37	37	S	1	BIRING KALORO; RT 001; RW 001	05	TETEBATU	PALLANGGA

48	22	7306074304510001	ISA DG. NGONA	PALANGISENG KAB GOWA	0	0	0				S	2	BIRING KALORO; RT 001; RW 001	05	TETEBATU	PALLANGGA
49	220		ST. HASNAH	PATTUNGGALENGAN	0	0	0				S	2	PEKANGLABBU; RT ; RW	03	TETEBATU	PALLANGGA
50	221	7306070107580050	DG. MORA	KERANKERA MAKASSAR	0	0	0				S	1	BIRING KALORO ; RT 002; RW 002	06	TETEBATU	PALLANGGA
51	61	7306074107930282	SYATIFA	PALADINGAN	01	07	1993	16	11	22	P	2	BTN AURA; RT 006; RW 008	08	BONTOALA	PALLANGGA
52	366		AHMAD NURPRIAHMAD		07	07	1993	16	11	16	B	1	BUMI PALLANGGA MAS C6/8	23	BONTOALA	PALLANGGA
53	514		SALFIA SAU	GOWA	08	07	1993	16	11	15	B	2	LAMBENGI RT 1/RW 2	04	BONTOALA	PALLANGGA
54	498		SYAHRIAH	SINJAI	11	07	1993	16	11	12	B	2	BTN AURA B2/19-20	08	BONTOALA	PALLANGGA
55	309		WIDYA PANDINI		27	07	1993	16	10	27	S	2	BTN TABORONG PERMAI	03	BONTOALA	PALLANGGA
56	166		IRSADI G SAPUTRA	MKS	20	08	1993	16	10	3	S	1	BPM J2/4; RT 008; RW 003	21	BONTOALA	PALLANGGA
57	515		HUSNAENI	MAKASSAR	24	08	1993	16	9	30	B	2	BTN AURA F1/16	08	BONTOALA	PALLANGGA
58	549	7306070309930001	NURHADI		03	09	1993	16	9	20	B	1	BTN BONTO MAJANNANG RT 02/ RW02	13	BONTOALA	PALLANGGA
59	558		RAHMAT ALI	GOWA	14	12	1993	16	6	9	B	1	LAMBENGI RT 1/RW 1	04	BONTOALA	PALLANGGA
60	500	7306072912930002	HASMIRA	GOWA	29	12	1993	16	5	25	B	2	BTN BONTO MAJANNANG RT 02/ RW02	13	BONTOALA	PALLANGGA
61	190		EDI MAKSI	MKS	29	03	1994	16	2	25	S	1	BTN AURA D4-7; RT 001; RW 001	06	BONTOALA	PALLANGGA
62	407	7306072104940004	NURUL FITRIANI	JENEPONTO	21	04	1994	16	2	2	S	1	BTN AURA A2/3; RT 006; RW 001	07	BONTOALA	PALLANGGA
63	331		YUSRAN	S.MINASA	06	06	1994	16		17	S	1	BONTO MAJANNANG; RT ; RW	14	BONTOALA	PALLANGGA
64	74		AMIRULLAH	MANYAMPA	07	08	1994	15	10	16	S	1	MANYAMPA; RT 001; RW 001	16	BONTOALA	PALLANGGA
65	60		NURUL ILMI	SUNGGUMINASA	11	09	1994	15	9	12	S	2	MANYAMPA; RT 001; RW 001	16	BONTOALA	PALLANGGA
66	169	7306074112940003	RISKA	BORONGBULO	01	12	1994	15	6	22	S	2	BORONG BULO; RT 003; RW 002	10	BONTOALA	PALLANGGA
67	35		ROSTINA	MKS	22	02	1995	15	4	1	S	2	BTN NUSA INDAH D3/20; RT 001; RW 002	17	BONTOALA	PALLANGGA
68	225		IYAN ASLIANI	MKS	25	05	1995	15		29	S	1	MANYAMPA; RT 001; RW 001	16	BONTOALA	PALLANGGA
69	34		ISRAENI	KOLAKA	09	07	1995	14	11	14	S	2	BTN AURA K3-6; RT 006; RW 001	08	BONTOALA	PALLANGGA
70	425	7306070605960003	ASWADIYANTI	MAKASSAR	06	05	1996	14	1	17	S	2	BTN KP. KALIMATA 002/003	10	BONTOALA	PALLANGGA
71	75		RAHMAWATI	MANYAMPA	14	11	1997	12	7	9	S	2	MANYAMPA; RT 001; RW 001	16	BONTOALA	PALLANGGA
72	142		M.UMAR	MALINO	27	04	1998	12	1	26	S	1	MANYAMPA; RT 001; RW 001	16	BONTOALA	PALLANGGA
73	216	7306073012520002	M AMIN LESA	KARUMBUWAWO BIMA	30	12	2019	9	6	7	S	1	BTN NUSA INDAM D23 NO 2; RT 002; RW 005	17	BONTOALA	PALLANGGA

74	362	7306070109730005	SULTAN	BENTENG SOMBAOPU	01	09	2019	9	2	8	S	1	MANYAMPA; RT 003; RW 001	16	BONTOALA	PALLANGGA
75	80	7306076508690002	JUMARNI	KLATEN JAWA TENGAH	25	08	2019	9	2	2	S	2	BTN NUSA INDAH DI NO 3; RT 007; RW 002	18	BONTOALA	PALLANGGA
76	181	7306074107870159	NETTI	MONCOBALANGIGOWA	01	07	2019	9		8	B	2	BTN NUSA INDAH DII NO"1/;; RT 007; RW 0	18	BONTOALA	PALLANGGA
77	161	7306072606520001	ABDUL SALAM	BONTOKASSI TAKALAR	26	06	2019	9		3	S	1	BTN NUSA INDAH DI NO 7; RT 007; RW 002	18	BONTOALA	PALLANGGA
78	127	7306071606690004	NAJAMUDDIN DG LEWA	PULAU KODINGARENG	16	06	2019	8	11	23	S	1	BORONGBULO; RT 003; RW 002	10	BONTOALA	PALLANGGA
79	81	7306071306890003	SIGIT HARIYANTO	KLATEN JAWA TENGAH	13	06	2019	8	11	20	B	1	BTN NUSA INDAH DI NO 3; RT 007; RW 002	18	BONTOALA	PALLANGGA
80	79	7306070705660004	TONO MARYONO	KLATEN JAWA TENGAH	07	05	2019	8	10	14	S	1	BTN NUSA INDAH DI NO 3; RT 007; RW 002	18	BONTOALA	PALLANGGA
81	163	7306074405570001	SITTI SAARIYAH	KARUMBUWAWO BIMA	04	05	2019	8	10	11	S	2	BTN NUSA INDAM D23 NO 2; RT 002; RW 005	17	BONTOALA	PALLANGGA
82	346	7306075509550001	MURTINI	SIDOARJO JAWA TIMUR	15	09	2001	8	9	8	S	2	BTM NUSA INDAH BLOK B NO 5; RT 002; RW 0	19	BONTOALA	PALLANGGA
83	214	7306072509890001	MUHAMMAD ICHLAS	SUNGGUMINASA GOWA	25	09	2001	8	8	28	B	1	BTN NUSA INDAH D6 NO 11; RT 003; RW 002	18	BONTOALA	PALLANGGA
84	211	7306076709650001	SANDRA DEAPATI A TAMRIN	BOGOR JAWA BARAT	0	0	0	45	45	45	S	2	3	22	BONTOALA	PALLANGGA
85	551		DIAN EKA NINGSIH	SUNGGUMINASA	09	12	1993	16	6	14	S	2	JL.NURI	06	SUNGGUMINASA	SOMBA OPU
86	475		RUSMAN HIDAYAT	DAYA	27	06	1993	16	11	26	B	2	JL SIRAJUDDIN RANI RT 002 RW 001	02	BONTO-BONTOA	SOMBA OPU
87	464	7306084107370028	PATIMASANG DG LEBONG	BT. NOMPO	01	07	1993	16	11	22	P	2	BTN SEJAHTERA PERMAI F/11 RT 002 RW 005	07	BONTO-BONTOA	SOMBA OPU
88	497		ISLAMIAWATI SYAM	SG MINASA	17	08	1993	16	10	6	B	2	JL. ANDI TONRO RT 002 RW 004	11	BONTO-BONTOA	SOMBA OPU
89	499		JUMRIADI	GOWA	19	09	1993	16	9	4	B	1	JL. ANDI TONRO RT 001 RW 004	11	BONTO-BONTOA	SOMBA OPU
90	496		SAMSIAH	S.MINASA	04	04	1994	16	2	19	S	2	Jl. Agussalim	05	BONTO-BONTOA	SOMBA OPU
91	323		NITA FAHRIA HAKIM	MKS	05	09	1996	13	9	18	S	2	JL. ANDI TONRO NO. 134 RT 002 RW 003	07	BONTO-BONTOA	SOMBA OPU
92	563		YUSNIATI HASYIM	DILLI	26	06	1993	16	11	27	B	2	BTN PAO PAO PERMAI RT 004 RW 007	08	PACCINONGANG	SOMBA OPU
93	510		NURSYAMSI IDRIS	SG MINASA	28	06	1993	16	11	25	B	2	PACCINONGANG RT B RW 008	22	PACCINONGANG	SOMBA OPU
94	505		ISMULYADI ILYAS	SG MINASA	21	08	1993	16	10	2	B	1	PACCINONGANG RT A RW 008	22	PACCINONGANG	SOMBA OPU
95	120	730609	FAISAL IKWAN	CAMBANG	06	08	1993	16	10	17	S	1	CAMBANG; RT ; RW	02	SAPAYA	BUNGAYA
96	429	730612	RUSDI. SP	TUMBU	07	12	1993	16	6	16	S	1	TUMBU; RT 011; RW 025	08	SAPAYA	BUNGAYA
97	406	730609	SUKINA	SAPAYA	12	12	1993	16	6	11	S	2	BONE BARU; RT ; RW	06	SAPAYA	BUNGAYA
98	269		MIRNA	PARANGBODDONG	01	07	1993	16	11	22	S	2	RT I/RW I PARANG BODDONG	07	KANREAPIA	TOMBOLOPAO
99	275		NURLELA	KANREAPIA	13	11	1993	16	7	10	S	2	RT 01/RW 01 KANREAPIA	04	KANREAPIA	TOMBOLOPAO

100	294		ACO BOLE	BONTONA	01	07	1994	15	11	22	S	1	RT 01 RW 02 BONTONA	01	KANREAPIA	TOMBOLOPAO
101	205		RAMLI	GOWA	01	07	1993	16	11	22	B	1	KAMPUNG PARANG RT.003 RW.003	10	TARING	BIRINGBULU
102	206		NARTI	KAMPUNG PARANG	01	07	1993	16	11	22	B	2	KAMPUNG PARANG RT.003 RW.003	10	TARING	BIRINGBULU
103	207		YEMMANG	TARING	01	07	1993	16	11	22	B	1	KAMPUNG PARANG RT.003 RW.003	10	TARING	BIRINGBULU
104	208		YULI	KAMPUNG PARANG	01	07	1993	16	11	22	B	2	KAMPUNG PARANG RT.003 RW.003	10	TARING	BIRINGBULU
105	209		SUKRI	KAMPUNG PARANG	01	07	1993	16	11	22	B	1	KAMPUNG PARANG RT.003 RW.003	10	TARING	BIRINGBULU
106	443		DEDI	BANGKALA	01	07	1993	16	11	22	B	1	BANGKALA; RT 001;RW 001	07	TARING	BIRINGBULU
107	445		CITRA	BANGKALA	01	07	1993	16	11	22	B	2	BANGKALA; RT 001;RW 001	07	TARING	BIRINGBULU
108	446		PUJI	BANGKALA	01	07	1993	16	11	22	B	2	BANGKALA; RT 001;RW 001	07	TARING	BIRINGBULU
109	447		SEHA	BANGKALA	01	07	1993	16	11	22	B	2	BANGKALA; RT 001;RW 001	07	TARING	BIRINGBULU
110	475		ROMBA	PATAUNG	01	07	1993	16	11	22	S	2	BONTO-BONTO; RT 002;RW 002	11	TARING	BIRINGBULU
111	223		SUAIB Y	BULASSI	07	10	1993	16	8	16	S	1	TARING; RT 003;RW 002	03	TARING	BIRINGBULU
112	308	7306	PARDI	BAROCIA	20	07	1993	16	11	3	S	1	BAROCIA; RT 003;RW 003	04	BERUTALLASA	BIRINGBULU
113	313	7306	HASNI	TONGGO	20	07	1993	16	11	3	S	2	BAROCIA; RT 003;RW 003	04	BERUTALLASA	BIRINGBULU
114	126	7306116403330001	HASNI	KARAMASA	26	07	1993	16	10	28	S	2	KARAMASA; RT 002;RW 002	02	BERUTALLASA	BIRINGBULU
115	327		TINTANG	BUNGASUNGGU	30	07	1993	16	10	24	S	2	BUNGASUNGGU	09	BERUTALLASA	BIRINGBULU
116	311	7306	YANNA	BAROCIA	11	08	1993	16	10	12	B	2	BAROCIA; RT 003;RW 003	04	BERUTALLASA	BIRINGBULU
117	223	7306	HUSNI	SANRANGAN	29	08	1994	15	9	25	S	2	SANRANGANG; RT 003;RW 003	03	BERUTALLASA	BIRINGBULU
118	361		ANDIKA		01	07	1993	16	11	22	S	1	KANJILO RT 001 RW 001	08	KANJILO	BAROMBONG
119	504	7306124707930001	DEWI RATNA SARI	GOWA	07	07	1993	16	11	16	S	2	PANDANG JAWAYA	03	KANJILO	BAROMBONG
120	571	7306121	JUMINAH	CILALLANG	16	07	1993	16	11	7	S	2	CILALLANG	04	KANJILO	BAROMBONG
121	318		LITA DG BAU	KANJILO	07	10	1993	16	8	16	S	2	DUSUN KANJILO	08	KANJILO	BAROMBONG
122	541	730612	ANDRA ROBI YUNUS	BANTAENG	11	11	1993	16	7	12	B	1	BONTOMANAI	02	KANJILO	BAROMBONG
123	544		FITRIANI	BARRU	03	05	1994	16	1	20	S	2	KANJILO RT 001 RW 001	08	KANJILO	BAROMBONG
124	496		WAHYUNI AB	TIMBUSENG	29	08	1993	16	9	25	S	2	DUSUN TAMALATE RT 001 RW 002	02	TIMBUSENG	PATTALASANG
125	489		HALIMAH	TIMBUSENG	20	01	1994	16	5	3	S	2	JALAN PESANTREN	03	TIMBUSENG	PATTALASANG
126	380		NURPATI RAHMA	BATAM	01	07	1994	15	11	22	S	2	DUSUN TAMALATE RT 001 RW 001	02	TIMBUSENG	PATTALASANG

127	448		MURNIATI	TIMBUSENG	01	07	1994	15	11	22	S	2	DUSUM TAMALATE TABBUSALAYA RT 001 RW 002	02	TIMBUSENG	PATTALASANG
128	498		ANITA	TIMBUSENG	10	06	1995	15		13	S	2	LOKASI KUBURAN CINA BOLLANGI	03	TIMBUSENG	PATTALASANG
129	40	7306144107890020	NURAENI	LEMOA	28	06	1993	16	11	25	B	2	TOKKA RT 002 RW 002	01	PATTALIKKANG	MANUJU
130	185		LJA	P	01	07	1993	16	11	22	B	2	DUSUN MATTIRO BAJI	06	PATTALIKKANG	MANUJU
131	237		MALLA	LEMOA	01	07	1993	16	11	22	S	2	LEMOA RT 002 RW 001	01	PATTALIKKANG	MANUJU
132	245	730504170880005	AGUS	JE'NE MAEJA	01	07	1993	16	11	22	S	1	TOKKA RT 001 RW 002	01	PATTALIKKANG	MANUJU
133	246		SALAHUDDIN	BISSOLORO	01	07	1993	16	11	22	S	1	TOKKA RT 001 RW 002	01	PATTALIKKANG	MANUJU
134	262		RISNAWATI	TOKKA	01	07	1993	16	11	22	S	2	TOKKA RT 001 RW 001	01	PATTALIKKANG	MANUJU
135	310		MUH. RESA SALAM	BALANG-BALANG	01	07	1993	16	11	22	S	1	LEMOA	01	PATTALIKKANG	MANUJU
136	367		HANIRA	GARESSI	20	12	1993	16	6	3	S	1	LATA RT 003 RW 001	04	PATTALIKKANG	MANUJU
137	213		RAHMAWATI	TOKKA	25	12	1993	16	5	29	B	2	DUSUN LEMOA RT 001 RW 001	01	PATTALIKKANG	MANUJU
138	352		MARDIAH	GOWA	01	07	1993	16	11	22	S	2	BONTOSUNGGU RT 001; RW 001	02	BONTOLEMPANGANG	BONTOLEMPANGANG
139	67	7306090107930222	HERMAN	BARUGAYA	01	07	1993	16	11	22	S	1	BARUGAYA RT 002; RW 004	02	BONTOLEMPANGANG	BONTOLEMPANGANG
140	393		ROSMINI	LEMOA	05	10	1993	16	8	18	B	2	PAUKENG RT 001 RW 002	05	BONTOLEMPANGANG	BONTOLEMPANGANG
141	77	7306090107940155	SUPARDI	GOWA	01	07	1994	15	11	22	S	1	MACCINI BAJI RT 001; RW 002	04	BONTOLEMPANGANG	BONTOLEMPANGANG
142	246		BENNI	BIMA	23	03	1995	15	3		S	1	PARANG PAESU RT 003; RW 002	01	BONTOLEMPANGANG	BONTOLEMPANGANG
143	115	7306156109940001	KURNI	LANTA	21	09	1994	15	9	2	S	2	LANTA;RT 002;RW 001	06	PARANGLOMPOA	BONTOLEMPANGANG
144	280		SURI	BARUA	12	10	1998	11	8	11	S	2	BARUA;RT 002;RW 004	02	PARANGLOMPOA	BONTOLEMPANGANG
145	459	730616002-06461	HAMKA	BIRINGBALANG	01	07	1993	16	11	22	B	1	BIRINGBALANG RT 001 RW 001	06	SENGKA	BONTONOMPO SELATAN
146	462	730616002-06464	HILDAWATI HABO	BIRINGBALANG	01	07	1993	16	11	22	B	2	BIRINGBALANG RT 001 RW 001	06	SENGKA	BONTONOMPO SELATAN
147	466	730616002-06468	NUR IKA	BIRINGBALANG	01	07	1993	16	11	22	B	2	BIRINGBALANG RT 001 RW 001	06	SENGKA	BONTONOMPO SELATAN
148	473	730616002-06475	RISKA KADIR	BIRINGBALANG	01	07	1993	16	11	22	B	2	BIRINGBALANG RT 001 RW 001	06	SENGKA	BONTONOMPO SELATAN
149	476	730616002-04476	ARIS SUNANDAR	CAMBAJAWAYA	01	07	1993	16	11	22	B	1	CAMBAJAWAYA	04	SENGKA	BONTONOMPO SELATAN
150	551	730616002-02551	FITRIANI	ALLU	03	07	1993	16	11	20	B	2	ALLU	02	SENGKA	BONTONOMPO SELATAN
151	550	730616002-03550	MARTINI	BIBORO	03	12	1993	16	6	20	B	2	PALAMBARANG RT 002 RW 002	03	SENGKA	BONTONOMPO SELATAN
152	316	S730617003-03316	HEMMA	PATTIRO	06	07	1993	16	11	17	B	1	BONTOTE'NE RT 001 RW 001	03	MANIMBAHOI	PARIGI



153	309	S730617003-02309	RAHMADANI NOMPO	RAULO	03	10	1993	16	8	20	B	2	LALANGBATAYA RT 003 RW 001	02	MANIMBAHOI	PARIGI
154	161	7306175201950002	PAKMAWATI	LENGKESE	12	01	1995	15	5	11	S	2	BONTO TENE RT 001 RW 002	03	MANIMBAHOI	PARIGI
155	527		ERWIANSYAH	ROMANG LOMPOA	05	07	1993	16	11	18	B	1	ROMANG LOMPOA	05	GENTUNGANG	BAJENG BARAT
156	544		SAKIR	BONTOMATE'NE	06	07	1993	16	11	17	B	1	BONTOMATE'NE	01	GENTUNGANG	BAJENG BARAT
157	563		IRFAN	BONTOA	06	07	1993	16	11	17	B	1	BONTOA	02	GENTUNGANG	BAJENG BARAT
158	532		ISLAMIAH S	KP. PADE'DE	06	08	1993	16	10	17	B	2	KP. PADE'DE	03	GENTUNGANG	BAJENG BARAT
159	543		NURFAIDAH	BORONGJATI	06	08	1993	16	10	17	B	2	BONTOMATE'NE	01	GENTUNGANG	BAJENG BARAT
160	540		SUMIRLANG	KP. PARANG	11	08	1993	16	10	12	B	1	KAMUPUNG PARANG	03	GENTUNGANG	BAJENG BARAT
161	517		NURSADI	GENTUNGANG	12	08	1993	16	10	11	B	1	TUWINI	03	GENTUNGANG	BAJENG BARAT
162	500		KASMAWATI H	TALAKAUWE	01	10	1993	16	8	22	B	2	TALAKAUWE	07	GENTUNGANG	BAJENG BARAT
163	547		SALMAWATI	BONTOMATE'NE	01	10	1993	16	8	22	B	2	BONTOMATE'NE	01	GENTUNGANG	BAJENG BARAT
164	551		SUTRIANI	GENTUNGANG	02	10	1993	16	8	21	B	2	TUWINI	02	GENTUNGANG	BAJENG BARAT
165	528		ANDIS	ROMANG LOMPOA	03	10	1993	16	8	20	B	1	ROMANG LOMPOA	05	GENTUNGANG	BAJENG BARAT
166	495		AGUS KAMIRI	BONTOA	05	10	1993	16	8	18	B	1	BONTOA BORI'SALAMA	07	GENTUNGANG	BAJENG BARAT
167	475		DANIAL RATE	TALAKAUWE	06	10	1993	16	8	17	B	1	TALAKAUWE	07	GENTUNGANG	BAJENG BARAT
168	529		KASRIAH	ROMANG LOMPOA	11	10	1993	16	8	12	B	2	ROMANG LOMPOA	05	GENTUNGANG	BAJENG BARAT
169	521		SRIWINENGSIH	ROMANG LOMPOA	18	10	1993	16	8	5	B	2	ROMANG LOMPOA	05	GENTUNGANG	BAJENG BARAT
170	535		SEMMINARTI	MAKASSAR	25	10	1993	16	7	29	B	2	ROMANG LOMPOA	05	GENTUNGANG	BAJENG BARAT

Bahwa berkenaan dengan NIK Ganda, modus penyebarannya dilakukan oleh Termohon dengan pola penyebaran dalam bentuk Pemilih Ganda dalam TPS yang sama, Pemilih Ganda Lintas TPS dalam Desa / Kelurahan, Pemilih Ganda Lintas Desa/ Kelurahan dalam satu kecamatan dan Pemilih Ganda Lintas Kecamatan. Sebagaimana terurai pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4  
**PEMILIH DENGAN NIK GANDA PADA TPS**

KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	PENGGANDAAN
BONTONOMPO	TAMALLAYANG	05	25
BAJENG	BONTOSUNGGU	02	2
BAJENG	MARADEKAYA	01	1
BAJENG	MARADEKAYA	05	1
BAJENG	MARADEKAYA	06	3
BAJENG	PANCIRO	02	2
TOMPOBULLU	MALAKAJI	01	5
TOMPOBULLU	MALAKAJI	02	3
TOMPOBULLU	MALAKAJI	03	4
TOMPOBULLU	MALAKAJI	04	16
TOMPOBULLU	MALAKAJI	05	1
TOMPOBULLU	MALAKAJI	06	2
TOMPOBULLU	MALAKAJI	07	5
TOMPOBULLU	RAPPOLEMBA	01	7
TOMPOBULLU	RAPPOLEMBA	02	1
TOMPOBULLU	RAPPOLEMBA	03	8
TOMPOBULLU	RAPPOLEMBA	04	5
TOMPOBULLU	RAPPOLEMBA	05	16
TOMPOBULLU	RAPPOLEMBA	06	1
TOMPOBULLU	RAPPOLEMBA	07	3
TOMPOBULLU	RAPPOLEMBA	08	2
TOMPOBULLU	RAPPOLEMBA	09	1
TOMPOBULLU	RAPPOLEMBA	10	13
TOMPOBULLU	RAPPOLEMBA	11	7
TOMPOBULLU	RAPPOLEMBA	12	8
TINGGIMONCONG	MALINO	02	2
TINGGIMONCONG	MALINO	06	1
TINGGIMONCONG	MALINO	07	1
TINGGIMONCONG	MALINO	09	2

TINGGIMONCONG	MALINO	10	1
TINGGIMONCONG	MALINO	11	1
PARANGLOE	BARISALO	02	1
PARANGLOE	BARISALO	03	5
PARANGLOE	BARISALO	04	1
PARANGLOE	BARISALO	05	5
PARANGLOE	BARISALO	06	2
BONTOMARANNU	ROMANGLOMPOA	01	11
BONTOMARANNU	ROMANGLOMPOA	02	4
BONTOMARANNU	ROMANGLOMPOA	03	4
BONTOMARANNU	ROMANGLOMPOA	04	5
BONTOMARANNU	ROMANGLOMPOA	05	3
PALLANGGA	TETEBATU	02	1
PALLANGGA	TETEBATU	04	2
PALLANGGA	BONTOALA	03	1
PALLANGGA	BONTOALA	10	10
PALLANGGA	BONTOALA	13	3
PALLANGGA	BONTOALA	15	14
PALLANGGA	BONTOALA	16	1
PALLANGGA	BONTOALA	21	1
PALLANGGA	BONTOALA	23	3
SOMBA OPU	BONTO-BONTOA	01	2
SOMBA OPU	BONTO-BONTOA	02	1
SOMBA OPU	BONTO-BONTOA	03	2
SOMBA OPU	BONTO-BONTOA	04	2
SOMBA OPU	BONTO-BONTOA	05	2
SOMBA OPU	BONTO-BONTOA	14	1
SOMBA OPU	PACCINONGANG	03	5
SOMBA OPU	PACCINONGANG	05	1
SOMBA OPU	PACCINONGANG	06	2
SOMBA OPU	PACCINONGANG	10	1
TOMBOLOPAO	KANREAPIA	08	12
BIRINGBULU	TARING	02	9
BIRINGBULU	TARING	08	2
BIRINGBULU	TARING	09	2
BIRINGBULU	TARING	11	7
BIRINGBULU	BERUTALLASA	02	105
BIRINGBULU	BERUTALLASA	03	181
BIRINGBULU	BERUTALLASA	04	145
BIRINGBULU	BERUTALLASA	05	40
BIRINGBULU	BERUTALLASA	06	139

BIRINGBULU	BERUTALLASA	07	160
BIRINGBULU	BERUTALLASA	08	5
BIRINGBULU	BERUTALLASA	09	121
BIRINGBULU	BERUTALLASA	10	266
BAROMBONG	KANJILO	02	10
BAROMBONG	KANJILO	03	55
BAROMBONG	KANJILO	04	75
BAROMBONG	KANJILO	05	6
BAROMBONG	KANJILO	07	17
BAROMBONG	KANJILO	08	10
MANUJU	PATTALIKKANG	04	2
MANUJU	PATTALIKKANG	06	3
BONTOLEMPANGANG	BONTOLEMPANGANG	01	2
BONTOLEMPANGANG	BONTOLEMPANGANG	05	3
BONTOLEMPANGANG	PARANGLOMPOA	03	1
BONTOLEMPANGANG	PARANGLOMPOA	04	3
BONTONOMPO SELATAN	SENGKA	03	1
BONTONOMPO SELATAN	SENGKA	06	12
PARIGI	MANIMBAHOI	01	1
PARIGI	MANIMBAHOI	02	4
PARIGI	MANIMBAHOI	03	2
PARIGI	MANIMBAHOI	04	3
PARIGI	MANIMBAHOI	05	1
PARIGI	MANIMBAHOI	06	2
PARIGI	MANIMBAHOI	07	2

2,432

**TABEL 5**  
**NIK GANDA LINTAS KECAMATAN**

KASUS KE-	URUT DPT KPU	NO_PLH	NAMA	TMP_LHR	TGL_LHR	STATUS	J_KL	ALAMAT	TPS	DESA	KCMT
1	226	7306	IPUL	TAMMULOE	21 01 1991	S	L	TAMMULOE; RT 002;RW 002	04	BERUTALLASA	BIRINGBULU
	306	7306	ABD. RAJAB. DG LIRA	CILALLANG	10 07 1957	S	L	CILALLANG RT 003 RW 002	04	KANJILO	BAROMBONG
	307	7306	TAJI DG TARANG	CILALLANG	02 04 1972	S	L	CILALLANG RT 003 RW 001	04	KANJILO	BAROMBONG
	308	7306	BURHAN HAKIM	CILALLANG	13 05 1978	S	L	CILALLANG RT 003 RW 001	04	KANJILO	BAROMBONG
	309	7306	ASRI DG SIGOLLO	CILALLANG	15 05 1978	S	L	CILALLANG RT 003 RW 001	04	KANJILO	BAROMBONG
	310	7306	HANAWIA	PANGKEP	03 03 1976	S	P	CILALLANG RT 003 RW 001	04	KANJILO	BAROMBONG
	311	7306	HASIA DG LU"MU	TAKALAR	01 07 1929	P	P	CILALLANG RT 003 RW 001	04	KANJILO	BAROMBONG
	312	7306	DG NGIMBA	NYAMPAGAYA	01 07 1976	S	L	CILALLANG RT 003 RW 001	04	KANJILO	BAROMBONG
	313	7306	IDRIS DG BATANG	CILALLANG	01 07 1980	B	L	CILALLANG RT 003 RW 001	04	KANJILO	BAROMBONG
	314	7306	MARIANI RAHMAN	CILALLANG	01 07 1978	S	P	CILALLANG RT 003 RW 001	04	KANJILO	BAROMBONG
	315	7306	MAPPA DG LAWA	GOWA	12 02 1965	S	L	CILALLANG RT 003 RW 002	04	KANJILO	BAROMBONG
	316	7306	JUMARIAH DG JINNE	CILALLANG	16 09 1970	S	P	CILALLANG RT 003 RW 002	04	KANJILO	BAROMBONG
	317	7306	RAMLI BIN MAPPA	CILALLANG	17 08 1987	S	L	CILALLANG RT 003 RW 002	04	KANJILO	BAROMBONG
	318	7306	NIRMALA	CILALLANG	01 07 1988	S	P	CILALLANG RT 003 RW 002	04	KANJILO	BAROMBONG
	319	7306	HAMJA BIN SUBU	CILALLANG	01 07 1978	S	L	CILALLANG RT 003 RW 002	04	KANJILO	BAROMBONG
	320	7306	RISNA BT. SAMA	GOWA	01 07 1986	B	P	CILALLANG RT 003 RW 002	04	KANJILO	BAROMBONG
	321	7306	SULHAN BIN RAPI	CILALLANG	01 07 1990	B	L	CILALLANG RT 003 RW 002	04	KANJILO	BAROMBONG
	322	7306	JUMATIAH BT. RANI	CILALLANG	14 06 1976	S	P	CILALLANG RT 003 RW 001	04	KANJILO	BAROMBONG
	323	7306	SUHARNI BT SAMPARA	CILALLANG	18 09 1989	B	P	CILALLANG RT 003 RW 001	04	KANJILO	BAROMBONG
	324	7306	DG MASSE	TANGALLA	26 03 1982	S	L	CILALLANG RT 003 RW 001	04	KANJILO	BAROMBONG
	325	7306	NASRAH BT DAMPU	CILALLANG	25 12 1986	S	P	CILALLANG RT 003 RW 001	04	KANJILO	BAROMBONG
	329	7306	ALIMUDDIN ABBAS	CILALLANG	02 04 1987	S	L	CILALLANG RT 003 RW 001	04	KANJILO	BAROMBONG
	330	7306	RISNA	TANGALLA	31 08 1988	S	P	CILALLANG RT 003 RW 001	04	KANJILO	BAROMBONG
	331	7306	ADI SIKING	CILALLANG	07 02 1988	B	L	CILALLANG RT 003 RW 001	04	KANJILO	BAROMBONG
	332	7306	PAI	PAKABBA	01 07 1986	S	L	CILALLANG RT 003 RW 001	04	KANJILO	BAROMBONG
	333	7306	HAMIN	CILALLANG	16 03 1987	B	L	CILALLANG RT 003 RW 001	04	KANJILO	BAROMBONG
	334	7306	SEKO DG LU"MU	CILALLANG	12 10 1950	S	P	CILALLANG RT 003 RW 001	04	KANJILO	BAROMBONG
	335	7306	SORE B MASSUALLE	CILALLANG	14 10 1988	B	L	CILALLANG RT 003 RW 001	04	KANJILO	BAROMBONG
	336	7306	LULU BIN ARSYAD	CILALLANG	10 07 1990	B	L	CILALLANG RT 003 RW 002	04	KANJILO	BAROMBONG

337	7306				ALI DG SIRUA	CILALLANG	21	05	1956	S	L	CILALLANG RT 003 RW 002	04	KANJILO	BAROMBONG
338	7306				NURLIA DG NANNU	CILALLANG	13	01	1962	S	P	CILALLANG RT 003 RW 002	04	KANJILO	BAROMBONG
339	7306				ASRI DG SESE	CILALLANG	25	04	1982	S	L	CILALLANG RT 003 RW 002	04	KANJILO	BAROMBONG
340	7306				HALIJA BT ALI	CILALLANG	29	06	1986	B	P	CILALLANG RT 003 RW 002	04	KANJILO	BAROMBONG
341	7306				BATI SUNGGU	CILALLANG	27	12	1939	S	P	CILALLANG RT 003 RW 002	04	KANJILO	BAROMBONG
342	7306				HATIJA DG SUGI	CILALLANG	05	08	1965	B	P	CILALLANG RT 003 RW 002	04	KANJILO	BAROMBONG
343	7306				PUDDING DG NARANG	CILALLANG	25	10	1968	S	L	CILALLANG RT 003 RW 002	04	KANJILO	BAROMBONG
344	7306				HANIA DG TAUGI	CILALLANG	18	09	1972	S	P	CILALLANG RT 003 RW 002	04	KANJILO	BAROMBONG
345	7306				DEDI BIN PUDDIN	CILALLANG	07	10	1990	B	L	CILALLANG RT 003 RW 002	04	KANJILO	BAROMBONG
346	7306				CAHYADI DG LIRA	CILALLANG	24	10	1957	S	L	CILALLANG RT 003 RW 002	04	KANJILO	BAROMBONG
347	7306				RAHMAWATI AMMA	CILALLANG	22	08	1976	S	P	CILALLANG RT 003 RW 002	04	KANJILO	BAROMBONG
354	7306				NURBAINUM	PASAMAN	23	08	1971	S	P	CILALLANG RT 003 RW 002	04	KANJILO	BAROMBONG
355	7306				SURIANI B	KAMPUNG BERU	01	07	1991	B	P	CILALLANG RT 003 RW 002	04	KANJILO	BAROMBONG
356	7306				INDARA DG SELE	BAROMBONG	01	07	1978	S	L	CILALLANG RT 003 RW 002	04	KANJILO	BAROMBONG
357	7306				RATNA BT AHMAD	CILALLANG	01	07	1980	S	P	CILALLANG RT 003 RW 002	04	KANJILO	BAROMBONG
358	7306				FITRI BIN RAIS	CILALLANG	25	10	1991	B	P	CILALLANG RT 003 RW 002	04	KANJILO	BAROMBONG
359	7306				HASNI DG SANNANG	BAREMBENG	30	12	1983	S	P	CILALLANG RT 003 RW 002	04	KANJILO	BAROMBONG
360	7306				MITA	MAROS	22	08	1991	S	P	CILALLANG RT 003 RW 002	04	KANJILO	BAROMBONG
361	7306				JUMRIANI	MAKASSAR	09	09	1990	B	P	CILALLANG RT 003 RW 002	04	KANJILO	BAROMBONG
362	7306				HANIATI	GOWA	01	07	1980	B	P	CILALLANG RT 003 RW 002	04	KANJILO	BAROMBONG
363	7306				EDI	GOWA	01	07	1983	B	L	CILALLANG RT 003 RW 002	04	KANJILO	BAROMBONG
364	7306				JAMALUDDIN DG TUJU	CILALLANG	15	08	1964	S	L	CILALLANG RT 003 RW 002	04	KANJILO	BAROMBONG
365	7306				MINA DG TE"NE	MAROS	10	05	1980	S	P	CILALLANG RT 003 RW 002	04	KANJILO	BAROMBONG
366	7306				AHMAD DG TABA	CILALLANG	15	08	1964	S	L	CILALLANG RT 003 RW 002	04	KANJILO	BAROMBONG
367	7306				SAHARI DG LEBANG	SUMANNA	10	03	1964	S	P	CILALLANG RT 003 RW 002	04	KANJILO	BAROMBONG
368	7306				JUMA DG SESE	GOWA	18	12	1970	S	L	CILALLANG RT 003 RW 002	04	KANJILO	BAROMBONG
369	7306				KASIMON	CILALLANG	15	07	1976	S	P	CILALLANG RT 003 RW 002	04	KANJILO	BAROMBONG
370	7306				AGUS	MAKASSAR	17	10	1978	S	L	CILALLANG RT 003 RW 002	04	KANJILO	BAROMBONG
371	7306				AMRIANI	CILALLANG	10	03	1991	B	P	CILALLANG RT 003 RW 002	04	KANJILO	BAROMBONG
372	7306				YANI BT HAMJA	CILALLANG	07	11	1991	B	P	CILALLANG RT 003 RW 002	04	KANJILO	BAROMBONG
373	7306				JUMITA	CILALLANG	01	07	1988	S	P	CILALLANG RT 003 RW 002	04	KANJILO	BAROMBONG
374	7306				HAERUDDIN DG NUNTUNG	CILALLANG	12	02	1968	S	L	CILALLANG RT 003 RW 002	04	KANJILO	BAROMBONG
375	7306				BOLLO DG TAYU	TOMBOLA	10	05	1972	S	P	CILALLANG RT 003 RW 002	04	KANJILO	BAROMBONG
376	7306				BASSE DG NGATI	CILALLANG	11	10	1969	S	P	CILALLANG RT 003 RW 002	04	KANJILO	BAROMBONG
445	7306				BASRI ALDHO	BONTOMANAI	01	12	1990	S	L	DUSUN BONTOMANAI RT 002	02	KANJILO	BAROMBONG
437	7306				DG RANNU	BILAYA	30	12	1956	S	P	BILAYA	05	KANJILO	BAROMBONG

526	7306				DG PAIMAN	JENEPONTO	01	08	1983	S	L	DUSUN BONTOMANAI RT 002	02	KANJILO	BAROMBONG
527	7306				R DG RANNU	JENEPONTO	01	09	1980	S	P	DUSUN BONTOMANAI RT 002	02	KANJILO	BAROMBONG
14	7306				NURLINA DG TE'NE	JENEPONTO	13	04	1987	S	P	DUSUN BONTOMANAI RT 001	03	KANJILO	BAROMBONG
32	7306				GAFFAR	BONTOMANAI	01	07	1991	B	L	DUSUN BONTOMANAI RT 001	03	KANJILO	BAROMBONG
39	7306				JUNAEDA	GOWA	01	07	1991	S	P	DUSUN BONTOMANAI RT 001	03	KANJILO	BAROMBONG
40	7306				ANWAR	GOWA	01	07	1991	S	L	DUSUN BONTOMANAI RT 001	03	KANJILO	BAROMBONG
58	7306				SALAMANG DG RAMPU	BONTOMANAI	01	07	1940	P	P	DUSUN BONTOMANAI RT 001	03	KANJILO	BAROMBONG
63	7306				JAFAR	BONTOMANAI	09	08	1982	S	L	DUSUN BONTOMANAI RT 001	03	KANJILO	BAROMBONG
69	7306				KASMAWATI DG MAYANG	MAKASSAR	01	07	1986	S	P	DUSUN BONTOMANAI RT 001	03	KANJILO	BAROMBONG
79	7306				SUPARMIN	JAWA TENGAH	01	07	1980	S	L	DUSUN BONTOMANAI RT 001	03	KANJILO	BAROMBONG
90	7306				ABD MAJID	MAKASSAR	01	07	1986	S	L	DUSUN BONTOMANAI RT 001	03	KANJILO	BAROMBONG
98	7306				NARMI DG NGASSENG	TAKALAR	01	07	1986	S	P	DUSUN BONTOMANAI RT 001	03	KANJILO	BAROMBONG
102	7306				HARIS LURANG	GOWA"	01	07	1984	S	L	DUSUN BONTOMANAI RT 001	03	KANJILO	BAROMBONG
103	7306				NURNIA DG SAGA	GOWA"	01	07	1985	S	P	DUSUN BONTOMANAI RT 001	03	KANJILO	BAROMBONG
122	7306				KASMA	GOWA	01	07	1988	S	P	DUSUN BONTOMANAI RT 001	03	KANJILO	BAROMBONG
124	7306				SYUKUR DG KALU	GOWA	01	07	1985	S	L	DUSUN BONTOMANAI RT 001	03	KANJILO	BAROMBONG
128	7306				SAFARUDDIN DG MATU	TAKALAR	01	07	1977	S	L	DUSUN BONTOMANAI RT 001	03	KANJILO	BAROMBONG
142	7306				SYAMSIRWAN	JENEPONTO	01	07	1990	B	L	DUSUN BONTOMANAI RT 001	03	KANJILO	BAROMBONG
147	7306				RISKA FARAS AYU	JENEPONTO	01	07	1991	B	P	DUSUN BONTOMANAI RT 001	03	KANJILO	BAROMBONG
149	7306				M. NASIR DG SJAYA	GOWA	01	07	1972	S	L	DUSUN BONTOMANAI RT 001	03	KANJILO	BAROMBONG
161	7306				SUARNI	GOWA	01	07	1990	B	P	DUSUN BONTOMANAI RT 001	03	KANJILO	BAROMBONG
171	7306				FIRMAN	GOWA	01	07	1991	B	L	DUSUN BONTOMANAI RT 001	03	KANJILO	BAROMBONG
174	7306				NURJANNA ABDULLAH	GOWA	01	07	1991	B	P	DUSUN BONTOMANAI RT 001	03	KANJILO	BAROMBONG
181	7306				ANITA	SUNGGUMINASA	01	07	1991	B	P	DUSUN BONTOMANAI RT 001	03	KANJILO	BAROMBONG
186	7306				SUKRIADI	GOWA	01	07	1991	B	L	DUSUN BONTOMANAI RT 001	03	KANJILO	BAROMBONG
189	7306				IRFAN	GOWA	04	07	1989	B	L	DUSUN BONTOMANAI RT 001	03	KANJILO	BAROMBONG
190	7306				JAMALUDDIN	GOWA	01	07	1991	B	L	DUSUN BONTOMANAI RT 001	03	KANJILO	BAROMBONG
198	7306				WAHYUNI	MAKASSAR	01	07	1989	B	P	DUSUN BONTOMANAI RT 001	03	KANJILO	BAROMBONG
209	7306				M. JOHAR KR. NGITUNG	MAROS	01	07	1960	S	L	DUSUN BONTOMANAI RT 001	03	KANJILO	BAROMBONG
210	7306				MARI	MAROS	01	07	1973	S	P	DUSUN BONTOMANAI RT 001	03	KANJILO	BAROMBONG
211	7306				FATMA	MAROS	01	07	1983	B	P	DUSUN BONTOMANAI RT 001	03	KANJILO	BAROMBONG
212	7306				JUMRIAH	MAROS	01	07	1985	B	P	DUSUN BONTOMANAI RT 001	03	KANJILO	BAROMBONG
234	7306				SURIANI. F	BONTOKAPPONG	01	07	1987	S	P	DUSUN BONTOMANAI RT 001	03	KANJILO	BAROMBONG
239	7306				SYAMSUDDIN DG LIMPO	CILAWANG	01	07	1969	S	L	DUSUN BONTOMANAI RT 001	03	KANJILO	BAROMBONG
240	7306				SUTINA DG. SUNGGU	GOWA	05	02	1970	S	P	DUSUN BONTOMANAI RT 001	03	KANJILO	BAROMBONG
275	7306				ABD RAHMAN DG SUTTE	BONTOMANAI	01	07	1961	S	L	DUSUN BONTOMANAI RT 001	03	KANJILO	BAROMBONG

	293	7306					SYAMSIAH DG PATI	BONTONOMPO	01	07	1963	S	P	DUSUN BONTOMANAI RT 001	03	KANJILO	BAROMBONG
	305	7306					FETER KOFI	KUPANG	01	02	1980	B	L	DUSUN BONTOMANAI RT 001	03	KANJILO	BAROMBONG
	306	7306					SERGIUS KOFI	KUPANG	02	02	1982	B	L	DUSUN BONTOMANAI RT 001	03	KANJILO	BAROMBONG
	307	7306					JEFRIANUS KOFI	KUPANG	20	06	1981	B	L	DUSUN BONTOMANAI RT 001	03	KANJILO	BAROMBONG
	308	7306					AGUSTINUS KABA	KUPANG	17	05	1981	B	L	DUSUN BONTOMANAI RT 001	03	KANJILO	BAROMBONG
	309	7306					GERGONIUS	KUPANG	31	12	1978	B	L	DUSUN BONTOMANAI RT 001	03	KANJILO	BAROMBONG
	326	7306					ISNAINI	GOWA	05	05	1981	S	P	DUSUN BONTOMANAI RT 002	03	KANJILO	BAROMBONG
	329	7306					MUHAMMAD DG SES	BONTONOMPO	27	01	1956	S	L	DUSUN BONTOMANAI RT 002	03	KANJILO	BAROMBONG
	330	7306					HJ. HASBIAH DG SUGI	BONTONOMPO	30	05	1963	S	P	DUSUN BONTOMANAI RT 002	03	KANJILO	BAROMBONG
	331	7306					SAHRIANI IDRIS	BONTONOMPO	25	12	1988	B	P	DUSUN BONTOMANAI RT 002	03	KANJILO	BAROMBONG
	337	7306					MUHLIS	BONTOMANAI	09	02	1991	B	L	DUSUN BONTOMANAI RT 002	03	KANJILO	BAROMBONG
	365	7306					HADINA DG TE'NE	BONTOMANAI	05	06	1981	B	P	DUSUN BONTOMANAI RT 002	03	KANJILO	BAROMBONG
	366	7306					NURHAYATI	BONTOMANAI	08	12	1987	B	P	DUSUN BONTOMANAI RT 002	03	KANJILO	BAROMBONG
	371	7306					SYUKUR DG TANGNGA	MAKASSAR	16	06	1984	S	L	DUSUN BONTOMANAI RT 002	03	KANJILO	BAROMBONG
	372	7306					HASMAWATI DG MAMI	MAKASSAR	03	03	1984	S	P	DUSUN BONTOMANAI RT 002	03	KANJILO	BAROMBONG
	375	7306					ARYAD DG JARRE	KACCIA	01	07	1977	S	L	DUSUN BONTOMANAI RT 002	03	KANJILO	BAROMBONG
	376	7306					AMINA DG SUNGGU	BONTOMANAI	01	07	1979	S	P	DUSUN BONTOMANAI RT 002	03	KANJILO	BAROMBONG
	381	7306					PATI DG JINTU	BONTOMANAI	01	07	1948	P	P	DUSUN BONTOMANAI RT 002	03	KANJILO	BAROMBONG
2	194	730604	01	01	01	0001	SAMAD	PALADINGANG	01	01	1961	S	L	BATULAPISI LUAR ; RT 00 ; RW 00	09	MALINO	TINGGIMONCONG
	105	730604	01	01	01	0001	RAMA	PATTIRO	01	01	1961	S	L	BONTO MARANNU RT 002 RW 002	03	MANIMBAHOI	PARIGI
3	296	730604	01	05	01	0001	HERMAN SYAM	MAKASSAR	01	05	1985	B	L	JL ENDANG; RT 00 ; RW 004	06	MALINO	TINGGIMONCONG
	141	730604	01	05	01	0001	ARMAN	RAULO	01	05	1985	B	L	RAULO RT 001 RW 001	01	MANIMBAHOI	PARIGI
4	228	730604	01	07	01	0001	SANJU	PALLANGGA	01	07	1950	S	L	JL. S. HASANUDDIN; RT 004; RW 001	04	MALINO	TINGGIMONCONG
	18	730604	01	07	01	0001	DOLO	GOWA	01	07	1950	S	L	BAROMBONG RT 002 RW 001	07	MANIMBAHOI	PARIGI
5	173	730604	01	07	01	0001	MAHDI PANI	MALINO	01	07	1954	S	L	JL TIBI DG TATA; RT 001; RW 001	02	MALINO	TINGGIMONCONG
	8	730604	01	07	01	0001	UMAR DG SIALA	GOWA	01	07	1954	S	L	BANGKENGKAJANG RT 002 RW 002	04	MANIMBAHOI	PARIGI
6	27	730604	01	07	01	0001	DUDDING	GOWA	01	07	1955	S	L	BAROMBONG RT 002 RW 001	07	MANIMBAHOI	PARIGI
	328	730604	01	07	01	0001	A. SYAFRUDDIN DG LURANG	GANTARANG	01	07	1955	S	L	JL PATTENE; RT 00 ; RW 004	07	MALINO	TINGGIMONCONG
7	200	730604	01	07	01	0001	MINGGU. B	GANTARANG	01	07	1958	S	L	JL TIBI DG TATA; RT 001; RW 001	02	MALINO	TINGGIMONCONG
	16	730604	01	07	01	0001	BELLA	KALOLO	01	07	1958	S	L	BAROMBONG RT 002 RW 001	07	MANIMBAHOI	PARIGI
8	258	730604	01	07	45	0045	JUMASANG	GOWA	01	07	1967	S	L	TASSA"LA RT 002 RW 002	04	MANIMBAHOI	PARIGI
	286	730604	01	07	45	0045	DG. NGERANG	BENTENG TINGGI	01	07	1967	S	L	BENTENG TINGGI; RT 00 ; RW 005	01	MALINO	TINGGIMONCONG
9	166	730604	01	07	01	0001	HARDI	KLATEN	01	07	1986	B	L	JL TIBI DG TATA; RT 001; RW 001	02	MALINO	TINGGIMONCONG
	34	730604	01	07	01	0001	MUH HASRUL ACO	KALOLO	01	07	1986	B	L	BAROMBONG RT 001 RW 002	02	MANIMBAHOI	PARIGI
10	165	730604	01	07	01	0001	PANIJO	KLATEN	01	07	1988	S	L	JL TIBI DG TATA; RT 001; RW 001	02	MALINO	TINGGIMONCONG



	185	730604	01	07	01	0001	HARIANTO	BONTOSUNGGU	06	04	1989	B	L	BONTOSUNGGU RT 002 RW 002	01	MANIMBAHOI	PARIGI
11	128	730604	06	10	01	0001	YASIN	PATTIRO	06	10	1969	S	L	BANGKENGKAJANG RT 001 RW 001	02	MANIMBAHOI	PARIGI
	199	730604	06	10	01	0001	BASRI. BS	MALINO	06	10	1969	S	L	JL TIBI DG TATA; RT 001; RW 001	02	MALINO	TINGGIMONCONG
12	497	730604	09	08	01	0001	NAHYADI	MAKASSAR	09	08	1991	S	L	JL KR PADO; RT 00 ; RW 004	08	MALINO	TINGGIMONCONG
	378	730604	09	08	01	0001	HABIBI	TUMBURIWATA	08	09	1991	B	L	KUNJUNG MAE RT 002 RW 001	05	MANIMBAHOI	PARIGI
13	170	730604	11	04	01	0001	MAHATMA HAFEL, SH	MALINO	11	04	1967	S	L	JL TIBI DG TATA; RT 001; RW 001	02	MALINO	TINGGIMONCONG
	123	730604	11	04	01	0001	RONENG	PATTIRO	11	04	1967	S	L	BONTO MANAI RT 003 RW 001	03	MANIMBAHOI	PARIGI
14	41	730604	12	04	01	0001	ANTO	PATTIRO	12	04	1980	B	L	BONTO MARANNU RT 002 RW 001	03	MANIMBAHOI	PARIGI
	361	730604	12	04	01	0001	YUSRAN	MALINO	12	04	1980	B	L	JL PATTENE; RT 00 ; RW 004	07	MALINO	TINGGIMONCONG
15	292	730604	21	01	01	0001	YAYA KURNIA	BOGOR	21	01	1958	S	L	JL. TIBI DG TATA; RT 00 ; RW 001	02	MALINO	TINGGIMONCONG
	46	730604	21	01	01	0001	HALIM	GOWA	21	01	1958	S	L	BAROMBONG RT 002 RW 001	07	MANIMBAHOI	PARIGI
16	358	730604	41	01	01	0001	NIA	PATTAPANG	01	01	1986	S	P	BATULAPISI; RT 005; RW 001	10	MALINO	TINGGIMONCONG
	46	730604	41	01	01	0001	SYAMSIANA	GOWA	01	01	1986	B	P	BANGKENGKAJANG RT 002 RW 003	04	MANIMBAHOI	PARIGI
17	161	730604	41	07	10	0010	TIJA	BULU TANA	01	07	1927	S	P	JL A MAPPATANGKA; RT 00 ; RW 005	01	MALINO	TINGGIMONCONG
	184	730604	41	07	10	0010	ROSLIA	GOWA	01	07	1964	S	P	BANGKENG KAJANG RT 002 RW 002	04	MANIMBAHOI	PARIGI
18	201	730604	41	07	01	0001	JUMANIAH	MALINO	01	07	1964	S	P	JL TIBI DG TATA; RT 001; RW 001	02	MALINO	TINGGIMONCONG
	11	730604	41	07	01	0001	RIAMA	GOWA	01	07	1964	S	P	KASEMBERANG RT 001 RW 001	07	MANIMBAHOI	PARIGI
19	386	730604	41	07	12	0012	MIDAH	BATULAPISI	01	07	1965	S	P	BATULAPISI DALAM; RT 005; RW 001	10	MALINO	TINGGIMONCONG
	181	730604	41	07	12	0012	GUGI	GOWA	01	07	1965	S	P	TUMBURIWATA RT 001 RW 002	05	MANIMBAHOI	PARIGI
20	7	730604	41	07	01	0001	HARTATI	KALOLO	01	07	1972	S	P	KASOMBERANG RT 001 RW 001	07	MANIMBAHOI	PARIGI
	258	730604	41	07	01	0001	ENANG PURWIYANTI	MALINO	31	07	1972	P	P	JL. BAHARI; RT 00 ; RW 00	05	MALINO	TINGGIMONCONG
	218	730604	41	07	01	0001	MARIATI	MALINO	01	07	1972	P	P	JL. ENDANG MALINO; RT 00 ; RW 002	06	MALINO	TINGGIMONCONG
	221	730604	41	07	01	0001	ROHANI	ASANA	01	07	1972	S	P	JL. WASPADA MALINO; RT 00 ; RW 002	06	MALINO	TINGGIMONCONG
21	280	730604	41	07	01	0001	MINA	TASSALA	01	07	1973	S	P	JL. TASSA"LA; RT 00 ; RW 00	11	MALINO	TINGGIMONCONG
	25	730604	41	07	01	0001	DAHLIA	GOWA	01	07	1973	S	P	BAROMBONG RT 002 RW 001	07	MANIMBAHOI	PARIGI
22	217	730604	42	02	01	0001	MARNI	BATULAPISI	02	02	1979	S	P	BATULAPISI LUAR ; RT 00 ; RW 00	09	MALINO	TINGGIMONCONG
	84	730604	42	02	01	0001	JUMARIAH	GOWA	02	02	1979	S	P	BANGKENG KAJANG RT 002 RW 003	04	MANIMBAHOI	PARIGI
23	233	730604	43	03	01	0001	WILDAYANTI	MALINO	03	03	1991	B	P	JL PARAWANGSA; RT 00 ; RW 00	07	MALINO	TINGGIMONCONG
	205	730604	43	03	01	0001	LINDA	GOWA	01	07	1980	S	P	BANGKENG KAJANG RT 002 RW 001	04	MANIMBAHOI	PARIGI
24	196	730604	54	03	01	0001	NURLIATI (NY. SULTAN)	JENEPONTO	14	03	1965	S	P	JL BAHARI KOMP SECATA A; RT 00 ; RW 00	05	MALINO	TINGGIMONCONG
	15	730604	54	03	01	0001	HJ.HALIMA	GOWA	14	03	1965	S	P	BAROMBONG RT 002 RW 001	07	MANIMBAHOI	PARIGI
25	198	730604	58	03	01	0001	SIDATUN NIKMAH (NY. SYAMSUDDIN)	DEMAK	18	03	1978	S	P	JL BAHARI KOMP SECATA A; RT 00 ; RW 00	05	MALINO	TINGGIMONCONG
	278	730604	58	03	01	0001	SAMINTANG	BANGKENGKAJANG	18	03	1978	S	P	BONTO TE"NE RT 001 RW 001	02	MANIMBAHOI	PARIGI

26	169	730605	31	12	20	0020	LENRENG	KALIMBUNGAN	31	12	1969	S	L	KALIMBUNGAN RW 002	05	PATTALIKKANG	MANUJU
	15	730605	31	12	20	0020	BACO MAJID	BONTOJAI	31	12	1969	S	L	BONTOJAI	03	BARISALO	PARANGLOE
	75	730605	31	12	20	0020	JUMAKKARA	BONTOJAI	31	12	1969	S	L	BONTOJAI	03	BARISALO	PARANGLOE
27	32	730605	71	12	10	0010	DG. CABA	BONTOJAI	31	12	1952	P	P	BONTOJAI	03	BARISALO	PARANGLOE
	101	730605	71	12	10	0010	DERI DAENG	TOKKA	31	12	1952	P	P	TOKKA RT 002 RW 002	01	PATTALIKKANG	MANUJU
28	406	730611					LONCI	BATUMENTENG	18	07	1940	S	P	BATUMENTENG; RT 002;RW 002	06	BERUTALLASA	BIRINGBULU
	267	730611					MALIK	SAPAYA	07	01	1985	S	L	NYULU ; RT 007; RW 033	05	SAPAYA	BUNGAYA
	428	730611					NANANG	TUMBU	31	12	1953	B	P	TUMBU; RT 011; RW 024	08	SAPAYA	BUNGAYA
29	512	730612					ANDRIANI	MAKASSAR	12	06	1992	B	P	BONTOMANAI	03	KANJILO	BAROMBONG
	268	730612					TIKA	SAPAYA	07	01	1988	S	P	NYULU ; RT 007; RW 034	05	SAPAYA	BUNGAYA
	429	730612					RUSDI. SP	TUMBU	07	12	1993	S	L	TUMBU; RT 011; RW 025	08	SAPAYA	BUNGAYA

**TABEL 6**  
**NIK GANDA LINTAS TPS DALAM DESA/KELURAHAN YANG SAMA**

KASUS KE-	URUT DPT KPU	NIK	NAMA	TMP_LHR	TGL_LHR	STATUS	J_KL	ALAMAT	TPS	DESA	KCMT
1	457	1	NUR AZDIANI AZIS	MAKASSAR	10 01 1968	S	1	BTN TAMAN ASRI B1/6; RT 002; RW 002	01	BONTOALA	PALLANGGA
	139	1	VERAWATI	S.MINASA	24 03 1980	S	2	BTN TAMAN ASRI; RT 002; RW 002	02	BONTOALA	PALLANGGA
	359	1	HAJRAH DG. NGINTANG	MAKASSAR	22 09 1971	S	2	BTN ANA" GOWA C3/20	11	BONTOALA	PALLANGGA
2	2	2	ISRAQ	SINJAI	03 07 1985	B	1	BORONG BULU; RT 002; RW 003	10	BONTOALA	PALLANGGA
	100	2	SALMA	BANTAENG	22 11 1981	S	2	ANA" GOWA RT 001/ RW 001	15	BONTOALA	PALLANGGA
3	567	3	NURJANNAH DG. BAU	MAKASSAR	12 02 1969	S	2	TABORONG; RT 002; RW 003	01	BONTOALA	PALLANGGA
	357	3	DG. SAWI	BR BULO	01 07 1942	S	1	BORONG BULO RT 002 RW 003	10	BONTOALA	PALLANGGA
	217	3	NURAENI	MAKASSAR	18 08 1958	S	2	BUMI PALLANGGA MAS D/25	23	BONTOALA	PALLANGGA
4	3	4	NUR SUPRIADI	MKS	01 07 1987	B	2	BORONG BULU; RT 002; RW 003	10	BONTOALA	PALLANGGA
	62	4	NONCI DG. SIKKI	BIKERU	05 10 1953	S	1	ANA" GOWA RT 001/ RW 001	15	BONTOALA	PALLANGGA
	101	4	DRA. NURMALASARI	MAKASSAR	25 12 1960	S	2	ANA" GOWA RT 001/ RW 001	15	BONTOALA	PALLANGGA
	6	4	ZADAL AKBAR	ACCHI	09 07 1987	B	1	BPM D4; RT 001; RW 002	21	BONTOALA	PALLANGGA

5	599	5					NURAENI	GOWA	07	04	1991	B	2	TABORONG; RT 002; RW 002	02	BONTOALA	PALLANGGA
	396	5					WURIANTO	MAKASSAR	05	12	1973	S	1	MANYAMPA, RT 001 / RW 001	16	BONTOALA	PALLANGGA
	413	5					MULIANA DG. KEBO	JENEPONTO	06	12	1959	S	2	MANYAMPA, RT 003 / RW 001	16	BONTOALA	PALLANGGA
	220	5					DEVI FITRIANI	MAKASSAR	28	04	1990	B	2	BUMI PALLANGGA MAS D/25	23	BONTOALA	PALLANGGA
6	155	7					DINI APRIANTI	U.PANDANG	06	06	1982	S	2	TABORONG; RT 003; RW 001	02	BONTOALA	PALLANGGA
	440	7					SOEDARSO. AM	JENEPONTO	10	07	1987	B	1	BUMI PALLANGGA MAS B7/8	23	BONTOALA	PALLANGGA
7	385	7306					GADING	SANRANGAN	16	05	1979	S	1	KARAMASA; RT 002;RW 002	02	BERUTALLASA	BIRINGBULU
	153	7306					BUYUNG	SANRANGANG	05	08	1990	B	1	SANRANGANG; RT 002;RW 002	03	BERUTALLASA	BIRINGBULU
	368	7306					NURMI	KARAMASA	14	02	1972	B	2	SANRANGANG; RT 003;RW 003	03	BERUTALLASA	BIRINGBULU
	230	7306					SOARNI	TAMMULOE	21	05	1947	S	2	TAMMULOE; RT 002;RW 002	04	BERUTALLASA	BIRINGBULU
	527	7306					R DG RANNU	JENEPONTO	01	09	1980	S	2	DUSUN BONTOMANAI RT 002	02	KANJILO	BAROMBONG
	14	7306					NURLINA DG TE"NE	JENEPONTO	13	04	1987	S	2	DUSUN BONTOMANAI RT 001	03	KANJILO	BAROMBONG
	381	7306					PATI DG JINTU	BONTOMANAI	01	07	1948	P	2	DUSUN BONTOMANAI RT 002	03	KANJILO	BAROMBONG
	306	7306					ABD. RAJAB. DG LIRA	CILALLANG	10	07	1957	S	1	CILALLANG RT 003 RW 002	04	KANJILO	BAROMBONG
	376	7306					BASSE DG NGATI	CILALLANG	11	10	1969	S	2	CILALLANG RT 003 RW 002	04	KANJILO	BAROMBONG
	437	7306					DG RANNU	BILAYA	30	12	1956	S	2	BILAYA	05	KANJILO	BAROMBONG
8	332	730601	01	01	68	0006	MANSYUR DG NASSA	KALASE"RENA	01	01	1968	S	1	BONTOCARADDE; RT 002; RW 004	04	TAMALLAYANG	BONTONOMPO
	572	730601	01	01	68	0006	MANSYUR DG NASSA	KALASE"RENA	01	01	1968	S	1	BONTOCARADDE; RT 002; RW 004	06	TAMALLAYANG	BONTONOMPO
9	328	730601	01	07	58	0237	LARIAN DAENG BELLA	BONTOTARATTA	01	07	1958	S	1	BONTOA; RT 002; RW 004	04	TAMALLAYANG	BONTONOMPO
	539	730601	01	07	58	0237	LARIAN DAENG BELLA	BONTOTARATTA	01	07	1958	S	1	BONTOA; RT 002; RW 004	06	TAMALLAYANG	BONTONOMPO
10	529	730601	01	07	90	0329	MUHAMMAD AGUS	JE"NEPONTO	01	07	1990	B	1	RAPPOKALELLENG; RT 002; RW 001	01	TAMALLAYANG	BONTONOMPO
	92	730601	01	07	90	0329	MUHAMMAD AGUS	JE"NEPONTO	01	01	1990	B	1	RAPPOKALELLENG; RT 001; RW 002	02	TAMALLAYANG	BONTONOMPO
11	565	730601	02	03	70	0002	MUH. ARIEF	ALLU	02	03	1970	S	1	ALLU	02	SENGKA	BONTONOMPO SELATAN
	504	730601	02	03	70	0002	MUH ARIEF	ALLU	02	03	1970	S	1	ALLU RT 003 RW 003	03	SENGKA	BONTONOMPO SELATAN
12	125	730601	07	05	89	0001	M TAFBIR	MANONGKOKI	07	05	1989	B	1	RAPPOKALELLENG; RT 002; RW 001	02	TAMALLAYANG	BONTONOMPO
	479	730601	07	05	89	0001	SAHAR	GANGGA	07	05	1989	B	1	GANGGA; RT 002; RW 002	05	TAMALLAYANG	BONTONOMPO
13	338	730601	13	12	69	0001	MUH SAHIR	TAMALLAENG	13	12	1969	S	1	BONTOCARADDE; RT 002; RW 004	04	TAMALLAYANG	BONTONOMPO

	496	730601	13	12	69	0001	MUH SAHIR	TAMALLAENG	13	12	1969	S	1	BONTOCARADDE; RT 002; RW 004	06	TAMALLAYANG	BONTONOMPO
14	329	730601	25	08	86	0001	LIMPO	BONTOCARADDE	25	08	1986	B	1	BONTOA; RT 002; RW 004	04	TAMALLAYANG	BONTONOMPO
	541	730601	25	08	86	0001	LIMPO	BONTOCARADDE	25	08	1986	B	1	BONTOA; RT 002; RW 004	06	TAMALLAYANG	BONTONOMPO
15	324	730601	31	12	44	0001	MANGONDANG DAENG NGALLE	PANNYANGKALANG	31	12	1944	S	1	BONTOA; RT 002; RW 004	04	TAMALLAYANG	BONTONOMPO
	529	730601	31	12	44	0001	MANGONDANG DAENG NGALLE	PANNYANGKALANG	31	12	1944	S	1	BONTOA; RT 002; RW 004	06	TAMALLAYANG	BONTONOMPO
16	569	730601	31	12	67	0012	AMPA DG NGENJENG	ALLU	31	12	1967	S	1	ALLU	02	SENGKA	BONTONOMPO SELATAN
	500	730601	31	12	67	0012	AMPA DAENG NGENJENG	ALLU	31	12	1967	S	1	ALLU RT 004 RW 004	03	SENGKA	BONTONOMPO SELATAN
17	322	730601	41	07	19	0001	M DG SIANG	BORONGTALA	01	07	1919	P	2	BONTOA; RT 002; RW 004	04	TAMALLAYANG	BONTONOMPO
	526	730601	41	07	19	0001	M DG SIANG	BORONGTALA	01	07	1919	P	2	BONTOA; RT 002; RW 004	06	TAMALLAYANG	BONTONOMPO
18	596	730601	41	07	43	0240	TOHARI DAENG PONE. HJ	TAMALLAENG	01	07	1943	B	2	TAMALLAENG; RT 002; RW 002	03	TAMALLAYANG	BONTONOMPO
	403	730601	41	07	43	0240	TOHARI DAENG PONE HJ	TAMALLAENG	01	07	1943	B	2	TAMALLAENG; RT 001; RW 002	06	TAMALLAYANG	BONTONOMPO
19	528	730601	41	07	49	0001	DAENG SANNENG	SEROKANG	01	07	1949	S	2	RAPPOKALELLENG; RT 002; RW 001	01	TAMALLAYANG	BONTONOMPO
	91	730601	41	07	49	0001	DAENG SANNANG	SEROKANG	01	07	1949	S	2	RAPPOKALELLENG; RT 001; RW 002	02	TAMALLAYANG	BONTONOMPO
20	325	730601	41	07	53	0268	MINASA DAENG SUNGGU	MASSALONGKO	01	07	1953	S	2	BONTOA; RT 002; RW 004	04	TAMALLAYANG	BONTONOMPO
	530	730601	41	07	53	0268	MINASA DAENG SUNGGU	MASSALONGKO	01	07	1953	S	2	BONTOA; RT 002; RW 004	06	TAMALLAYANG	BONTONOMPO
21	323	730601	41	07	76	0264	KASMAWATI DAENG MINNE	BONTOCARADDE	01	07	1976	S	2	BONTOA; RT 002; RW 004	04	TAMALLAYANG	BONTONOMPO
	528	730601	41	07	76	0264	KASMAWATI DAENG MINNE	BONTOCARADDE	01	07	1976	S	2	BONTOA; RT 002; RW 004	06	TAMALLAYANG	BONTONOMPO
22	326	730601	41	07	83	0311	SUNNIATI	PANNYANGKALANG	01	07	1983	B	2	BONTOA; RT 002; RW 004	04	TAMALLAYANG	BONTONOMPO
	531	730601	41	07	83	0311	SUNNIATI	PANNYANGKALANG	01	07	1983	B	2	BONTOA; RT 002; RW 004	06	TAMALLAYANG	BONTONOMPO
23	333	730601	45	10	66	0001	MARLINA DG NGIJI	BONTORIKONG	05	10	1966	S	2	BONTOCARADDE; RT 002; RW 004	04	TAMALLAYANG	BONTONOMPO
	573	730601	45	10	66	0001	MARLINA DG NGIJI	BONTORIKONG	05	10	1966	S	2	BONTOCARADDE; RT 002; RW 004	06	TAMALLAYANG	BONTONOMPO
24	341	730601	48	07	78	0001	ERNI SUWANDI	UJUNG PANDANG	08	07	1978	B	2	BONTOCARADDE; RT 002; RW 004	04	TAMALLAYANG	BONTONOMPO
	499	730601	48	07	78	0001	ERNI SUWANDI	UJUNG PANDANG	08	07	1978	B	2	BONTOCARADDE; RT 002; RW 004	06	TAMALLAYANG	BONTONOMPO
25	340	730601	48	10	53	0001	MAEMUNAH	MAKASSAR	08	10	1953	P	2	BONTOCARADDE; RT 002; RW 004	04	TAMALLAYANG	BONTONOMPO
	498	730601	48	10	53	0001	MAEMUNAH	MAKASSAR	08	10	1953	P	2	BONTOCARADDE; RT 002; RW 004	06	TAMALLAYANG	BONTONOMPO
26	339	730601	50	05	80	0004	MEISRIANA	MAKASSAR	10	05	1980	S	2	BONTOCARADDE; RT 002; RW 004	04	TAMALLAYANG	BONTONOMPO
	497	730601	50	05	80	0004	MEISRIANA	MAKASSAR	10	05	1980	S	2	BONTOCARADDE; RT 002; RW 004	06	TAMALLAYANG	BONTONOMPO

27	342	730601	51	02	86	0004	ERVAYANTI SUWANDI	UJUNG PANDANG	11	02	1986	B	2	BONTOCARADDE; RT 002; RW 004	04	TAMALLAYANG	BONTONOMPO
	500	730601	51	02	86	0004	ERVAYANTI SUWANDI	UJUNG PANDANG	11	02	1986	B	2	BONTOCARADDE; RT 002; RW 004	06	TAMALLAYANG	BONTONOMPO
28	346	730601	56	05	74	0001	MARLA	BORONGTALA	16	05	1974	B	2	BONTOCARADDE; RT 002; RW 004	04	TAMALLAYANG	BONTONOMPO
	513	730601	56	05	74	0001	MARLA	BORONGTALA	16	05	1974	B	2	BONTOCARADDE; RT 002; RW 004	06	TAMALLAYANG	BONTONOMPO
29	445	730602	01	07	75	0220	SYARIFUDIN	MAROS	01	07	1975	S	1	PATTINGALLOANG; RT 002; RW 002	01	BONTOSUNGGU	BAJENG
	505	730602	01	07	75	0220	SUDIRMAN DG BALI	PATINGALLOANG	01	07	1975	S	1	PATTINGALLOANG; RT 001; RW 001	05	BONTOSUNGGU	BAJENG
30	333	730602	03	05	62	0002	BAHARUDDIN DG NOMBONG	GOWA	03	05	1962	S	1	KAMPUNG PARANG POROS LIMBUNG; RT ; RW	05	PANCIRO	BAJENG
	321	730602	03	05	62	0002	BAHARUDDIN DG NAMBUNG	GOWA	03	05	1962	S	1	BASO RONRONG; RT ; RW ; RT 003; RW 002	06	PANCIRO	BAJENG
31	175	730602	04	03	49	0001	KAMARUDDIN DG NGAGO	PALLANGGA	04	03	1949	S	1	JL. POROS LIMBUNG - BONTORAMBA; RT 002; RW 001	01	PANCIRO	BAJENG
	138	730602	04	03	49	0001	AMRULLAH DG NGAGO	PALLANGGA	04	03	1949	S	1	BONTORAMBA SELATAN; RT 002; RW 003	02	PANCIRO	BAJENG
32	448	730602	06	09	85	0001	R DG SIGA	BAREMBENG	06	09	1985	B	1	PATTINGALLOANG; RT 002; RW 001	01	BONTOSUNGGU	BAJENG
	146	730602	06	09	85	0001	SYAHRIR	PATTINGALLOANG	06	09	1985	B	1	PATTINGALLOANG; RT 001; RW 003	02	BONTOSUNGGU	BAJENG
33	332	730602	15	07	70	0002	H M SALEH DG NYAU	BARASA	05	01	1970	S	1	BARASA; RT 003; RW 001	05	MARADEKAYA	BAJENG
	181	730602	15	07	70	0002	H. AR. DG RANI	TAMACINNA	15	07	1970	S	1	TAMACINNA; RT 006; RW 002	06	MARADEKAYA	BAJENG
34	282	730602	41	07	75	0225	NAIBA DG NGONA	TAKALAR	01	07	1975	S	2	LABBAKKANG; RT 003; RW 001	01	MARADEKAYA	BAJENG
	224	730602	41	07	75	0225	RASIA DG NGASI	TAMACINNA	01	07	1975	S	2	TAMACINNA; RT 004; RW 001	06	MARADEKAYA	BAJENG
35	241	730602	48	07	69	0001	HASNAH	TAMACINNA	08	07	1969	S	2	TAMACINNA; RT 004; RW 001	06	MARADEKAYA	BAJENG
	32	730602	48	07	69	0001	HASNAH DG TONJI	TAMACINNA	08	07	1983	S	2	TAMACINNA	07	MARADEKAYA	BAJENG
36	360	730602	52	10	65	0004	ARIEF DG SEWA	TAMACINNA	01	07	1982	S	1	TAMACINNA	05	MARADEKAYA	BAJENG
	153	730602	52	10	65	0004	HJ. MARIATI DG JIA	TAMACINNA	12	10	1965	P	2	TAMACINNA; RT 003; RW 001	06	MARADEKAYA	BAJENG
37	495	730602	65	10	40	0001	CELO DG. BAU	PANCIRO	01	07	1952	S	2	JL.MAKKARANI,BONTORAMBA	01	PANCIRO	BAJENG
	442	730602	65	10	40	0001	NURBAYA	BONE	25	12	1991	S	2	DUSUN BONTORAMBA; RT ; RW	07	PANCIRO	BAJENG
38	211	730603	01	01	92		ARIF NASSA	LEMBAYA	01	01	1992	B	1	LARINTANGNGA ; RT ;RW	04	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	193	730603	01	01	92		SARIPUDDIN	MAKASSAR	01	01	1992	B	1	LEMBAYA; RT 002;RW 001	05	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
39	236	730603	01	07	42	0001	SALLANG	RAPPOLEMBA	01	07	1942	S	1	TANETEBOKKI; RT 003;RW 002	09	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	179	730603	01	07	42	0001	MULA	BAJIMINASA	01	07	1942	S	1	BAJI MINASA DUSUN BORITALLASA; RT 004;RW 001	11	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	70	730603	01	07	42	0001	JUMALLA	BERUTALLASA	01	07	1942	S	1	BORITALLASA; RT 001;RW 002	12	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU

40	146	730603	01	07	47	0069	SAMPARA	MALAKAJI	01	07	1947	S	1	MP SUNGGU; RT 002;RW 003	01	MALAKAJI	TOMPOBULLU
	409	730603	01	07	47	0069	SAMPARA	MALAKAJI	01	07	1946	S	1	MP. SUNGGU RT,002;RW003	03	MALAKAJI	TOMPOBULLU
41	107	730603	01	07	56	0054	MUHAMMAD	GOWA	01	07	1956	S	1	MAPPA SUNGGU; RT 02;RW 03	02	MALAKAJI	TOMPOBULLU
	363	730603	01	07	56	0054	H RACHMAN T	MALAKAJI	01	07	1956	S	1	KAMPUNG BERU; RT ;RW	03	MALAKAJI	TOMPOBULLU
42	226	730603	01	07	60	0041	MISI	BARUKEKE	01	07	1960	S	1	BARUKEKE; RT 001;RW 001	01	MALAKAJI	TOMPOBULLU
	131	730603	01	07	60	0041	AZIS D	GOWA	01	07	1960	S	1	MP. SUNGGU; RT 02;RW 04	02	MALAKAJI	TOMPOBULLU
43	198	730603	01	07	63	0152	RATE	GANTINGAN	01	07	1963	S	1	GANTINGAN RT 002 RW 002	01	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	316	730603	01	07	63	0152	SUMAIL	BONGKIALLA	01	07	1963	B	1	BONGKI ALLA DUSUN BORITALLASA; RT 003;RW 001	12	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
44	281	730603	01	07	64	0001	RUMALANG	RAPPOLEMBA	01	07	1964	S	1	BULUPORONG; RT ;RW	08	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	216	730603	01	07	64	0001	SARIF	BORITTALLASA	01	07	1964	P	2	BORITTALLASA	12	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
45	127	730603	01	07	64	0058	KADI	LEMBAYA	01	07	1964	S	1	LARINGTANGA; RT 003;RW 001	04	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	251	730603	01	07	64	0058	JAHO	RAPPOLEMBA	01	07	1964	P	1	TAPPANJENG	07	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
46	82	730603	01	07	66	0070	ABD KADIR	GOWA	01	07	1966	S	1	MP SUNGGU; RT 002;RW 003	02	MALAKAJI	TOMPOBULLU
	339	730603	01	07	66	0070	SAINUDDIN MUSA	MALAKAJI	01	07	1966	S	1	KAMPUNG BERU; RT ;RW	03	MALAKAJI	TOMPOBULLU
47	39	730603	01	07	66	0156	SUBU	GANTINGAN	01	07	1966	S	1	GANTINGA; RT 001;RW 002	01	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	229	730603	01	07	66	0156	KAMMISI	TANETEA	01	07	1966	S	1	TANETEA	02	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
48	224	730603	01	07	68	0098	NURDIN DEPE	GANTINGAN	07	01	1968	S	1	BULOA, RT. 002;RW 001	01	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	263	730603	01	07	68	0098	BAHARUDDIN	RAPPOLEMBA	01	07	1968	S	1	BORONGLEKO; RT 002;RW 002	04	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
49	353	730603	01	07	69	0001	SAMPARA	MALAKAJI	01	07	1969	S	1	KP BERU; RT ;RW	04	MALAKAJI	TOMPOBULLU
	458	730603	01	07	69	0001	SUDIRMAN	CAMPAGAYA	01	07	1969	S	1	CAMPAGAYA; RT ;RW	07	MALAKAJI	TOMPOBULLU
50	27	730603	01	07	70	0083	PUDDIN	BONGKILEMBA	01	07	1970	S	1	BONGKILEMBA; RT 003;RW 002	02	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	268	730603	01	07	70	0083	MISENG	BONGKILEMBA	01	07	1970	S	1	BONGKILEMBA	03	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
51	187	730603	01	07	72	0354	YANTO	GANTINGAN	01	07	1972	S	1	BULOK; RT 001;RW 001	01	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	245	730603	01	07	72	0354	BAKRI	BONGKIALLA	01	07	1972	S	1	BONGKI ALLA DUSUN BORITALLASA; RT 003;RW 001	12	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
52	180	730603	01	07	73	0002	TOMPO	GANTINGAN	01	07	1973	S	1	BULOK; RT 001;RW 001	01	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	236	730603	01	07	73	0002	MALLA S	ULUALLA	01	07	1973	S	1	ULU ALLA DUSUN ALLA; RT 001;RW 002	10	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
53	242	730603	01	07	74	0270	SAING NOMPO	SAMATA	01	07	1974	S	1	SAMATA; RT ;RW	06	MALAKAJI	TOMPOBULLU

	220	730603	01	07	74	0270	SYAMSU	CAMPAGAYA	01	07	1974	S	1	CAMPAGAYA	07	MALAKAJI	TOMPOBULLU
54	89	730603	01	07	75	0154	PUDDIN	RAPPOLEMBA	01	07	1975	S	1	BULUPO'RONG/ RT 003 RW 007	07	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	292	730603	01	07	75	0154	HADING	RAPPOLEMBA	01	07	1975	S	1	KAMPUNG BERU; RT ;RW	08	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
55	211	730603	01	07	75	0171	KAMA	BONKILEMBA	01	07	1975	S	1	BONGKI LEMBA DUSUN BULAN; RT ;RW	03	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	108	730603	01	07	75	0171	SAHARING	RAPPOLEMBA	01	07	1975	B	1	KAMPUNG BERU; RT 004;RW 001	08	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
56	402	730603	01	07	76	0001	WAHYUDDIN FN	MALAKAJI	01	07	1976	S	1	MALAKAJI; RT ;RW	04	MALAKAJI	TOMPOBULLU
	460	730603	01	07	76	0001	SAMODDIN	CAMPAGAYA	01	07	1976	S	1	CAMPAGAYA; RT ;RW	07	MALAKAJI	TOMPOBULLU
57	87	730603	01	07	77	0229	SARING	RAPPOLEMBA	01	07	1977	S	1	DAULU; RT 002;RW 002	06	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	342	730603	01	07	77	0229	SAKING	DAULU	07	01	1977	S	1	DAULU	08	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
58	35	730603	01	07	78	0231	CUDDIN	TANETEA	01	07	1978	S	1	BULOJA; RT 002;RW 002	01	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	231	730603	01	07	78	0231	BAHARUDDIN	TANETEA	01	07	1978	S	1	B. LEMBA	02	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
59	208	730603	01	07	79	0074	RUSLI	BAJIMINASA	01	07	1979	S	1	BAJIMNASA ; RT 004;RW 001	11	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	221	730603	01	07	79	0074	SULUMING	BORITTALLASA	01	07	1979	S	1	BORITTALLASA	12	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
60	202	730603	01	07	79	0152	SAKA	GANTINGAN	07	01	1979	S	1	GANTINGAN RT 001 RW 002	01	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	65	730603	01	07	79	0152	JUMASING	BONGKILEMBA	01	07	1979	B	1	TANETEA DSN BULOJA; RT 002;RW 002	02	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
61	159	730603	01	07	80	0001	KASENG	RAPPOLEMBA	01	07	1980	S	1	TAPPANJENG; RT ;RW	06	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	464	730603	01	07	80	0001	TAJUDDIN B. SESE	PARANGLOMPOA	01	07	1980	S	1	BONTO SUNGGU DUSUN ALLA	10	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
62	241	730603	01	07	80	0121	SALASING.	RAPPOLEMBA	01	07	1987	B	1	TANETEBOKKI; RT 003;RW 002	09	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	467	730603	01	07	80	0121	BURHAN	BT.SUNGGU	01	07	1980	P	1	BONTO SUNGGU DUSUN ALLA	10	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
63	310	730603	01	07	80	0153	AMIRI	RAPPOLEMBA	01	07	1980	S	1	DAULU RT 002 RW 001	08	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	41	730603	01	07	80	0153	SYARIPUDDIN	BONTOSUNGGU	01	07	1980	B	1	BONTOSUNGGU DUSUN ALLA; RT 001;RW 002	10	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
64	281	730603	01	07	80	0301	ABD AZIS	RAPPOLEMBA	01	07	1980	S	1	BORONGLEKO; RT 002;RW 002	04	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	227	730603	01	07	80	0301	SAHIRI	BAJIMINASA	01	07	1980	S	1	BAJIMNASA ; RT 004;RW 001	11	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
65	187	730603	01	07	81		LABBANG	LEMBAYA	12	12	1981	S	1	LARINTANGNGA ; RT ;RW	04	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	184	730603	01	07	81		SUARDI	RAPPOLEMBA	01	07	1987	B	1	LEMBAYA; RT 001;RW 002	05	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
66	166	730603	01	07	81	0002	HAERUDDIN	RAPPOLEMBA	01	07	1981	S	1	TAPPANJENG; RT ;RW	06	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	452	730603	01	07	81	0002	JUMALANG	BONTOSUNGGU	01	07	1981	P	1	BONTO SUNGGU; RT 001;RW 001	10	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU

67	469	730603	01	07	81	0073	KAMMISI	MALAKAJI	01	07	1981	S	1	MALAKAJI	04	MALAKAJI	TOMPOBULLU
	349	730603	01	07	81	0073	JUMA	MALAKAJI	01	07	1981	S	1	DAULU; RT 002;RW 001	05	MALAKAJI	TOMPOBULLU
68	191	730603	01	07	83		YUDA	LEMBAYA	09	03	1983	S	1	LARINTANGNGA ; RT ;RW	04	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	164	730603	01	07	83		SAMSUDDIN	RAPPOLEMBA	01	07	1983	B	1	LEMBAYA; RT 001;RW 002	05	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
69	221	730603	01	07	84	0001	SAPARUDDIN SOHE	BONTOSUNGGU	01	07	1984	S	1	ULU ALLA DUSUN ALLA; RT 002;RW 001	10	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	414	730603	01	07	84	0001	BASRI	BONGKIALLA	01	07	1984	B	1	BONGKI ALLA; RT 003;RW 001	12	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
70	218	730603	01	07	84	0055	SUNU	GANTINGAN	07	01	1984	S	1	BULO, RT. 002;RW 002	01	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	382	730603	01	07	84	0055	JUMANAI	BONGKIALLA	01	07	1984	B	1	RAPPOLEMBA; RT 003;RW 002	12	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
71	322	730603	01	07	84	0115	ANSARI SAHAR	RAPPOLEMBA	01	07	1984	S	1	RAPPO LEMBA; RT 002;RW 002	04	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	218	730603	01	07	84	0115	BELLA	BORITTALLASA	01	07	1984	S	1	BORITTALLASA	12	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
72	223	730603	01	07	85	0075	SAKARI	GANTINGAN	07	01	1985	S	1	BULO, RT. 002;RW 001	01	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	394	730603	01	07	85	0075	ASIS	BONGKIALLA	01	07	1985	B	1	RAPPOLEMBA; RT 003;RW 002	12	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
73	217	730603	01	07	85	0239	USRAN	BONGKILEMBA	01	07	1985	B	1	TANETEA; RT 003;RW 001	02	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	23	730603	01	07	85	0239	JUFRI M	LEMBAYA	01	07	1985	B	1	LARINTANGNGA DUSUN BULO; RT 003;RW 001	04	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
74	220	730603	01	07	85	0240	HASANG	BONGKILEMBA	01	07	1985	B	1	TANETEA; RT 003;RW 001	02	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	30	730603	01	07	85	0240	SAHA	LEMBAYA	01	07	1985	B	1	LARINTANGNGA DUSUN BULO; RT 003;RW 001	04	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
75	386	730603	01	07	86	0089	MUHAMMAD	RAPPOLEMBA	01	07	1986	B	1	BORONGLEKO; RT 002;RW 002	04	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	419	730603	01	07	86	0089	SIRAJUDDIN	BONGKIALLA	01	07	1986	B	1	BONGKI ALLA; RT 003;RW 001	12	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
76	193	730603	01	07	88	0001	AMIRUDDIN	GANTINGAN	01	07	1988	B	1	BULO; RT 001;RW 002	01	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	210	730603	01	07	88	0001	LATIF	MINASA BAJI	01	07	1988	S	1	MINASSABAJI; RT 001;RW 001	06	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	34	730603	01	07	88	0001	MUCHLIS	RAPPOLEMBA	01	07	1988	S	1	BULUPO'RONG/ RT 003 RW 008	07	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
77	211	730603	01	07	89	0096	ANTO	GANTINGAN	07	01	1989	B	1	BIRINGBALANG, RT1;RW01	01	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	356	730603	01	07	89	0096	ARISI	RAPPOLEMBA	01	07	1989	B	1	BORONGLEKO; RT 002;RW 002	04	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
78	390	730603	01	07	89	0101	RAHIM	RAPPOLEMBA	01	07	1989	B	1	BORONG LEKO; RT 002;RW 002	04	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	418	730603	01	07	89	0101	ARIFIN	BONGKIALLA	01	07	1989	B	1	BONGKI ALLA; RT 003;RW 001	12	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
79	273	730603	01	07	89	0130	MACING	KAMPUNG BERU	01	07	1989	B	1	KAMPUNG BERU	03	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	158	730603	01	07	89	0130	HARO	BONTOSUNGGU	01	07	1989	B	1	ULU ALLA DUSUN ALLA; RT 002;RW 001	10	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU



80	246	730603	01	07	90	0056	DIMMAN	RAPPOLEMBA	01	07	1990	B	1	BULUPO'RONG/ RT 003 RW 004	07	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	233	730603	01	07	90	0056	SURARA K	ULUALLA	01	07	1990	B	1	ULU ALLA DUSUN ALLA; RT 001;RW 002	10	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
81	232	730603	01	07	90	0062	MAJAHID	MALAKAJI	01	07	1990	B	1	MALAKAJI; RT 002;RW 001	04	MALAKAJI	TOMPOBULLU
	339	730603	01	07	90	0062	JUMRAN	MALAKAJI	01	07	1990	S	1	DAULU; RT 002;RW 001	05	MALAKAJI	TOMPOBULLU
82	215	730603	01	07	91	0001	YUKAS	GANTINGAN	07	01	1984	S	1	GANTINGAN RT 001 RW 001	01	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	230	730603	01	07	91	0001	RABANAI	TANETEA	01	07	1991	B	1	TANETEA	02	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	302	730603	01	07	91	0001	RAMANG	RAPPOLEMBA	01	07	1991	B	1	SATTU; RT 002;RW 002	08	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	213	730603	01	07	91	0001	ANZAR M	BORITTALLASA	01	07	1991	B	1	BORITTALLASA	12	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
83	421	730603	01	07	91	0173	FAJRIN NASAR	MALAKAJI	01	07	1991	B	1	BALULOE	03	MALAKAJI	TOMPOBULLU
	237	730603	01	07	91	0173	HENDRA	SAMATA	01	07	1991	B	1	SAMATA; RT ;RW	06	MALAKAJI	TOMPOBULLU
84	186	730603	01	07	92		ABD. KARIM	LEMBAYA	10	01	1992	B	1	LARINTANGNGA ; RT ;RW	04	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	206	730603	01	07	92		IRFAN	RAPPOLEMBA	01	03	1992	B	1	LEMBAYA; RT 002;RW 001	05	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
85	229	730603	01	07	92	0001	SAFIUDDIN	GANTINGAN	07	01	1992	B	1	GANTINGAN RT 002 RW 001	01	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	458	730603	01	07	92	0001	SAHARA S	BT.SUNGGU	01	07	1992	B	1	BONTO SUNGGU; RT 001;RW 001	10	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
86	227	730603	01	07	92	0214	JAMALUDDIN	GANTINGAN	07	01	1992	B	1	GANTINGAN RT 002 RW 001	01	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	269	730603	01	07	92	0214	AMIRUDDIN	TANETE BOKKI	01	07	1992	B	1	TANETEBOKKI; RT 003;RW 002	09	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
87	507	730603	01	07	92	0335	AGUS SYAHRUDDIN	MALAKAJI	01	07	1992	B	1	KAMPUNG BERU	04	MALAKAJI	TOMPOBULLU
	550	730603	01	07	92	0335	AMIR GASSING	CAMPAGAYA	01	07	1992	B	1	CAMPAGAYA;RT 005 RW 002	07	MALAKAJI	TOMPOBULLU
88	374	730603	09	06	90	0001	IKHSAN	MALAKAJI	09	06	1990	B	1	KAMPUNG BERRU; RT ;RW	03	MALAKAJI	TOMPOBULLU
	424	730603	09	06	90	0001	MUH. IQBAL S.	MALAKAJI	09	06	1990	B	1	KAMPUNG BERU	04	MALAKAJI	TOMPOBULLU
89	252	730603	30	09	91	0001	RISMAWATI MUHAMMAD	MALAKAJI	30	09	1991	B	2	BARUKEKE	01	MALAKAJI	TOMPOBULLU
	358	730603	30	09	91	0001	ANI	MALAKAJI	30	07	1991	S	2	DAULU	05	MALAKAJI	TOMPOBULLU
90	353	730603	31	12	51	0001	SIRAJUDDIN	MALAKAJI	31	12	1951	S	1	LOJONG; RT ;RW	02	MALAKAJI	TOMPOBULLU
	158	730603	31	12	51	0001	BASO SELE	CAMPAGAYA	31	12	1951	S	1	BARA-BARA PUTE	08	MALAKAJI	TOMPOBULLU
91	185	730603	31	12	54	0001	H. RUGA	MALAKAJI	31	12	1954	S	2	BARUKEKE; RT 001;RW 001	01	MALAKAJI	TOMPOBULLU
	159	730603	31	12	54	0001	HADIAH	CAMPAGAYA	31	12	1954	S	2	BARA-BARA PUTE	08	MALAKAJI	TOMPOBULLU
92	118	730603	31	12	56	0003	SAID.M	MALAKAJI	31	12	1956	S	1	DAULU; RT ;RW	05	MALAKAJI	TOMPOBULLU

	529	730603	31	12	56	0003	KANANG	CAMPAGAYA	31	12	1956	S	2	CAMPAGAYA	07	MALAKAJI	TOMPOBULLU
93	414	730603	31	12	70	0001	BASIRUDDIN, SE	JENEPONTO	31	12	1970	S	1	MALAKAJI	02	MALAKAJI	TOMPOBULLU
	394	730603	31	12	70	0001	JUDDING MADING	MALAKAJI	31	12	1970	B	1	DAULU	05	MALAKAJI	TOMPOBULLU
94	410	730603	31	12	71	0001	MUH. ARSYAD LANI	MALAKAJI	31	12	1971	S	1	LOJONG	02	MALAKAJI	TOMPOBULLU
	348	730603	31	12	71	0001	ARSYAD HS	MALAKAJI	01	07	1975	S	1	KAMPUNG BERU; RT ;RW	03	MALAKAJI	TOMPOBULLU
	465	730603	31	12	71	0001	LEMANG	MALAKAJI	31	12	1971	S	1	MALAKAJI	04	MALAKAJI	TOMPOBULLU
95	410	730603	31	12	75	0001	JABBAR	JENEPONTO	01	07	1948	S	1	KAMPUNGBERU	03	MALAKAJI	TOMPOBULLU
	382	730603	31	12	75	0001	RISNA TAMA	MALAKAJI	31	12	1975	S	2	DAULU	05	MALAKAJI	TOMPOBULLU
	535	730603	31	12	75	0001	MISI S.	CAMPAGAYA	31	12	1975	S	1	CAMPAGAYA	07	MALAKAJI	TOMPOBULLU
96	411	730603	31	12	85	0001	SEHA SAMPARA	DATARA	31	12	1985	S	1	MAPPAKASUNGGU	03	MALAKAJI	TOMPOBULLU
	432	730603	31	12	85	0001	SAYANI S.	MALAKAJI	31	12	1985	S	2	KAMPUNG BERU	04	MALAKAJI	TOMPOBULLU
97	412	730603	31	12	88	0001	JUSNIATI SAMPARA	MALAKAJI	31	12	1988	S	2	MAPPAKASUNGGU	03	MALAKAJI	TOMPOBULLU
	422	730603	31	12	88	0001	LANDI	MALAKAJI	31	12	1988	S	1	KAMPUNG BERU	04	MALAKAJI	TOMPOBULLU
98	423	730603	31	12	89	0001	HANIA	MALAKAJI	31	12	1989	S	2	KAMPUNG BERU	04	MALAKAJI	TOMPOBULLU
	151	730603	31	12	89	0001	RAHMAWATI	CAMPAGAYA	31	12	1989	B	2	BARA-BARA PUTE	08	MALAKAJI	TOMPOBULLU
99	456	730603	31	12	90	0001	IDA S.	MALAKAJI	31	12	1990	B	2	MALAKAJI	04	MALAKAJI	TOMPOBULLU
	359	730603	31	12	90	0001	HASNAWATI LEBANG	MALAKAJI	31	12	1990	S	2	DAULU	05	MALAKAJI	TOMPOBULLU
	153	730603	31	12	90	0001	J U M A	CAMPAGAYA	31	12	1990	B	1	BARA-BARA PUTE	08	MALAKAJI	TOMPOBULLU
100	336	730603	41	07	46	0001	MARIAMA	GOWA	01	07	1946	P	2	MALAKAJI; RT ;RW	02	MALAKAJI	TOMPOBULLU
	378	730603	41	07	46	0001	JUMARIA	MALAKAJI	01	07	1946	S	1	MALAKAJI; RT ;RW	04	MALAKAJI	TOMPOBULLU
101	182	730603	41	07	46	0058	NANNI	CIKORO	01	07	1946	S	2	LOJONG MAPPA SUNGGU; RT 001;RW 001	02	MALAKAJI	TOMPOBULLU
	484	730603	41	07	46	0058	TOKENG	MALAKAJI	01	07	1946	S	2	MALAKAJI	04	MALAKAJI	TOMPOBULLU
102	319	730603	41	07	47	0027	NASIA	RAPPOLEMBA	01	07	1947	S	2	RAPPO LEMBA; RT 002;RW 002	04	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	220	730603	41	07	47	0027	BASSE	ALLA	01	07	1947	S	2	BAJIMNASA ; RT 004;RW 001	11	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
103	4	730603	41	07	49	0020	LIPA	BARUKEKE	01	07	1949	S	2	MALAKAJI; RT 003;RW 001	01	MALAKAJI	TOMPOBULLU
	4	730603	41	07	49	0020	HAFIAH	GOWA	01	07	1969	S	2	KAMPUNG BERU; RT 003;RW 005	03	MALAKAJI	TOMPOBULLU
	4	730603	41	07	49	0020	HALIMAH	LEMOA	13	08	1972	S	2	DAULU; RT 001;RW 002	04	MALAKAJI	TOMPOBULLU

	4	730603	41	07	49	0020	SIHA	CIKORO	21	11	1967	S	2	PAULU; RT 002;RW 002	05	MALAKAJI	TOMPOBULLU
	4	730603	41	07	49	0020	SUSI SUSANTI	CAMPAGAYA	01	07	1990	B	2	SAMATA; RT 001;RW 001	06	MALAKAJI	TOMPOBULLU
	3	730603	41	07	49	0020	SOHO	CAMPAGAYA	01	07	1975	S	2	CAMPAGAYA; RT 003;RW 001	07	MALAKAJI	TOMPOBULLU
	253	730603	41	07	49	0020	JUMASANG	CAMPAGAYA	01	07	1964	S	1	CAMPAGAYA; RT 004;RW 002	07	MALAKAJI	TOMPOBULLU
	1	730603	41	07	49	0020	SUKKU	CAMPAGAYA	01	07	1966	B	1	CAMPAGAYA; RT 005;RW 001	08	MALAKAJI	TOMPOBULLU
104	254	730603	41	07	57	0057	BODDONG	RAPPOLEMBA	01	07	1957	S	2	BORONGLEKO DUSUN LEMBAYA; RT 002;RW 001	04	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	215	730603	41	07	57	0057	KAMBA	BORITTALLASA	01	07	1957	S	2	BORITTALLASA	12	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
105	233	730603	41	07	57	0197	SYAMSI SANUDDIN	TANETEA	01	07	1952	S	2	TANETEA	02	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	101	730603	41	07	57	0197	SABAU	RAPPOLEMBA	01	07	1957	S	2	KAMPUNG BERU; RT 001;RW 001	08	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
106	236	730603	41	07	58	0100	DEPE	RAPPOLEMBA	01	07	1958	P	2	BULUPO"RONG RT 003 RW 001	07	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	56	730603	41	07	58	0100	MASIAH	RAPPOLEMBA	01	07	1958	S	2	DAULU; RT 002;RW 002	08	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
107	353	730603	41	07	65	0116	MARYAM	MALAKAJI	01	07	1965	S	2	KAMPUNG BERU; RT ;RW	03	MALAKAJI	TOMPOBULLU
	361	730603	41	07	65	0116	NORO	MALAKAJI	01	07	1965	S	2	KP BERU; RT ;RW	04	MALAKAJI	TOMPOBULLU
108	39	730603	41	07	71	0107	HAYATI	BONGKILEMBA	01	07	1971	S	2	TANETEA DSN BULO; RT 002;RW 001	02	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	267	730603	41	07	71	0107	C I A	BONGKILEMBA	01	07	1971	S	2	BONGKILEMBA	03	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
109	41	730603	41	07	71	0108	RABIA	BONGKILEMBA	01	07	1971	S	2	TANETEA DSN BULO; RT 002;RW 002	02	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	269	730603	41	07	71	0108	ANTI	BONGKILEMBA	01	07	1971	S	2	BONGKILEMBA	03	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
110	31	730603	41	07	73	0104	MASIA	TANETEA	01	07	1973	S	2	BULO; RT 002;RW 002	01	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	228	730603	41	07	73	0104	CAYA	TANETEA	01	07	1973	S	2	TANETEA	02	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
111	386	730603	41	07	75	0153	HATIJAH RAHMAN	MALAKAJI	01	07	1975	S	2	MAPPAKASUNGGU	03	MALAKAJI	TOMPOBULLU
	372	730603	41	07	75	0153	TANTI AGUSTINA S.	MALAKAJI	01	07	1975	S	2	DAULU	05	MALAKAJI	TOMPOBULLU
112	353	730603	41	07	75	0272	KANANG	RAPPOLEMBA	01	07	1975	B	2	BORONGLEKO; RT 002;RW 001	04	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	205	730603	41	07	75	0272	NIA	BAJIMINASA	01	07	1975	S	2	BAJIMNANA ; RT 004;RW 001	11	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
113	199	730603	41	07	78	0091	ERNA	GANTINGAN	01	07	1978	S	2	GANTINGAN RT 002 RW 002	01	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	250	730603	41	07	78	0091	SUNNIATI	RAPPOLEMBA	01	07	1978	S	2	BORONGLEKO DUSUN LEMBAYA; RT 002;RW 001	04	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
114	165	730603	41	07	80	0001	HANIA	RAPPOLEMBA	01	07	1980	S	2	TAPPANJENG; RT ;RW	06	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	225	730603	41	07	80	0001	NI'MA	BAJIMINASA	01	07	1980	B	2	BAJIMNANA ; RT 004;RW 001	11	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU

115	381	730603	41	07	80	0237	RAHMATIAH	MALAKAJI	01	07	1980	S	2	MALAKAJI; RT ;RW	04	MALAKAJI	TOMPOBULLU
	147	730603	41	07	80	0237	SURIATI	CAMPAGAYA	01	07	1980	S	2	CAMPAGAYA; RT 003;RW 002	06	MALAKAJI	TOMPOBULLU
116	108	730603	41	07	81	0170	MULIATI	MALAKAJI	01	07	1981	P	2	ALLA GALUNG; RT ;RW	06	MALAKAJI	TOMPOBULLU
	214	730603	41	07	81	0170	NANNI	CAMPAGAYA	01	07	1981	B	2	CAMPAGAYA	07	MALAKAJI	TOMPOBULLU
117	192	730603	41	07	82	0196	RINA	GANTINGAN	01	07	1982	B	2	BULO; RT 001;RW 002	01	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	347	730603	41	07	82	0196	ROHANI	BONGKIALLA	01	07	1982	B	2	BONGKI ALLA DUSUN BORITALLASA; RT 003;RW 002	12	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
118	249	730603	41	07	84	0001	SURI J	RAPPOLEMBA	01	07	1984	S	2	TAPPANJENG	07	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	207	730603	41	07	84	0001	SURIANI	RAPPOALA	01	07	1984	S	2	BAJIMNASA ; RT 004;RW 001	11	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	428	730603	41	07	84	0001	IDA	BONGKIALLA	01	07	1984	S	2	BONGKIALLA	12	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
119	127	730603	41	07	84	0075	SAU	MINASA BAJI	01	07	1984	B	2	BULUPORONG; RT 001;RW 001	06	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	242	730603	41	07	84	0075	ROMIATI	KANCINGKANANG	07	01	1984	B	2	BAJIMNASA RT 001;RW 001	11	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
120	229	730603	41	07	84	0338	MARDIANA	BAJIMINASA	01	07	1984	S	2	BAJIMNASA ; RT 004;RW 001	11	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	200	730603	41	07	84	0338	SAMSINAR	BERUTALLASA	01	07	1984	B	2	BORITALLASA; RT ;RW	12	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
121	120	730603	41	07	85	0183	MARLINA	BARUKEKE	01	07	1985	B	2	BARUKEKE; RT 04;RW 08	01	MALAKAJI	TOMPOBULLU
	526	730603	41	07	85	0183	SURI J.	CAMPAGAYA	01	07	1985	S	2	CAMPAGAYA	07	MALAKAJI	TOMPOBULLU
122	89	730603	41	07	85	0328	SALMA	RAPPOLEMBA	01	07	1985	S	2	TANE TEBOKKI DUSUN ALLA; RT 003;RW 001	09	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	197	730603	41	07	85	0328	RAHMATIAH	BERUTALLASA	01	07	1985	B	2	BORITALLASA; RT ;RW	12	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
123	255	730603	41	07	86	0001	LINA M	RAPPOLEMBA	01	07	1958	P	2	TANETEBOKKI; RT 002;RW 003	09	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	201	730603	41	07	86	0001	RADI	BERUTALLASA	10	07	1986	S	2	TANGNGALLA ; RT 003;RW 001	11	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
124	29	730603	41	07	86	0060	MAISA	TANETEA	01	07	1986	B	2	GANTINGA; RT 001;RW 001	01	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	271	730603	41	07	86	0060	RAHANI	KAMPUNG BERU	01	07	1986	B	2	KAMPUNG BERU	03	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
125	64	730603	41	07	86	0164	JUMANIA	BONGKILEMBA	01	07	1986	B	2	TANETEA DSN BULO; RT 002;RW 002	02	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	249	730603	41	07	86	0164	MAMMA	BONGKILEMBA	01	07	1986	B	2	BONGKILEMBA	03	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	395	730603	41	07	86	0164	MARNI	PATAUNG	01	07	1986	S	2	BORONGLEKO RT 001 RW 002	04	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
126	24	730603	41	07	87	0070	NURHIDAYAH	LEMBAYA	01	07	1987	B	2	GANTINGA; RT 001;RW 001	01	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	225	730603	41	07	87	0070	JUIMASI	TANETEA	01	07	1987	S	1	TANETEA	02	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
127	86	730603	41	07	87	0142	HASIA	RAPPOLEMBA	01	07	1987	S	2	DAULU; RT 002;RW 002	06	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU

	341	730603	41	07	87	0142	HASIA	DAULU	07	01	1987	S	2	DAULU	08	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
128	210	730603	41	07	87	0155	SYAMSAIAH	BONGKILEMBA	01	07	1987	B	2	BONGKILEMBA DUSUN BULO; RT 002;RW 002	02	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	65	730603	41	07	87	0155	JUMARIA	RAPPOLEMBA	01	07	1987	B	2	DAULU; RT 002;RW 002	08	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
129	398	730603	41	07	87	0183	KAMARIAH	MALAKAJI	01	07	1987	S	2	MALAKAJI; RT ;RW	04	MALAKAJI	TOMPOBULLU
	206	730603	41	07	87	0183	SANTI	DAULU	01	07	1987	B	2	DAULU; RT 002;RW 002	05	MALAKAJI	TOMPOBULLU
130	314	730603	41	07	88	0001	SANIATI	RAPPOLEMBA	01	07	1988	B	2	DAULU RT 002 RW 001	08	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	150	730603	41	07	88	0001	TATI HAMMU	RAPPOLEMBA	01	07	1988	B	2	TANETEBOKKI; RT 003;RW 004	09	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
131	228	730603	41	07	88	0176	KAMARIA	BONKILEMBA	01	07	1988	B	2	BONGKI LEMBA DUSUN BULAN; RT ;RW	03	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	230	730603	41	07	88	0176	MARI	RAPPOLEMBA	01	07	1988	B	2	BULUPORONG; RT 002;RW 002	08	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
132	232	730603	41	07	89	0001	SURIANTIS.	BULO	07	01	1989	S	2	GANTINGAN RT 001 RW 001	01	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	276	730603	41	07	89	0001	NANI	KAMPUNG BERU	01	07	1989	B	2	KAMPUNG BERU	03	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	321	730603	41	07	89	0001	SABA	RAPPOLEMBA	01	07	1989	B	2	KAMPUNGBERU RT04;RW002	08	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
133	274	730603	41	07	89	0074	HAYA	KAMPUNG BERU	01	07	1989	B	2	KAMPUNG BERU	03	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	163	730603	41	07	89	0074	SURIANI	LEMBAYA	01	07	1989	B	2	LEMBAYA; RT 003;RW 001	04	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
134	210	730603	41	07	89	0218	R IA	GANTINGAN	07	01	1989	B	2	BIRINGBALANG, RT1;RW01	01	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	389	730603	41	07	89	0218	SUMARLIN	BONGKIALLA	01	07	1989	B	2	RAPPOLEMBA; RT 003;RW 002	12	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
135	201	730603	41	07	89	0220	HASNI	GANTINGAN	07	01	1989	S	2	GANTINGAN RT 001 RW 001	01	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	306	730603	41	07	89	0220	SALMA	BONGKIALLA	01	07	1989	B	2	BONGKI ALLA DUSUN BORITALLASA; RT 003;RW 001	12	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
136	193	730603	41	07	90		MARLINA	LEMBAYA	10	03	1990	B	2	LARINTANGGA ; RT ;RW	04	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	219	730603	41	07	90		NURSAMSI	RAPPOLEMBA	01	07	1990	B	2	LEMBAYA	05	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
137	260	730603	41	07	90	0001	SAYANI	KAMPUNG BERU	01	07	1990	S	2	KAMPUNG BERU	03	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	42	730603	41	07	90	0001	SANSI	RAPPOLEMBA	01	07	1990	B	2	DAULU RT 002 RW 002	08	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	223	730603	41	07	90	0001	JUMRIANI	ULUALLA	01	07	1990	B	2	ULU ALLA DUSUN ALLA; RT 001;RW 002	10	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
138	275	730603	41	07	90	0077	BOLLO	KAMPUNG BERU	01	07	1990	B	2	KAMPUNG BERU	03	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	150	730603	41	07	90	0077	MULIATI	BERUTALLASA	01	07	1990	B	2	BORITALLASA DUSUN BORITALLASA; RT 001;RW 002	12	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
139	203	730603	41	07	90	0194	SARIYAMA	BERUTALLASA	01	07	1990	B	2	BAJIMNASA ; RT 002;RW 002	11	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	376	730603	41	07	90	0194	RIMANG	BONGKIALLA	01	07	1990	B	2	RAPPOLEMBA; RT 003;RW 002	12	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU

140	272	730603	41	07	90	0280	KAMASIA	KAMPUNG BERU	01	07	1990	B	2	KAMPUNG BERU	03	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	9	730603	41	07	90	0280	RAPIPA	BERUTALLASA	01	07	1990	B	2	BORITALLASA; RT 001;RW 001	12	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
141	197	730603	41	07	91	0001	JIRA	GANTINGAN	01	07	1991	B	2	GANTINGAN RT 001 RW 001	01	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	307	730603	41	07	91	0001	TUNI	RAPPOLEMBA	01	07	1991	B	2	SATTU; RT 002;RW 002	08	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	455	730603	41	07	91	0001	MIA USMAN	BONTOSUNGGU	01	07	1991	B	2	BONTO SUNGGU; RT 001;RW 001	10	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	155	730603	41	07	91	0001	SURIANI JUMAI	BERUTALLASA	01	07	1991	B	2	BAJIMINASA DUSUN BORITALLASA; RT 004;RW 002	11	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	210	730603	41	07	91	0001	KASMA	BORITTALLASA	01	07	1991	B	2	BORITTALLASA	12	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
142	225	730603	41	07	92	0001	ROSTINA	GANTINGAN	07	01	1992	B	2	BULO, RT. 002;RW 001	01	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	460	730603	41	07	92	0001	ACCE HS	BT.SUNGGU	01	07	1992	B	2	BONTO SUNGGU; RT 001;RW 001	10	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	255	730603	41	07	92	0001	MULI M	ULUALLA	01	07	1992	S	2	ULU ALLA DUSUN ALLA; RT 002;RW 002	10	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	239	730603	41	07	92	0001	ENANG	BAJIMINASA	07	01	1992	B	2	BAJIMINASA RT 004;RW 001	11	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	435	730603	41	07	92	0001	HASBIA	BONGKIALLA	07	01	1992	B	2	RAPPOLEMBA, 002 / 003	12	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
143	231	730603	41	07	92	0002	INTAN R.	GANTINGAN	07	01	1992	B	2	GANTINGAN RT 001 RW 001	01	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	243	730603	41	07	92	0002	TUNA	ULUALLA	01	07	1992	S	2	ULU ALLA DUSUN ALLA; RT 001;RW 002	10	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
144	204	730603	41	07	92	0229	CAMMA	GANTINGAN	07	01	1992	B	2	BIRINGBALANG, RT1;RW01	01	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	457	730603	41	07	92	0229	JUMRIANI	BORITTALLASA	07	01	1992	B	2	BORITTALLASA, 001 / 001	12	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
145	274	730603	71	12	72	0001	ZOHARI	LEMBAYA	31	12	1972	S	2	BONTOBONTOA	05	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
	2	730603	71	12	72	0001	JOHARI	RAPPOLEMBA	31	12	1972	S	2	MINASA BAJI; RT 001;RW 001	06	RAPPOLEMBA	TOMPOBULLU
146	244	730604	01	01	46	0001	ROWA	LOMBASANG	01	01	1946	S	1	JL. S. HASANUDDIN; RT 003; RW 001	03	MALINO	TINGGIMONCONG
	215	730604	01	01	46	0001	MULA BASIR	MALINO	01	01	1946	S	1	JL SAMIUN NO 8; RT 00 ; RW 00	05	MALINO	TINGGIMONCONG
147	172	730604	01	07	48	0010	LELO"	GOWA	01	07	1948	S	1	BANGKENG KAJANG RT 002 RW 002	04	MANIMBAHOI	PARIGI
	162	730604	01	07	48	0010	NEMPO	GOWA	01	07	1948	S	1	LANGORANG RT 003 RW 001	06	MANIMBAHOI	PARIGI
148	100	730604	01	07	55	0102	ABD SALAM ROLA	LIMBUNG	01	07	1955	S	1	MALINO KOTA; RT 00 ; RW 00	07	MALINO	TINGGIMONCONG
	350	730604	01	07	55	0102	NUSLI	BATULAPISI	01	07	1955	S	1	BATULAPISI; RT 002; RW 001	10	MALINO	TINGGIMONCONG
149	41	730604	01	07	58	0039	SOMPO	TUMBURWATA	07	07	1958	S	1	BANGKENGKAJANG RT 002 RW 002	04	MANIMBAHOI	PARIGI
	262	730604	01	07	58	0039	SOMPO	TUMBURWATA	01	07	1958	S	1	KUNJUNG MAE RT 002 RW 001	05	MANIMBAHOI	PARIGI
150	176	730604	01	07	59	0020	MARING	GOWA	01	07	1959	S	1	BANGKENG KAJANG RT 002 RW 002	04	MANIMBAHOI	PARIGI

	70	730604	01	07	59	0020	SANUDDIN	GOWA	01	07	1959	S	1	LANGORANG RT 003 RW 001	06	MANIMBAHOI	PARIGI
151	193	730604	01	07	60	0030	MUHAMMAD	GOWA	01	07	1960	S	1	BANGKENG KAJANG RT 002 RW 003	04	MANIMBAHOI	PARIGI
	99	730604	01	07	60	0030	NURDIN DG NYORONG	GOWA	01	07	1960	S	1	LANGORANG RT 003 RW 002	06	MANIMBAHOI	PARIGI
152	124	730604	01	07	64	0002	RAMPE	RAULO	01	07	1964	S	1	BONTOSUNGGU RT 001 RW 001	01	MANIMBAHOI	PARIGI
	179	730604	01	07	64	0002	RAMPE	BONTOBANNO	01	07	1964	S	1	BAROMBONG RT 002 RW 002	07	MANIMBAHOI	PARIGI
153	186	730604	01	07	65	0001	YOHANA PULUNG	MALINO	30	12	1930	S	2	JL. BAHARI; RT 003; RW 002	05	MALINO	TINGGIMONCONG
	224	730604	01	07	65	0001	RAHMAT AMIR	MALINO	01	07	1965	S	1	JL. ENDANG MALINO; RT 00 ; RW 002	06	MALINO	TINGGIMONCONG
154	182	730604	01	07	65	0020	CENKONG	GOWA	01	07	1965	S	1	BANGKENG KAJANG RT 002 RW 002	04	MANIMBAHOI	PARIGI
	133	730604	01	07	65	0020	HARUM	GOWA	01	07	1965	S	1	KASOMBERANG RT 001 RW 001	07	MANIMBAHOI	PARIGI
155	507	730604	01	07	89	0001	ARIFIN	GANTARANG	03	07	1989	S	1	JL. A. MAPPATANGKA : RT 002 ; RW 005	01	MALINO	TINGGIMONCONG
	211	730604	01	07	89	0001	HAERUDDIN	MALINO	01	07	1989	S	1	JL. S. HASANUDDIN; RT 004; RW 001	04	MALINO	TINGGIMONCONG
	206	730604	01	07	89	0001	HENDRIK DOINGA	MALINO	01	07	1989	B	1	JL BAHARI; RT 00 ; RW 00	05	MALINO	TINGGIMONCONG
156	367	730604	01	07	91	0123	NUDDIN BIN SALLE	KANREAPIA	01	07	1991	B	1	RUTAN KLAS II B MALINO	02	MALINO	TINGGIMONCONG
	291	730604	01	07	91	0123	RUSDianto	LEBONG	01	07	1992	B	1	JL ENDANG; RT 00 ; RW 004	06	MALINO	TINGGIMONCONG
157	233	730604	01	07	92	0025	HANDY SION DANIEL. K	MALINO	01	07	1992	B	1	JL BAHARI; RT 00 ; RW 00	05	MALINO	TINGGIMONCONG
	461	730604	01	07	92	0025	MANSYUR	GOWA	01	07	1992	B	1	Jl. S. HASANUDDIN; RT 00 ; RW 00	07	MALINO	TINGGIMONCONG
158	213	730604	01	09	89	0001	YUNUS	MALINO	01	09	1989	S	1	JL. S. HASANUDDIN; RT 004; RW 001	04	MALINO	TINGGIMONCONG
	442	730604	01	09	89	0001	MAHATIR	MAKASSAR	07	09	1989	B	1	JL. A. MANGERANG; RT 00 ; RW 00	07	MALINO	TINGGIMONCONG
159	64	730604	03	04	69	0001	LATIF DEKE	MALINO	03	04	1969	S	1	JL A MAPPATANGKA; RT 00 ; RW 005	01	MALINO	TINGGIMONCONG
	187	730604	03	04	69	0001	MASSIDI TANDILANGI	TORAJA	03	04	1969	S	1	JL BAHARI; RT 003; RW 002	05	MALINO	TINGGIMONCONG
160	522	730604	03	05	87	0001	ARIF NUJU	MALINO	03	05	1987	S	1	JL PATTENE; RT 00 ; RW 00	07	MALINO	TINGGIMONCONG
	417	730604	03	05	87	0001	ARIF	GANTARANG	03	05	1987	S	1	JL KR PADO; RT 00 ; RW 004	08	MALINO	TINGGIMONCONG
161	514	730604	03	05	88	0001	RUDI HARTONO	MALINO	03	05	1988	S	1	JL. M.S DG. NGEMBA; RT 00 ; RW 005	01	MALINO	TINGGIMONCONG
	233	730604	03	05	88	0001	ARMAN	MAROS	03	05	1988	B	1	KOMP. PERUM RUTAN MALINO	02	MALINO	TINGGIMONCONG
162	128	730604	05	05	82	0001	HAMZAH	TAMAONA	05	05	1982	B	1	JL. SLT. HASANUDDIN NO 67; RT 005; RW 002	04	MALINO	TINGGIMONCONG
	344	730604	05	05	82	0001	HAMZAH. N	MALINO	05	05	1982	S	1	JL PATTENE; RT 00 ; RW 004	07	MALINO	TINGGIMONCONG
163	470	730604	07	07	92	0001	RAHMAT IMAN	MALINO	07	07	1992	B	1	JL. M.S DG. NGEMBA; RT 003 ; RW 005	01	MALINO	TINGGIMONCONG

	335	730604	07	07	92	0001	SAFRI. D	KAMPUNGBARU	07	07	1992	B	1	KAMPUNG BARU; RT 002 ; RW 002	11	MALINO	TINGGIMONCONG
164	402	730604	10	02	71	0001	MUH YUSUF, S.Ag	TONROKOMBANG	10	02	1971	S	1	JL MS. DG. NEMBA; RT 004; RW 005	01	MALINO	TINGGIMONCONG
	341	730604	10	02	71	0001	BAHARUDDIN SARRO	MALINO	10	02	1971	S	1	JL KARAENG PADO; RT 00 ; RW 00	08	MALINO	TINGGIMONCONG
165	180	730604	11	02	69	0001	SYARIFUDDIN. S	MALINO	11	02	1969	S	1	JL TIBI DG TATA; RT 001; RW 001	02	MALINO	TINGGIMONCONG
	68	730604	11	02	69	0001	AKSAN DN	MALINO	11	02	1969	S	1	JL DG JARUNG NO 242; RT 003; RW 001	03	MALINO	TINGGIMONCONG
166	258	730604	11	12	78	0001	AMRAN DG. RAMBA	PANGAJIANG	11	12	1978	S	1	JL A MAPPATANGKA; RT 00 ; RW 005	01	MALINO	TINGGIMONCONG
	167	730604	11	12	78	0001	HALIMUDDIN	KAMPUNG BARU	11	12	1978	S	1	TASSA"LA; RT 001; RW 002	11	MALINO	TINGGIMONCONG
167	352	730604	12	03	92	0001	MUH. RIDWAN	MALINO	12	03	1992	B	1	JL. COLLENG ; RT 006 ; RW 001	02	MALINO	TINGGIMONCONG
	505	730604	12	03	92	0001	MUH. RIZAL	PANGAJIANG	11	11	1982	S	1	JL KR PADO; RT 00 ; RW 004	08	MALINO	TINGGIMONCONG
168	196	730604	12	06	89	0001	NASRULLAH	MALINO	12	06	1989	B	1	JL TIBI DG TATA; RT 001; RW 001	02	MALINO	TINGGIMONCONG
	75	730604	12	06	89	0001	SUMEDI	MAWANG	12	06	1989	B	1	JL KARAENG PADO; RT 00 ; RW 00	08	MALINO	TINGGIMONCONG
169	65	730604	13	03	68	0001	SAHARUDDIN	PARANGLOE	13	03	1968	S	1	JL.KARAENG PADO; RT 00 ; RW 00	07	MALINO	TINGGIMONCONG
	335	730604	13	03	68	0001	SYAHARUDDIN	TONATONASA	13	03	1968	S	1	JL KARAENG PADO; RT 00 ; RW 00	08	MALINO	TINGGIMONCONG
170	498	730604	14	07	91	0001	NATFRADILLAH ATFAWINI	MAKASSAR	14	07	1992	B	1	JL KR PADO; RT 00 ; RW 004	08	MALINO	TINGGIMONCONG
	332	730604	14	07	91	0001	HENDRA	BATULAPISI	14	07	1991	B	1	BATULAPISI; RT 001; RW 001	10	MALINO	TINGGIMONCONG
171	27	730604	15	03	58	0001	ABD RASYID C	LOMBASANG	15	03	1958	S	1	JL ENDANG; RT 001; RW 002	06	MALINO	TINGGIMONCONG
	381	730604	15	03	58	0001	H. MANGANDAR A	SUMBAWA	15	03	1958	S	1	JL PATTENE; RT 00 ; RW 004	07	MALINO	TINGGIMONCONG
172	206	730604	17	01	59	0001	DOLLA	GOWA	17	01	1959	S	1	BONTO TE"NE RT 002 RW 002	02	MANIMBAHOI	PARIGI
	244	730604	17	01	59	0001	DOLA	GOWA	17	01	1959	S	1	BONTOMARANNU RT 002 RW 001	03	MANIMBAHOI	PARIGI
173	369	730604	17	06	86	0001	MADANG	MALINO	17	06	1986	S	1	JL PATTENE; RT 00 ; RW 004	07	MALINO	TINGGIMONCONG
	45	730604	17	06	86	0001	HENDRA SUPRIADI	MALINO	17	06	1986	B	1	BATULAPISI LUAR; RT 001; RW 003	09	MALINO	TINGGIMONCONG
174	295	730604	23	03	53	0001	SUEBA	MALINO	02	03	1953	P	2	JL.A MANGNERANGI NO.34; RT 005; RW 001	04	MALINO	TINGGIMONCONG
	320	730604	23	03	53	0001	NYAMBAMG	GANTARANG	23	03	1953	B	1	JL PATTENE; RT 00 ; RW 004	07	MALINO	TINGGIMONCONG
175	217	730604	23	03	83	0001	ARIFUDDIN	MAROS	23	03	1983	B	1	JL SAMIUN NO 8; RT 00 ; RW 00	05	MALINO	TINGGIMONCONG
	235	730604	23	03	83	0001	HASBULLAH	MALINO	23	03	1983	S	1	JL. ANOANG MALINO; RT 00 ; RW 002	06	MALINO	TINGGIMONCONG
176	3	730604	23	05	72	0001	MUH JAFAR R	MALINO	23	05	1972	P	1	JL.A.MANGERANGI; RT 001; RW 003	04	MALINO	TINGGIMONCONG
	449	730604	23	05	72	0001	RAHMAT DATOLA	MALINO	23	05	1972	S	1	JL. KR. PADO MALINO; RT 00 ; RW 00	07	MALINO	TINGGIMONCONG



177	82	730604	23	05	73	0001	RAHMAT	MALINO	23	05	1973	S	1	JL. SLT. HASANUDDIN; RT 002; RW 003	04	MALINO	TINGGIMONCONG
	226	730604	23	05	73	0001	RAMLI	MALINO	23	05	1973	S	1	JL. ENDANG MALINO; RT 00 ; RW 002	06	MALINO	TINGGIMONCONG
	367	730604	23	05	73	0001	HARDIANTO	MALINO	23	05	1973	S	1	JL. PATTENE; RT 00 ; RW 004	07	MALINO	TINGGIMONCONG
178	426	730604	27	10	69	0001	ABD. JABBIR JABBAR	MALINO	27	10	1969	S	1	JL. M.S DG. NGEMBA; RT 00 ; RW 005	01	MALINO	TINGGIMONCONG
	361	730604	27	10	69	0001	ABD. JABIR	MALINO	27	10	1969	S	1	JL. TIBI. DG. TATA; RT 004; RW 005	02	MALINO	TINGGIMONCONG
179	498	730604	28	12	84	0001	NURDIN	MALINO	28	12	1984	S	1	JL. PATTENE; RT 00 ; RW 00	07	MALINO	TINGGIMONCONG
	388	730604	28	12	84	0001	UNDING	MALINO	28	12	1984	B	1	JL. KR. PADO; RT 00 ; RW 004	08	MALINO	TINGGIMONCONG
180	480	730604	29	05	87	0001	NAIDIL FITRI	MAKASSAR	29	05	1987	S	1	JL. A. MAPPATANGKA : RT 002 ; RW 005	01	MALINO	TINGGIMONCONG
	253	730604	29	05	87	0001	NAIDIL FITRAH	MAKASSAR	29	05	1987	S	1	JL. KARAENG PADO; RT 00 ; RW 00	08	MALINO	TINGGIMONCONG
181	246	730604	30	01	78	0001	ABD. FATAH	BOGOR	30	01	1978	S	1	JL. A. MANGERANGI; RT 00 ; RW 003	04	MALINO	TINGGIMONCONG
	222	730604	30	01	78	0001	NASRUN	MALINO	30	01	1978	S	1	JL. PARAWANGSA; RT 00 ; RW 00	07	MALINO	TINGGIMONCONG
182	527	730604	30	11	69	0001	SAING	MALAKAJI	30	11	1969	B	1	JL.KR.PADO ; RT 00 ; RW 00	08	MALINO	TINGGIMONCONG
	94	730604	30	11	69	0001	GADENG KAKING	KAMPUNG BARU	30	11	1969	S	1	TASSA"LA; RT 002; RW 002	11	MALINO	TINGGIMONCONG
183	342	730604	31	12	90	0001	JAMALUDDIN BASRIANDA	BATULAPISI	31	12	1990	B	1	BATULAPISI; RT 003; RW 001	10	MALINO	TINGGIMONCONG
	259	730604	31	12	90	0001	SARIBI	KAMPUNG BARU	31	12	1990	B	1	JL. TASSA"LA; RT 00 ; RW 00	11	MALINO	TINGGIMONCONG
184	326	730604	41	01	50	0001	JOMBONG HARIAH	MALINO	01	01	1950	S	2	JL. KARAENG PADO; RT 00 ; RW 00	08	MALINO	TINGGIMONCONG
	163	730604	41	01	50	0001	NGAI PALETTEI	BATULAPISI	01	01	1950	S	2	BATULAPISI LUAR ; RT 00 ; RW 00	09	MALINO	TINGGIMONCONG
185	67	730604	41	01	63	0001	ROSBETHI DN	MALINO	31	01	1963	B	2	JL DG JARUNG NO 242; RT 003; RW 001	03	MALINO	TINGGIMONCONG
	159	730604	41	01	63	0001	IRIANI SYAFRUDDIN	MAKASSAR	01	01	1963	S	2	JL. S. HASANUDDIN; RT 004; RW 001	04	MALINO	TINGGIMONCONG
186	363	730604	41	01	82	0002	ELBINA	MALAYSIA	11	01	1982	S	2	JL. KARAENG PADO; RT 00 ; RW 00	08	MALINO	TINGGIMONCONG
	77	730604	41	01	82	0002	MARLINA. S. A.Ma	BATULAPISI	01	01	1982	S	2	BATULAPISI LUAR; RT 002; RW 003	09	MALINO	TINGGIMONCONG
187	478	730604	41	01	91	0001	FATMASARI NINGSIH	SUNGGUMINA	11	01	1991	B	2	JL. A. MAPPATANGKA : RT 002 ; RW 005	01	MALINO	TINGGIMONCONG
	183	730604	41	01	91	0001	SUKAWATI	BATULAPISI	01	01	1991	S	2	BATULAPISI LUAR ; RT 00 ; RW 00	09	MALINO	TINGGIMONCONG
188	192	730604	41	04	89	0001	MARLINA MUL	MALINO	01	04	1989	S	2	Jl. S. HASANUDDIN; RT 003; RW 001	03	MALINO	TINGGIMONCONG
	61	730604	41	04	89	0001	ROSMIAN TI RUSTAM	PAKATTO	01	04	1989	B	2	JL BAHARI COMP SECATA; RT 002; RW 002	05	MALINO	TINGGIMONCONG
189	78	730604	41	06	87	0001	FITRIANA T, A.Ma	MALINO	01	06	1987	S	2	JL A MAPPATANGKA; RT 00 ; RW 005	01	MALINO	TINGGIMONCONG
	374	730604	41	06	87	0001	HERLINA	BATULAPISI	01	06	1987	S	2	BATULAPISI DALAM; RT 005; RW 001	10	MALINO	TINGGIMONCONG

190	72	730604	41	07	38	0001	CAE	KANREAPIA	01	07	1938	P	2	JL S DG JARUNG; RT 002; RW 001	02	MALINO	TINGGIMONCONG
	250	730604	41	07	38	0001	NY. AISYAH AHMAD SURATMI	ENREKANG	01	07	1938	P	2	JL. S. HASANUDDIN; RT 003; RW 001	03	MALINO	TINGGIMONCONG
191	267	730604	41	07	45	0022	BAEDA	RAULO	01	07	1945	S	2	RAULO RT 001 RW 001	01	MANIMBAHOI	PARIGI
	40	730604	41	07	45	0022	BAEDA	GOWA	01	07	1945	S	2	BANGKENGKAJANG RT 002 RW 001	04	MANIMBAHOI	PARIGI
192	305	730604	41	07	46	0003	PATI	TASSESE	01	07	1946	S	2	JL. PENDIDIKAN; RT 00 ; RW 006	03	MALINO	TINGGIMONCONG
	372	730604	41	07	46	0003	PATI	TASSESE	01	07	1946	B	2	JL PENDIDIKAN; RT 003; RW 006	09	MALINO	TINGGIMONCONG
193	192	730604	41	07	47	0020	SURI	GOWA	01	07	1947	S	2	BANGKENG KAJANG RT 002 RW 003	04	MANIMBAHOI	PARIGI
	57	730604	41	07	47	0020	RALIPA	GOWA	01	07	1947	P	2	KASOMBERANG RT 001 RW 003	06	MANIMBAHOI	PARIGI
194	315	730604	41	07	50	0001	HASNA	MALINO	01	07	1950	P	2	JL .A.MANGERANGI RT 00 ; RW 00	04	MALINO	TINGGIMONCONG
	204	730604	41	07	50	0001	YOHANA LIKU	MALINO	01	07	1950	P	2	JL BAHARI; RT 00 ; RW 00	05	MALINO	TINGGIMONCONG
195	254	730604	41	07	54	0010	KARANNUANG DG TARRING	GOWA	01	07	1954	S	2	BORONG BULO RT 001 RW 001	02	MANIMBAHOI	PARIGI
	178	730604	41	07	54	0010	DADI"	GOWA	01	07	1954	S	2	BANGKENG KAJANG RT 002 RW 002	04	MANIMBAHOI	PARIGI
196	45	730604	41	07	60	0008	MINA	GOWA	01	07	1960	S	2	BONTOTE"NE RT 001 RW 001	03	MANIMBAHOI	PARIGI
	176	730604	41	07	60	0008	NGAI	GOWA	01	07	1960	S	2	BAROMBONG RT 002 RW 002	07	MANIMBAHOI	PARIGI
197	222	730604	41	07	68	0001	DARMA	ASANA	01	07	1968	B	2	JL. WASPADA MALINO; RT 00 ; RW 002	06	MALINO	TINGGIMONCONG
	284	730604	41	07	68	0001	NELLI	TASSALA	01	07	1968	S	2	JL. TASSA"LA; RT 00 ; RW 00	11	MALINO	TINGGIMONCONG
198	258	730604	41	07	72	0001	ENANG PURWIYANTI	MALINO	31	07	1972	P	2	JL. BAHARI; RT 00 ; RW 00	05	MALINO	TINGGIMONCONG
	218	730604	41	07	72	0001	MARIATI	MALINO	01	07	1972	P	2	JL. ENDANG MALINO; RT 00 ; RW 002	06	MALINO	TINGGIMONCONG
199	47	730604	41	07	72	0071	DIANA R	MALINO	01	07	1972	S	2	JL TIBI DG TATA; RT 001; RW 001	02	MALINO	TINGGIMONCONG
	395	730604	41	07	72	0071	JAWI DG. BAU	GOWA	01	07	1972	S	2	JL PATTENE; RT 00 ; RW 004	07	MALINO	TINGGIMONCONG
200	217	730604	41	07	75	0155	MAYA	MAJANNANG	01	07	1975	S	2	JL. A. MANGERANGI; RT 00 ; RW 003	04	MALINO	TINGGIMONCONG
	127	730604	41	07	75	0155	IDA	BATU LAPIS	01	07	1975	S	2	BATULAPISI; RT 005; RW 001	10	MALINO	TINGGIMONCONG
201	256	730604	41	07	76	0023	SALMAWATI (ACCE)	GOWA	07	01	1976	S	2	RAULO RT 001 RW 001	01	MANIMBAHOI	PARIGI
	216	730604	41	07	76	0023	SANTI CABBA	GOWA	01	07	1976	S	2	TUMBURIWATA RT 001 RW 001	05	MANIMBAHOI	PARIGI
202	237	730604	41	07	79	0125	SURIANI	MALINO	01	07	1979	S	2	JL A MAPPATANGKA; RT 00 ; RW 005	01	MALINO	TINGGIMONCONG
	253	730604	41	07	79	0125	FITRIANI	MALINO	01	07	1979	S	2	JL SAIMUN; RT 005; RW 002	04	MALINO	TINGGIMONCONG
203	202	730604	41	07	81	0001	ADRIANA LAYUK MIKAEL A	MALINO	01	07	1981	S	2	JL BAHARI; RT 00 ; RW 00	05	MALINO	TINGGIMONCONG

	492	730604	41	07	81	0001	NURLINA ARSYAD	GANTARANG	17	07	1981	S	2	JL PATTENE; RT 00 ; RW 00	07	MALINO	TINGGIMONCONG
204	204	730604	41	07	91	0001	TUTI . M	MALINO	01	07	1991	B	2	JL TIBI DG TATA; RT 001; RW 001	02	MALINO	TINGGIMONCONG
	274	730604	41	07	91	0001	NIA. H	BATULAPISI	01	07	1991	B	2	JL. TASSA"LA; RT 00 ; RW 00	11	MALINO	TINGGIMONCONG
205	126	730604	41	10	82	0002	ANITA	JONGGOA	01	10	1982	S	2	JL A MAPPATANGKA; RT 00 ; RW 005	01	MALINO	TINGGIMONCONG
	385	730604	41	10	82	0002	ASRUNI AZIS	MALINO	01	02	1982	S	2	JL PENDIDIKAN; RT 00 ; RW 00	03	MALINO	TINGGIMONCONG
206	484	730604	42	02	81	0001	KURNIA	MAKASSAR	02	02	1981	S	2	JL. A. MAPPATANGKA : RT 002 ; RW 005	01	MALINO	TINGGIMONCONG
	348	730604	42	02	81	0001	SUKMA	TANETE	12	02	1981	S	2	JL PATTENE; RT 00 ; RW 004	07	MALINO	TINGGIMONCONG
	373	730604	42	02	81	0001	HAMLIANI	MALINO	02	02	1981	S	2	JL KARAENG PADO; RT 00 ; RW 00	08	MALINO	TINGGIMONCONG
207	428	730604	42	10	89	0001	DIAN	MAKASSAR	22	10	1989	S	2	JL. M.S DG. NGEMBA; RT 00 ; RW 005	01	MALINO	TINGGIMONCONG
	225	730604	42	10	89	0001	CITRA	GOWA	02	10	1989	B	2	JL. S. HASANUDDIN; RT 004; RW 001	04	MALINO	TINGGIMONCONG
208	225	730604	43	02	54	0001	HANISA	MAROS	03	02	1954	P	2	JL COLLENG; RT 002; RW 001	03	MALINO	TINGGIMONCONG
	370	730604	43	02	54	0001	MURNI	MALINO	23	02	1954	S	2	JL PATTENE; RT 00 ; RW 004	07	MALINO	TINGGIMONCONG
209	365	730604	43	04	89	0001	FARID	MALINO	23	04	1989	B	2	JL PATTENE; RT 00 ; RW 004	07	MALINO	TINGGIMONCONG
	7	730604	43	04	89	0001	MUSDALIFA	MALINO	03	04	1989	B	2	JL KARAENG PADO; RT 00 ; RW 00	08	MALINO	TINGGIMONCONG
210	264	730604	45	11	53	0001	HERIANI	JENEPONTO	05	11	1953	S	2	JL COLLENG NO 33; RT 004; RW 001	02	MALINO	TINGGIMONCONG
	221	730604	45	11	53	0001	MARYATI	MALINO	05	11	1953	S	2	JL. S. HASANUDDIN; RT 004; RW 001	04	MALINO	TINGGIMONCONG
211	18	730604	47	04	90	0001	PRATWI YUNUS	UJUNG Pandang	07	04	1990	B	2	JL. PEMUDA; RT 003; RW 001	03	MALINO	TINGGIMONCONG
	91	730604	47	04	90	0001	AYU REZKI AFRILIA	SUNGGUMINASA	07	04	1990	B	2	MALINO KOTA; RT 00 ; RW 00	07	MALINO	TINGGIMONCONG
212	288	730604	48	12	89	0001	NURLINA	MAKASSAR	18	12	1989	S	2	JL. TIBI DG TATA; RT 00 ; RW 001	02	MALINO	TINGGIMONCONG
	481	730604	48	12	89	0001	WAHYUNI	MALINO	08	12	1989	B	2	JL KR PADO; RT 00 ; RW 004	08	MALINO	TINGGIMONCONG
213	105	730604	49	10	77	0002	KAMRIANI MICI	MALINO	09	10	1977	B	2	JL BAHARI NO 10 MALINO; RT 002; RW 002	05	MALINO	TINGGIMONCONG
	242	730604	49	10	77	0002	SITTI KAMRIANI	MAKASSAR	09	12	1963	S	2	JL. ANOANG; RT 004; RW 002	06	MALINO	TINGGIMONCONG
214	169	730604	50	05	70	0001	HERNIA	MALINO	10	05	1970	S	2	JL TIBI DG TATA; RT 001; RW 001	02	MALINO	TINGGIMONCONG
	90	730604	50	05	70	0001	HJ ASRIANI HAMKA	MALINO	10	05	1970	S	2	MALINO KOTA; RT 00 ; RW 00	07	MALINO	TINGGIMONCONG
215	249	730604	51	06	90	0001	SARTIKA	PARANGLOE	11	06	1990	B	2	JL PATTENE; RT 001 ; RW 004	07	MALINO	TINGGIMONCONG
	329	730604	51	06	90	0001	MUSDALIFA	MALINO	11	06	1990	S	2	JL KARAENG PADO; RT 00 ; RW 00	08	MALINO	TINGGIMONCONG
216	248	730604	52	12	67	0001	NURHAYANI	MALINO	12	12	1967	S	2	JL. COLLENG MALINO; RT 005; RW 001	02	MALINO	TINGGIMONCONG

	234	730604	52	12	67	0001	JUMRIATI	U.PANDANG	12	12	1967	S	2	JL. ENDANG MALINO; RT 00 ; RW 002	06	MALINO	TINGGIMONCONG
217	410	730604	54	05	92	0001	WAHIDAH ABD. AZIS	MALINO	14	05	1992	B	2	JL. PENDIDIKAN; RT 003; RW 006	03	MALINO	TINGGIMONCONG
	405	730604	54	05	92	0001	WAHIDA	MALINO	14	05	1992	B	2	JL. PENDIDIKAN; RT 003; RW 006	09	MALINO	TINGGIMONCONG
218	273	730604	57	03	92	0001	SYAMRA AFITNI MULYA	MALINO	17	03	1992	B	2	JL. S. HASANUDDIN; RT 00 ; RW 00	04	MALINO	TINGGIMONCONG
	516	730604	57	03	92	0001	RISKA	MALINO	27	03	1992	S	2	JL. PATTENE; RT 00 ; RW 00	07	MALINO	TINGGIMONCONG
219	118	730604	57	07	84	0001	ERNI	GANTARANG	17	07	1984	S	2	MALINO KOTA; RT 002; RW 003	04	MALINO	TINGGIMONCONG
	223	730604	57	07	84	0001	ERNI	UJUNG BORI	17	07	1984	S	2	JL. PARAWANGSA; RT 00 ; RW 00	07	MALINO	TINGGIMONCONG
220	475	730604	60	05	89	0001	MUSDALIFAH	MALINO	20	05	1989	B	2	JL. PATTENE; RT 00 ; RW 00	07	MALINO	TINGGIMONCONG
	385	730604	60	05	89	0001	MUSDALIFAH	MALINO	20	05	1989	B	2	JL. KR PADO; RT 00 ; RW 004	08	MALINO	TINGGIMONCONG
221	241	730604	65	06	66	0001	TITIN SUSANTI	TASIKMALAYA	25	05	1966	S	2	JL. S. DG. JARUNG; RT 003; RW 001	03	MALINO	TINGGIMONCONG
	281	730604	65	06	66	0001	YUSMIATI	UJUNG PANDANG	25	06	1966	S	2	ASPOL TINGGIMONCONG	06	MALINO	TINGGIMONCONG
222	365	730604	68	09	90	0001	HIRAWATI	LAPIN	18	09	1990	S	2	JL. SAMIUN	04	MALINO	TINGGIMONCONG
	247	730604	68	09	90	0001	HIRAWATI ARIFUDDIN	LAPRI	18	09	1990	S	2	JL. BAHARI; RT 002; RW 002	05	MALINO	TINGGIMONCONG
223	491	730604	69	03	88	0001	FARIDA	MALINO	29	03	1988	S	2	JL. PATTENE; RT 00 ; RW 00	07	MALINO	TINGGIMONCONG
	413	730604	69	03	88	0001	FARIDA	PATTENE	29	03	1988	B	2	JL. KR PADO; RT 00 ; RW 004	08	MALINO	TINGGIMONCONG
224	138	730604	71	12	20	0001	HAJIRAH BALI	MALINO	31	12	1920	P	2	JL. BAHARI; RT 002; RW 002	05	MALINO	TINGGIMONCONG
	330	730604	71	12	20	0001	DG. TE'NE	MAJANNANG	31	12	1920	S	2	JL. KARAENG PADO; RT 00 ; RW 00	08	MALINO	TINGGIMONCONG
225	119	730604	71	12	45	0001	ST SAHARI TINO	MAKASSAR	31	12	1945	P	2	JL. S DG JARUNG NO 87; RT 003; RW 001	03	MALINO	TINGGIMONCONG
	192	730604	71	12	45	0001	ST. FATIMAH DG. PATI	BONE	31	12	1945	P	2	JL. A. MANGERANGI; RT 001; RW 003	04	MALINO	TINGGIMONCONG
226	480	730604	71	12	58	0010	BAJI	LOMBASAMG	31	12	1958	S	2	JL. PATTENE; RT 00 ; RW 00	07	MALINO	TINGGIMONCONG
	420	730604	71	12	58	0010	BAJI	LOMBASAMG	31	12	1958	S	2	JL. KR PADO; RT 00 ; RW 004	08	MALINO	TINGGIMONCONG
227	403	730604	71	12	66	0008	SURIATI	TONROKOMBANG	31	12	1966	S	2	JL. MS. DG. NEMBA; RT 004; RW 005	01	MALINO	TINGGIMONCONG
	248	730604	71	12	66	0008	ISA	BATULAPISI	31	12	1966	S	2	JL. TASSA"LA; RT 00 ; RW 00	11	MALINO	TINGGIMONCONG
228	12	730604	71	12	89	0001	ANNA FITRIANI	MALINO	31	12	1989	B	2	JL. A MAPPATANGKA; RT 00 ; RW 005	01	MALINO	TINGGIMONCONG
	263	730604	71	12	89	0001	SALMA. S	KAMPUNG BARU	31	12	1989	B	2	JL. TASSA"LA; RT 00 ; RW 00	11	MALINO	TINGGIMONCONG
229	129	730604	71	12	89	0002	YULIANA	GOWA	31	12	1989	S	2	JL. PARAWANGSA; RT 00 ; RW 00	07	MALINO	TINGGIMONCONG
	275	730604	71	12	89	0002	ASRI. H	BATULAPISI	31	12	1989	B	2	JL. TASSA"LA; RT 00 ; RW 00	11	MALINO	TINGGIMONCONG

230	341	730604	71	12	90	0001	NURLIANA	BATULAPISI	31	12	1990	B	2	BATULAPISI; RT 003; RW 001	10	MALINO	TINGGIMONCONG
	246	730604	71	12	90	0001	NURHAYATI. H	BATULAPISI	31	12	1990	B	2	JL. TASSA"LA; RT 00 ; RW 00	11	MALINO	TINGGIMONCONG
231	149	730605	01	07	43	0000	BEDDONG	BONTOJAI	01	07	1943	S	1	BONTOJAI	03	BARISALO	PARANGLOE
	72	730605	01	07	43	0000	ROWA	PAKKOLOMPO	01	07	1943	S	1	PAKKOLOMPO	05	BARISALO	PARANGLOE
232	134	730605	01	07	79	0050	ILHAM YASA	BONTOJAI	01	07	1979	S	1	BONTOJAI	03	BARISALO	PARANGLOE
	113	730605	01	07	79	0050	SAKIR DG. DULLA	PAKKOLOMPO	01	07	1979	S	1	PAKKOLOMPO	05	BARISALO	PARANGLOE
233	104	730605	20	10	70	0002	TASLIM	PO'RONG	27	10	1970	S	1	BONTOJAI	02	BARISALO	PARANGLOE
	63	730605	20	10	70	0002	GUNADI DG. MANGUNG	BONTOJAI	20	10	1970	S	1	BONTOJAI	03	BARISALO	PARANGLOE
234	171	730605	30	08	83	0001	SUPRIADI	GOWA	30	08	1983	B	1	DSN LEMOA RT 001 RW 001	02	PATTALIKKANG	MANUJU
	162	730605	30	08	83	0001	SUFRIADI	GOWA	30	08	1983	B	1	DUSUN LEMOWA RT 001 RW 002	03	PATTALIKKANG	MANUJU
235	137	730605	41	02	80	0002	IDAWATI	SUNGGUMINASA	02	01	1980	S	2	BONTOJAI	02	BARISALO	PARANGLOE
	344	730605	41	02	80	0002	NORO	PAKKOLOMPO	01	02	1980	S	2	PAKKOLOMPO	06	BARISALO	PARANGLOE
236	78	730605	41	07	69	0060	SANNENG	BONTOJAI	01	07	1969	S	2	BONTOJAI	03	BARISALO	PARANGLOE
	15	730605	41	07	69	0060	DG. NURUNG	PAKKOLOMPO	01	07	1969	P	2	PAKKOLOMPO	05	BARISALO	PARANGLOE
237	41	730605	41	07	78	0100	SYAMSI	BONTOJAI	01	07	1978	S	2	BONTOJAI	03	BARISALO	PARANGLOE
	114	730605	41	07	78	0100	SAMINA	PAKKOLOMPO	01	07	1978	S	2	PAKKOLOMPO	05	BARISALO	PARANGLOE
238	39	730605	42	03	73	0000	JUMALIA DG. NGIJI	BONTOJAI	02	03	1973	P	2	BONTOJAI	03	BARISALO	PARANGLOE
	119	730605	42	03	73	0000	HALIMA DG LEBANG	PAKKOLOMPO	02	03	1973	S	2	PAKKOLOMPO	05	BARISALO	PARANGLOE
239	71	730605	53	03	44	0000	DG. CAYA	PAKKOLOMPO	13	03	1944	S	2	PAKKOLOMPO	05	BARISALO	PARANGLOE
	59	730605	53	03	44	0000	KATI	PAKKOLOMPO	13	03	1944	S	2	PARANG RITA	06	BARISALO	PARANGLOE
240	134	730605	68	07	89	0001	SATTURIA B MARO"	GOWA	28	07	1989	S	2	DSN LEMOA RT 001 RW 001	02	PATTALIKKANG	MANUJU
	67	730605	68	07	89	0001	SATRIA	GOWA	28	07	1989	B	2	DUSUN LEMOWA RT 001 RW 002	03	PATTALIKKANG	MANUJU
241	544	730606	01	01	73	0029	ABDUL SAMAD SUNARYO	JAWA TENGAH	25	08	1927	S	1	JL SPMA NO12	03	ROMANGLOMPOA	BONTOMARANNU
	472	730606	01	01	73	0029	ABDUL SAMAD SUNARYO	JAYAPURA	01	01	1973	S	1	JL SPMA NO12	05	ROMANGLOMPOA	BONTOMARANNU
242	366	730606	01	02	54	0001	HAMZAH DG RAHIMI	KOCCIKANG	01	02	1954	S	1	DUSUN KOCCIKANG	01	TIMBUSENG	PATTALASANG
	17	730606	01	02	54	0001	RAHIMI	KOCCIKANG	01	02	1954	S	1	DUSUN KOCCIKANG/BALLA BORONG RT 002 RW 002	02	TIMBUSENG	PATTALASANG
243	461	730606	01	08	81	0001	AGUS TAJUDDIN	SUNGGUMINASA	08	01	1981	B	1	KOMP PKG JL MANGGIS; DUSUN ;; KODEPOS :92175; TELP :-	02	ROMANGLOMPOA	BONTOMARANNU

	108	730606	01	08	81	0001	TAJUDDIN	BORONGLOE	08	07	1981	B	1	KOMP PKG JL MANGGIS	04	ROMANGLOMPOA	BONTOMARANNU
244	209	730606	06	06	70	0002	LM KAMAL RAFI	RAHA	06	06	1970	S	1	KAMPUNG LETTE	03	ROMANGLOMPOA	BONTOMARANNU
	480	730606	06	06	70	0002	LM KAMALA RAAFI	RAHA	06	06	1970	S	1	JL. STPP GOWA, KAMPUNG LETTE	04	ROMANGLOMPOA	BONTOMARANNU
245	376	730606	07	10	67	0002	ABDUL SAMAD	UJUNG PANDANG	10	07	1967	S	1	KOMP RUM-RAH PKG NO.21; DUSUN ;; KODEPOS :92172; TELP :-	02	ROMANGLOMPOA	BONTOMARANNU
	7	730606	07	10	67	0002	ABD SAMAD	UJUNG PANDANG	10	07	1967	S	1	JL SALAK NO 21	03	ROMANGLOMPOA	BONTOMARANNU
246	528	730606	09	07	70	0002	PATIMA	BORONGLOE	07	09	1970	S	1	JL SPMA GOWA	03	ROMANGLOMPOA	BONTOMARANNU
	465	730606	09	07	70	0002	SYARIPUDDIN , A.Md	BORONGLOE	07	09	1970	S	1	JL SPMA GOWA	04	ROMANGLOMPOA	BONTOMARANNU
247	482	730606	10	11	65	0001	ABD AZIS DG RATE	PANGKEP	11	10	1965	S	1	JL. STPP GOWA	04	ROMANGLOMPOA	BONTOMARANNU
	527	730606	10	11	65	0001	HASIAH	PANGKEP	11	10	1965	S	1	ROMANGLOMPOA	05	ROMANGLOMPOA	BONTOMARANNU
248	271	730606	15	06	69	0002	ELIA MARO	MAKASSAR	15	06	1969	S	1	KOMPLEKS EKS PKG	02	ROMANGLOMPOA	BONTOMARANNU
	442	730606	15	06	69	0002	ELYA MARO	MAKASSAR	15	06	1969	S	1	KOMPLEKS PKG	04	ROMANGLOMPOA	BONTOMARANNU
249	545	730606	25	08	27	0001	ST NAISYAH	JAYAPURA	01	01	1973	S	2	JL STPP GOWA NO 6 KOMP PKG	03	ROMANGLOMPOA	BONTOMARANNU
	470	730606	25	08	27	0001	ST NAISYAH	JAWA TENGAH	25	08	1927	S	1	JL STPP GOWA NO 6 KOMP PKG	05	ROMANGLOMPOA	BONTOMARANNU
250	524	730606	27	05	76	0003	SULFAINA SALEH	SUNGGUMINASA	27	05	1976	S	1	ROMANGLOMPOA	05	ROMANGLOMPOA	BONTOMARANNU
	457	730606	27	05	76	0003	SULFAINA	SUNGGUMINASA	27	05	1976	S	1	JL. APP SPMA KAMPUNG LETTE	06	ROMANGLOMPOA	BONTOMARANNU
251	560	730606	28	12	66	0001	MARDAN DJAFAR	MAKASSAR	28	12	1966	B	1	JL JERUK	02	ROMANGLOMPOA	BONTOMARANNU
	375	730606	28	12	66	0001	MARDIN DJAFAR	MAKASSAR	28	12	1966	B	1	JL JERUK	03	ROMANGLOMPOA	BONTOMARANNU
252	409	730606	31	12	55	0006	H DG NAI	GOWA	31	12	1955	S	1	KAMPUNG LETTE	03	ROMANGLOMPOA	BONTOMARANNU
	194	730606	31	12	55	0006	HARIS DG NAI	GOWA	31	12	1955	S	1	KAMPUNG LETTE	04	ROMANGLOMPOA	BONTOMARANNU
253	487	730606	31	12	66	0008	ABD KADIR BOKO	KAMP BERU	31	12	1966	S	1	KAMPUNG LETTE	03	ROMANGLOMPOA	BONTOMARANNU
	353	730606	31	12	66	0008	ABD KADIR	KAMP BERU	31	12	1966	S	1	KAMPUNG LETTE	06	ROMANGLOMPOA	BONTOMARANNU
254	516	730606	41	07	42	0012	HJ. HANIA SOHORA	PAREPARE	07	01	1942	S	2	ROMANG LOMPOA	04	ROMANGLOMPOA	BONTOMARANNU
	27	730606	41	07	42	0012	HANIA SOHORA	PAREPARE	07	01	1942	S	2	ROMANGLOMPOA	05	ROMANGLOMPOA	BONTOMARANNU
255	476	730606	41	07	43	0006	SITTI DG RANNU	BORONG LOE	07	01	1977	S	2	JL STTP GOWA	04	ROMANGLOMPOA	BONTOMARANNU
	467	730606	41	07	43	0006	DG SANNENG	BORONGLOE	07	01	1927	S	1	JL APP	06	ROMANGLOMPOA	BONTOMARANNU
256	301	730606	44	05	72	0002	NAIMAH	BORONG	05	04	1972	S	2	KAMPUNG BERU	04	ROMANGLOMPOA	BONTOMARANNU
	298	730606	44	05	72	0002	NAIMA	MAWANG	05	04	1972	S	2	KAMPUNG BERU MAWANG	05	ROMANGLOMPOA	BONTOMARANNU

257	341	730606	45	05	76	0003	HASNI	BONTONOMPO	05	05	1976	S	2	KAMPUNG BERU	04	ROMANGLOMPOA	BONTOMARANNU
	276	730606	45	05	76	0003	HASNI HAMSAH	BONTONOMPO	05	05	1976	S	2	KAMPUNG BERU MAWANG	05	ROMANGLOMPOA	BONTOMARANNU
258	522	730606	48	11	81	0003	ANISAH EDDY YUSUF	SUNGGUMINASA	11	08	1981	B	2	ROMANG LOMPOA	04	ROMANGLOMPOA	BONTOMARANNU
	86	730606	48	11	81	0003	ANISAN	SUNGGUMINASA	11	08	1981	B	2	ROMANGLOMPOA	05	ROMANGLOMPOA	BONTOMARANNU
259	457	730606	55	06	73	0003	HASIAH	MAWANG	15	06	1973	S	2	JL. STPP GOWA	04	ROMANGLOMPOA	BONTOMARANNU
	528	730606	55	06	73	0003	SURIANI	MAWANG	15	06	1973	S	2	ROMANGLOMPOA	05	ROMANGLOMPOA	BONTOMARANNU
260	567	730606	56	01	79	0002	CORRYLINA	MAKASSAR	16	01	1979	B	2	JL JERUK	02	ROMANGLOMPOA	BONTOMARANNU
	270	730606	56	01	79	0002	KAROLINA MARO	MAKASSAR	16	01	1979	B	2	KOMP. PKG JL. JERUK NO. 27	03	ROMANGLOMPOA	BONTOMARANNU
261	458	730606	58	01	71	0001	SARAPIAH	BORONG	18	01	1971	S	2	KAMPUNG LETTE	03	ROMANGLOMPOA	BONTOMARANNU
	556	730606	58	01	71	0001	BACCE DG TIRO	BORONG	06	02	1964	S	2	JL. APP SPMA KAMPUNG LETTE	05	ROMANGLOMPOA	BONTOMARANNU
262	390	730606	59	03	75	0002	NURIWAN	MAKASSAR	19	03	1975	S	2	KOMP. PKG JL. MALINO NO 2F	01	ROMANGLOMPOA	BONTOMARANNU
	126	730606	59	03	75	0002	NURIAWAN	MAKASSAR	19	03	1975	S	2	KOMP. PKG JL. MALINO NO 2F	04	ROMANGLOMPOA	BONTOMARANNU
263	543	730606	59	07	74	0004	AHMAD	BORONG LOE	19	07	1974	S	1	JL SPMA NO12	03	ROMANGLOMPOA	BONTOMARANNU
	471	730606	59	07	74	0004	AHMAD	BORONG LOE	19	07	1974	S	2	JL SPMA NO12	05	ROMANGLOMPOA	BONTOMARANNU
264	369	730606	60	01	83	0002	MATIA. DG PAJA	MAKASSAR	20	01	1983	S	2	KAMP LETTE	03	ROMANGLOMPOA	BONTOMARANNU
	346	730606	60	01	83	0002	DG PAJA	MAKASSAR	20	01	1983	S	2	KAMPUNG LETTE	06	ROMANGLOMPOA	BONTOMARANNU
265	523	730606	61	04	75	0004	ASLIYAH EDDY YUSUF	SUNGGUMINASA	21	04	1975	B	2	ROMANG LOMPOA	04	ROMANGLOMPOA	BONTOMARANNU
	87	730606	61	04	75	0004	ASLIYAH	SUNGGUMINASA	21	04	1975	B	2	ROMANGLOMPOA	05	ROMANGLOMPOA	BONTOMARANNU
266	313	730606	65	12	82	0003	SAHARIAH	BORONGLOE	25	12	1982	S	2	JL. CEMARA	01	ROMANGLOMPOA	BONTOMARANNU
	427	730606	65	12	82	0003	SAHARIA	BORONGLOE	25	12	1982	S	2	KOMPLEKS PKG JL CEMARA	02	ROMANGLOMPOA	BONTOMARANNU
267	542	730606	70	12	50	0003	YULIANA	BORONG	30	12	1950	S	2	JL SPMA NO12	03	ROMANGLOMPOA	BONTOMARANNU
	458	730606	70	12	50	0003	CACCE DG PAJJA	BORONG	30	12	1950	S	2	JL. STPP GOWA	04	ROMANGLOMPOA	BONTOMARANNU
268	221	730607	01	05	56	0002	GANNA DG TOBO	BORONG BULO	01	05	1956	S	1	BORONGBULO; RT 002; RW 003	09	BONTOALA	PALLANGGA
	394	730607	01	05	56	0002	GANNA DG. TOBO	BR. BULO	01	05	1956	S	1	BORONG BULO RT 002 RW 003	10	BONTOALA	PALLANGGA
269	225	730607	01	07	67	0263	FAISAL DAENG RUPPA	BORONG BULO	01	07	1967	S	1	BORONGBULO; RT 001; RW 002	09	BONTOALA	PALLANGGA
	395	730607	01	07	67	0263	FAISAL DG. RUPPA	BR. BULO	01	07	1967	S	1	BORONG BULO RT 002 RW 003	10	BONTOALA	PALLANGGA
270	364	730607	01	07	68	0313	G. DG. MONE	BR. BULO	01	07	1968	S	1	BORONG BULO RT 002 RW 003	10	BONTOALA	PALLANGGA

	47	730607	01	07	68	0313	DAENG MONE	MAROS	01	07	1968	S	1	DUSUN TIGA ANA GOWA; RT 003; RW 002	15	BONTOALA	PALLANGGA
271	359	730607	01	07	72	0241	DAHLAN	BONTO JANANG	01	07	1972	S	1	BORONG BULO RT 002 RW 003	10	BONTOALA	PALLANGGA
	41	730607	01	07	72	0241	DAHLAN	BONTOMAJANNANG	01	07	1972	S	1	DUSUN TIGA ANA GOWA; RT 003; RW 002	15	BONTOALA	PALLANGGA
272	363	730607	01	07	73	0390	ABDULLAH SIBALI	BR. BULO	01	07	1973	S	1	BORONG BULO RT 002 RW 003	10	BONTOALA	PALLANGGA
	46	730607	01	07	73	0390	ABDULLAH	BORONGBULO	01	07	1973	B	1	DUSUN TIGA ANA GOWA; RT 003; RW 002	15	BONTOALA	PALLANGGA
273	366	730607	01	07	74	0199	SALEWANGAN	TIMBUSENG	01	07	1974	S	1	BORONG BULO RT 002 RW 003	10	BONTOALA	PALLANGGA
	49	730607	01	07	74	0199	SALEWANGANG	UJUNG PANDANG	01	07	1974	S	1	DUSUN TIGA ANA GOWA; RT 003; RW 002	15	BONTOALA	PALLANGGA
274	217	730607	01	07	86	0195	DARWIS DG MANGKA	BORONGBULO	01	07	1986	S	1	BORONGBULO; RT 002; RW 003	09	BONTOALA	PALLANGGA
	391	730607	01	07	86	0195	DARWIS MANGKA	BR. BULO	01	07	1986	S	1	BORONG BULO RT 002 RW 003	10	BONTOALA	PALLANGGA
275	327	730607	01	08	68	0001	AMIR SEWANG	JENEPONTO	01	08	1968	S	1	BTN KP. KALIMATA	10	BONTOALA	PALLANGGA
	230	730607	01	08	68	0001	SAHARUDDIN	JENETALLASA	01	08	1968	S	1	ANAGOWA; RT 001; RW 001	15	BONTOALA	PALLANGGA
276	499	730607	02	02	69	0001	HASRUL DG TUJU	GOWA	02	02	1969	B	1	TABORONG; RT 002; RW 001	02	BONTOALA	PALLANGGA
	374	730607	02	02	69	0001	MARIATI	GOWA	02	02	1969	S	2	BORONG BULO RT 002 RW 003	10	BONTOALA	PALLANGGA
277	365	730607	02	05	82	0002	LILY PUTRI INASARI R.	UJUNG PANDANG	02	05	1982	S	2	BTN ANA" GOWA C3/17	11	BONTOALA	PALLANGGA
	498	730607	02	05	82	0002	ANRI YENNI	GOWA	02	05	1982	S	2	BTN BONTO MAJANNANG RT 02/ RW02	13	BONTOALA	PALLANGGA
278	299	730607	07	02	66	0001	DRS.HAERUDDIN.MH	BT.MAERO	07	02	1966	S	1	BPM B2-5; RT 002; RW 004	22	BONTOALA	PALLANGGA
	99	730607	07	02	66	0001	HAERUDDIN	BONTOMAERO	07	02	1966	S	1	BUMI PALANGGA MAS BLOK B 2/5; RT 002; RW 007	23	BONTOALA	PALLANGGA
279	291	730607	07	05	73	0008	M TAUFIK NYSRI	PATTALASSANG	07	05	1973	S	1	BUMI PALLANGGA MAS B2/15; RT 003; RW 002	21	BONTOALA	PALLANGGA
	348	730607	07	05	73	0008	TAUFIK NURSI	PATTALASSANG	07	05	1973	S	1	BPM B2-15; RT 003; RW 004	22	BONTOALA	PALLANGGA
280	341	730607	08	08	80	0003	BASRI	BR. LAJA	08	08	1980	S	1	BORONG BULO	10	BONTOALA	PALLANGGA
	268	730607	08	08	80	0003	MUSAL	UJUNG PANDANG	08	08	1980	B	1	BONTOMAJANNANG; RT 002; RW 002	13	BONTOALA	PALLANGGA
281	32	730607	08	09	90	0002	USMAN	BR.BULO	08	09	1990	B	1	BORONG BULU; RT 002; RW 003	10	BONTOALA	PALLANGGA
	176	730607	08	09	90	0002	RIZAL	-	01	07	1976	S	1	BTN NUSA INDAH DII ND 1; RT 013; RW 002	18	BONTOALA	PALLANGGA
282	180	730607	10	11	60	0002	SADIKO	JE"NEPONTO	10	11	1960	S	1	RW 001	09	BONTOALA	PALLANGGA
	466	730607	10	11	60	0002	HASNA	GOWA	10	11	1960	S	2	BTN BONTO MAJANNANG RT 02/ RW02	13	BONTOALA	PALLANGGA
283	327	730607	14	04	41	0001	SAFRUDDIN SUKRI	MALAKAJI	14	04	1941	S	1	2	21	BONTOALA	PALLANGGA
	339	730607	14	04	41	0001	SAFRUDDIN SUKRI	MALAKAJI	14	04	1971	S	1	BPM B1 -15; RT 003; RW 004	22	BONTOALA	PALLANGGA



284	131	730607	15	12	76	0001	ANDI FIRMAN	BONE	15	12	1976	S	1	TABORONG; RT 003; RW 001	01	BONTOALA	PALLANGGA
	453	730607	15	12	76	0001	MANTASIA	GOWA	15	12	1976	S	2	BTN PALLANGGA REGENCY	13	BONTOALA	PALLANGGA
285	412	730607	16	08	90	0001	SUHARDI	SUNGGUMINASA	16	08	1990	B	1	TABORONG; RT 002; RW 002	02	BONTOALA	PALLANGGA
	343	730607	16	08	90	0001	SALAWATI	BT REYA	16	08	1990	B	2	BORONG BULO	10	BONTOALA	PALLANGGA
286	354	730607	17	03	89	0001	CHANDRA KUSUMAJAYA	BIMA	17	03	1989	B	1	BTN ANA" GOWA C4/11	11	BONTOALA	PALLANGGA
	446	730607	17	03	89	0001	CHANRA KUSUMA JAYA SINAGA	BIMA	17	03	1989	B	1	RENI PUSPITA SINAGA; RT 004; RW 002	21	BONTOALA	PALLANGGA
287	383	730607	19	04	67	0001	SUHARTO L	MAKASSAR	19	04	1967	S	1	BUMI PALLANGGA; RT 003 ; RW 002	21	BONTOALA	PALLANGGA
	342	730607	19	04	67	0001	DRS.H.SUHARTO LATANRO	MKS	07	04	1967	B	1	BPM B1-9; RT 003; RW 004	22	BONTOALA	PALLANGGA
288	356	730607	20	05	69	0003	ABD. RAJAB	BR. BULO	20	05	1969	S	1	BORONG BULO RT 002 RW 003	10	BONTOALA	PALLANGGA
	37	730607	20	05	69	0003	ABD RAJAB	BORONGBULO	20	05	1969	S	1	DUSUN TIGA ANA GOWA; RT 003; RW 002	15	BONTOALA	PALLANGGA
289	482	730607	20	06	90	0001	ADRI	GOWA	20	06	1990	B	1	BTN PALLANGGA REGENCY	13	BONTOALA	PALLANGGA
	24	730607	20	06	90	0001	MUH RASID NUR	UJUNG PANDANG	20	06	1990	B	1	BTN NUSA INDAH; RT 002; RW 002	17	BONTOALA	PALLANGGA
290	264	730607	21	11	78	0001	ALAUDDIN DG JARUNG	GOWA	21	11	1978	S	1	BONTOMAJANNANG; RT 002; RW 001	13	BONTOALA	PALLANGGA
	446	730607	21	11	78	0001	ALAUDDIN DG. JARUNG	GOWA	21	11	1978	S	1	BONTO MAJANNANG	14	BONTOALA	PALLANGGA
291	110	730607	23	10	71	0002	H.IMRAN.ST.MT	PARE-PARE	23	10	1971	S	1	BPM C7/6; RT 004; RW 003	21	BONTOALA	PALLANGGA
	205	730607	23	10	71	0002	AL IMRAN	PARE-PARE	23	10	1971	S	1	4	22	BONTOALA	PALLANGGA
292	420	730607	25	08	89	0001	FITRI	PALOPO	25	08	1989	B	2	MANYAMPA, RT 004 / RW 001	16	BONTOALA	PALLANGGA
	318	730607	25	08	89	0001	TAUFIK HIDAYAT	SURABAYA	25	08	1989	B	1	BPM J1-2; RT 001; RW 001	22	BONTOALA	PALLANGGA
293	12	730607	27	05	85	0001	HENDRA	UJUNG PANDAHG	27	05	1985	B	1	BORONG BULO; RT 002; RW 002	09	BONTOALA	PALLANGGA
	481	730607	27	05	85	0001	HENDRA NURYADI	GOWA	27	05	1985	S	1	BTN PALLANGGA REGENCY	13	BONTOALA	PALLANGGA
294	450	730607	30	03	78	0002	ARIANI	GOWA	30	03	1978	S	2	BTN BONTO MAJANNANG RT 02/ RW02	13	BONTOALA	PALLANGGA
	294	730607	30	03	78	0002	AHMAD YANI	MAKASSAR	30	03	1978	S	1	BUMI PALLANGGA MAS E 5 NO 1; RT 007; RW 006	22	BONTOALA	PALLANGGA
295	390	730607	30	12	65	0003	MUH. JAFAR	SUNGGUMINASA	30	12	1965	S	1	BORONG BULO RT 002 RW 003	10	BONTOALA	PALLANGGA
	51	730607	30	12	65	0003	MUH JAPAR	TINGGIMAE	30	12	1965	S	1	DUSUN TIGA ANA GOWA; RT 003; RW 002	15	BONTOALA	PALLANGGA
296	360	730607	31	07	89	0001	SURAHMI	BR. BULO	01	07	1989	S	2	BORONG BULO RT 002 RW 003	10	BONTOALA	PALLANGGA
	44	730607	31	07	89	0001	MUH SUL AKBAR	BORONGBULO	31	07	1989	B	1	DUSUN TIGA ANA GOWA; RT 003; RW 002	15	BONTOALA	PALLANGGA
297	358	730607	41	07	50	0081	HANISA	TAMANGNYELENG	01	07	1950	S	2	BORONG BULO RT 002 RW 003	10	BONTOALA	PALLANGGA

	40	730607	41	07	50	0081	HANISAH	TAMANYELENG	01	07	1950	S	2	DUSUN TIGA ANA GOWA; RT 003; RW 002	15	BONTOALA	PALLANGGA
298	355	730607	41	07	62	0246	DG. NGAI	BR. BULO	01	07	1962	S	2	BORONG BULO RT 002 RW 003	10	BONTOALA	PALLANGGA
	21	730607	41	07	62	0246	DAENG NGAI	BORONGBULO	01	07	1962	S	2	DUSUN TIGA ANA GOWA; RT 003; RW 003	15	BONTOALA	PALLANGGA
299	219	730607	52	03	87	0003	KASMA DG SENGA	KAMPUNG JANGRA	12	03	1987	S	2	BORONGBULO; RT 002; RW 003	09	BONTOALA	PALLANGGA
	392	730607	52	03	87	0003	KASMA DG. SENGA	K. JANGKA	12	03	1987	S	2	BORONG BULO RT 002 RW 003	10	BONTOALA	PALLANGGA
300	353	730607	52	04	64	0003	HAMSI AH	PARE-PARE	12	04	1964	S	2	BTN ANA" GOWA C4/11	11	BONTOALA	PALLANGGA
	445	730607	52	04	64	0003	HAMSI AH	PARE PARE	12	04	1964	S	2	RENI PUSPITA SINAGA; RT 004; RW 002	21	BONTOALA	PALLANGGA
301	365	730607	52	06	73	0002	DG. TINO	MANGALLI	12	06	1973	S	2	BORONG BULO RT 002 RW 003	10	BONTOALA	PALLANGGA
	48	730607	52	06	73	0002	DAENG TINO	MAROS	12	06	1973	S	2	DUSUN TIGA ANA GOWA; RT 003; RW 002	15	BONTOALA	PALLANGGA
302	140	730607	56	11	56	0002	ROSMIATI	MKS	15	02	1978	S	2	BPM D22; RT 007; RW 003	21	BONTOALA	PALLANGGA
	183	730607	56	11	56	0002	ROSMIATY	MAKASSAR	16	11	1956	B	2	2	22	BONTOALA	PALLANGGA
303	593	730607	58	06	77	0001	ADRIANI	MAKASSAR	10	06	1977	S	2	TABORONG; RT 003; RW 002	02	BONTOALA	PALLANGGA
	21	730607	58	06	77	0001	ADRIANI	MAKASSAR	18	06	1977	S	2	BTN TABORONG; RT 003; RW 004	03	BONTOALA	PALLANGGA
304	384	730607	59	04	80	0003	A SURIATI	BULUKUMBA	19	04	1980	S	2	BUMI PALLANGGA; RT 003 ; RW 002	21	BONTOALA	PALLANGGA
	343	730607	59	04	80	0003	A.SURIANTI.SS	BULUKUMBA	17	03	1980	S	2	BPM B1-9; RT 003; RW 004	22	BONTOALA	PALLANGGA
305	114	730607	59	04	90	0003	HERLIN CRISTIA FAUDI	UJUNG PANDANG	19	04	1990	B	2	BUMI PALLANGGA; RT 003 ; RW 005	17	BONTOALA	PALLANGGA
	337	730607	59	04	90	0003	HERLIN CF	U.PANDANG	19	04	1962	B	2	BUMI PALLANGGA; RT 003 ; RW 005	21	BONTOALA	PALLANGGA
306	389	730607	60	07	76	0003	HAWANIAH	BONTO LAJA	01	07	1976	S	2	BORONG BULO RT 002 RW 003	10	BONTOALA	PALLANGGA
	50	730607	60	07	76	0003	HAWANIAH	GOWA	20	07	1976	S	2	DUSUN TIGA ANA GOWA; RT 003; RW 002	15	BONTOALA	PALLANGGA
307	338	730607	60	08	60	0002	SUBAEDAH DG TANANG	TABORONG	20	08	1960	S	2	TABORONG; RT 002; RW 002	02	BONTOALA	PALLANGGA
	403	730607	60	08	60	0002	ASRI ALI	MAKASSAR	20	08	1960	S	1	BORONG BULO RT 002 RW 003	10	BONTOALA	PALLANGGA
308	300	730607	62	02	66	0001	DRA.SAHAR NILAM	LIMBUNG	22	02	1966	S	2	BPM B2-5; RT 002; RW 004	22	BONTOALA	PALLANGGA
	100	730607	62	02	66	0001	ZAHARNILAM	LIMBUNG	22	02	1966	S	2	BUMI PALANGGA MAS BLOK B 2/5; RT 002; RW 007	23	BONTOALA	PALLANGGA
309	329	730607	66	12	76	0001	FAUSIAH LATIF	BULUKUMBA	26	12	1976	S	2	2	21	BONTOALA	PALLANGGA
	387	730607	66	12	76	0001	PAUSIAH LATIF.ST	TANETE	26	12	1976	S	2	BMP B1-2; RT 002; RW 001	22	BONTOALA	PALLANGGA
310	111	730607	71	07	74	0002	NIKHRAWATI SAID.SP	BULUKUMBA	31	07	1973	S	2	BPM C7/6; RT 004; RW 003	21	BONTOALA	PALLANGGA
	206	730607	71	07	74	0002	NIKRAWATI ZAID	BULUKUMBA	31	07	1974	S	2	4	22	BONTOALA	PALLANGGA

311	121	730608	01	01	52	0006	RAMLI DG.SILA	KASOMBERANG	01	01	1952	S	1	JL. KASOMBERANG	02	PACCINONGANG	SOMBA OPU
	429	730608	01	01	52	0006	JAMALUDDIN	KACCI-KACCI	01	01	1952	S	1	PAC HAR PA 31 RT 012 RW 001	17	PACCINONGANG	SOMBA OPU
312	363	730608	02	05	86	0001	M IDUL	SUNGGUMIMASA	02	05	1986	B	1	JL SIRAJUDDIN RANI RT 001 RW 004	03	BONTO-BONTOA	SOMBA OPU
	31	730608	02	05	86	0001	SITTI	SENGKANG	01	09	1923	P	2	JL KETILANG RAYA NO. 8 RT 002 RW 001	06	BONTO-BONTOA	SOMBA OPU
313	377	730608	02	08	89	0003	TATY PURWANTI	SRAGEN	02	08	1989	B	2	JL SIRAJUDDIN RANI RT 001 RW 002	02	BONTO-BONTOA	SOMBA OPU
	547	730608	02	08	89	0003	AGUSSALIM	JEPARA	02	08	1989	B	1	JL. ANDI TONRO NO 10 A RT 005 RW 002	04	BONTO-BONTOA	SOMBA OPU
314	348	730608	09	01	65	0001	YULIUS YULI	UJUNG PANDANG	09	01	1965	S	1	BTN PAO PAO PERMAI BLOK C2/5 RT 006 RW 002	07	PACCINONGANG	SOMBA OPU
	328	730608	09	01	65	0001	MASRUDDIN	JENEPONTO	09	01	1965	S	1	MUTIARA PERMAI A 1/7	14	PACCINONGANG	SOMBA OPU
315	297	730608	10	02	77	0004	ERWIN ARIFIN KATAWAK	MAKASSAR	10	02	1977	S	1	BTN A TONRO PERMAI B13/8	09	PACCINONGANG	SOMBA OPU
	303	730608	10	02	77	0004	ERWIN ARIFIN K.	UJUNG PANDANG	10	02	1977	S	1	BTN A. TONRO PERMAI RT 10 RW 1	18	PACCINONGANG	SOMBA OPU
316	402	730608	10	09	74	0003	DARWIS	MAKASSAR	10	09	1974	S	1	JL NURI RT 001 RW 005	01	BONTO-BONTOA	SOMBA OPU
	260	730608	10	09	74	0003	ELFIRA DAMAYANTI	MAKASSAR	09	09	1974	S	2	BTN GOWA MAS INDAH BLOK D 2. RT 003 RW 003	10	BONTO-BONTOA	SOMBA OPU
317	368	730608	10	11	86	0004	ABD MAJID	SUNGGUMINASA	10	11	1986	B	1	JL USMAN SALENGKE NO 87 RT 001 RW 004	03	BONTO-BONTOA	SOMBA OPU
	36	730608	10	11	86	0004	JOHANNES WANSA	SG. MINASA	28	05	1942	P	1	JL KETILANG RAYA NO. 5 RT 002 RW 001	06	BONTO-BONTOA	SOMBA OPU
318	333	730608	16	06	77	0002	SUHARDI DG NAI	PACCINONGANG	16	06	1977	S	1	JL ABD MUTHALIB DG NARANG RT C/RW 18	05	PACCINONGANG	SOMBA OPU
	141	730608	16	06	77	0002	SUHARDI	MAKASSAR	16	06	1977	S	1	JL ABD MUTALIB DG NARANG RT 008 RW 003	19	PACCINONGANG	SOMBA OPU
319	401	730608	18	05	80	0009	IKBAL	SUNGGUMINASA	18	05	1980	S	1	JL KETILANG I NO. 8 RT 002 RW 002	06	BONTO-BONTOA	SOMBA OPU
	356	730608	18	05	80	0009	IKBAL	GOWA	18	05	1980	S	1	JL. MANGGARUPI RT 003 RW 004	08	BONTO-BONTOA	SOMBA OPU
320	430	730608	19	05	76	0004	RIJAL	GOWA	19	05	1976	S	1	JL SIRAJUDDIN RANI LR II RT 001 RW 004	04	BONTO-BONTOA	SOMBA OPU
	277	730608	19	05	76	0004	RIJAL DG BUANG	SG. MINASA	19	05	1976	S	1	JL KETILANG RAYA RT 002 RW 001	06	BONTO-BONTOA	SOMBA OPU
321	268	730608	20	10	84	0003	HENRA YANI	NAMLEAH MALUKU	20	10	1984	S	1	JL.KH.WAHID HASYIM NO 193 E RT 003 RW 002	03	SUNGGUMINASA	SOMBA OPU
	386	730608	20	10	84	0003	ANDIGUNAWANSA	NAMLEAH MALUKU	20	10	1984	B	1	JL.KH.WAHID HASYIM RT 001 RW 001	06	SUNGGUMINASA	SOMBA OPU
322	120	730608	22	06	74	0001	IR. A. NAJAMUDDIN YAJUB	BONE	22	06	1947	S	2	JL. A. TONRO NO. 142 RT 002 RW 003	07	BONTO-BONTOA	SOMBA OPU
	233	730608	22	06	74	0001	MANSYUR HAMSAH	GOWA	22	06	1974	S	1	JL MALINO RT 001 RW 005	14	BONTO-BONTOA	SOMBA OPU
323	344	730608	30	11	68	0001	A WALINONO	WAJO	30	11	1968	S	1	BTN A TONRO PERMAI B13/1 RT 014 RW 001	09	PACCINONGANG	SOMBA OPU
	283	730608	30	11	68	0001	A. WALINONO, ST.	WAJO	30	11	1968	S	1	BTN A. TONRO PERMAI B13/01 RT 1 RW 1	18	PACCINONGANG	SOMBA OPU
324	198	730608	31	12	48	0031	L DG NOMPO	SG. MINASA	31	12	1948	S	1	BTN SEJAHTERA PERMAI A/9 RT 002 RW 005	08	BONTO-BONTOA	SOMBA OPU

	302	730608	31	12	48	0031	AISYAH	GOWA	31	12	1948	S	2	JL DR W SUDIROHUSODO RT 004 RW 003	13	BONTO-BONTOA	SOMBA OPU
325	367	730608	45	11	85	0006	MARDIANA	SUNGGUMINASA	05	11	1985	B	2	JL USMAN SALENGKE NO 87 RT 001 RW 004	03	BONTO-BONTOA	SOMBA OPU
	35	730608	45	11	85	0006	MARLIAH	BONE	16	02	1963	P	2	JL KETILANG RAYA RT 002 RW 001	06	BONTO-BONTOA	SOMBA OPU
326	412	730608	47	02	90	0002	RUCHMA YANTI	SG. MINASA	07	05	1990	B	2	JL BASOI DG BUNGA RT 001 RW 002	02	BONTO-BONTOA	SOMBA OPU
	177	730608	47	02	90	0002	RAHMAWATI	SUNGGUMINASA	07	02	1990	B	2	JL. MANGGARUPI LR. I RT 003 RW 002	12	BONTO-BONTOA	SOMBA OPU
327	438	730608	49	02	67	0004	SUBAEDAH DG CAYA	SUNGGUMINASA	09	02	1967	S	2	JL SIRAJUDDIN RANI RT 001 RW 004	03	BONTO-BONTOA	SOMBA OPU
	458	730608	49	02	67	0004	A. NASRIAH MAJID, SE	ENREKANG	04	02	1966	S	2	BTN SEJAHTERA PERMAI C/7 RT 002 RW 005	07	BONTO-BONTOA	SOMBA OPU
328	410	730608	50	10	61	0005	HASNIA	SUNGGUMINASA	10	10	1961	B	2	JL NURI RT 001 RW 005	01	BONTO-BONTOA	SOMBA OPU
	448	730608	50	10	61	0005	M. DJAFAR DG NGOLA	SG. MINASA	07	11	1957	S	1	JL BASOI DG BUNGA RT 001 RW 004	03	BONTO-BONTOA	SOMBA OPU
329	300	730608	51	01	68	0004	SYAMSUARTI	PUNNIA	11	01	1968	S	2	BTN A TONRO PERMAI B14/8 RW 0	09	PACCINONGANG	SOMBA OPU
	304	730608	51	01	68	0004	SYAMSUARTI	BULUKUMBA	05	07	1968	S	2	BTN A. TONRO PERMAI RT 10 RW 1	18	PACCINONGANG	SOMBA OPU
330	330	730608	51	05	66	0004	NURLIA DG KEBO	JENEPONTO	30	12	1961	S	2	JL KH AGUS SALIM I RT 006 RW 002	05	BONTO-BONTOA	SOMBA OPU
	113	730608	51	05	66	0004	CITRA KIRANA	UJUNG PANDANG	04	05	1985	S	2	JL BASO DG BUNGA RT 002 RW 001	06	BONTO-BONTOA	SOMBA OPU
331	26	730608	59	02	59	0001	HJ. MARIANI	SIDRAP	19	02	1959	S	2	JL KETILANG RAYA NO 3 RT 002 RW 001	06	BONTO-BONTOA	SOMBA OPU
	109	730608	59	02	59	0001	NURDIAH DG KE'NANG	MKS	19	03	1959	S	2	JL. MANGGARUPI LR. I RT 003 RW 002	12	BONTO-BONTOA	SOMBA OPU
332	427	730608	65	03	71	0003	HJ. HERMIATI DG RANNU	SUNGGUMINASA	25	03	1971	S	2	JL SIRAJUDDIN RANI LR II RT 001 RW 004	04	BONTO-BONTOA	SOMBA OPU
	192	730608	65	03	71	0003	HJ. HERMIATI, SH	SG. MINASA	25	03	1971	S	2	BTN SEJAHTERA PERMAI RT 002 RW 005	08	BONTO-BONTOA	SOMBA OPU
333	124	730608	71	12	62	0047	SAENAB DG SAKKING	GOWA	31	12	1952	P	2	RT.01/RW.03 PAO-PAO	03	PACCINONGANG	SOMBA OPU
	3	730608	71	12	62	0047	HANAJIAH	MAMUJU	31	12	1962	S	2	BTN PACCINONGANG HRP PA.17/16 RT 012 RW 002	17	PACCINONGANG	SOMBA OPU
334	350	730609					IRWAN B.	RAPPODAENG	06	01	1992	B	1	RAPPODAENG RT 001; RW 001	01	SAPAYA	BUNGAYA
	61	730609					BANA	CAMBANG	01	07	1948	S	1	CAMBANG; RT; RW	02	SAPAYA	BUNGAYA
	123	730609					ISMAIL	CAMBANG	28	06	1979	S	1	CAMBANG; RT; RW	02	SAPAYA	BUNGAYA
	228	730609					ANCA.S	KARETA	10	10	1991	B	1	KARETA; RT 5; RW 9	04	SAPAYA	BUNGAYA
	227	730609					YUSUF MUH	TAROANG	21	08	1947	S	1	TAROANG; RT 6; RW 12	04	SAPAYA	BUNGAYA
	29	730609					ASTUTI	GOWA	01	07	1980	S	2	NYULU; RT 007; RW 013	05	SAPAYA	BUNGAYA
	265	730609					NENI	GOWA	07	01	1978	S	2	NYULU ; RT 007; RW 031	05	SAPAYA	BUNGAYA
	1	730609					A. MEI ABE, SE	SUNGGUMINASA	03	05	1978	S	2	BONE BARU ; RT ; RW	06	SAPAYA	BUNGAYA

	410	730609					HENNI ANWAR, S.Pdi	MAKASSAR	06	06	1984	S	2	BONE BARU; RT ; RW	06	SAPAYA	BUNGAYA
	62	730609					M.ADIL	SAPAYA	05	03	1992	B	1	PUMBARORO; RT ; RW	07	SAPAYA	BUNGAYA
	384	730609					APRIANTI	SAPAYA	04	04	1992	B	2	CAMBAYA; RT ; RW	07	SAPAYA	BUNGAYA
	306	730609					GASSING MUDA	BOTONG	24	03	1952	S	1	LANGKAI; RT 011; RW 021	08	SAPAYA	BUNGAYA
335	42	730609	15	08	68	0001	MURSALIM R.	SAPAYA	15	08	1968	S	1	BONE BARU ; RT ; RW	06	SAPAYA	BUNGAYA
	293	730609	15	08	68	0001	H. RASIMANG	SAPAYA	15	08	1968	S	1	CINI AYO; RT ; RW	07	SAPAYA	BUNGAYA
336	266	730610					JOHARI	SAPAYA	07	01	1986	B	1	NYULU ; RT 007; RW 032	05	SAPAYA	BUNGAYA
	427	730610					BARU	TUMBU	07	01	1950	B	1	TUMBU; RT 011; RW 023	08	SAPAYA	BUNGAYA
337	403	730610	01	04	76	0001	RUSLAN	BONTONA	04	01	1976	S	1	BONTONA	01	KANREAPIA	TOMBOLOPAO
	23	730610	01	04	76	0001	RUSLAN	KANREAPIA	01	04	1976	S	1	KANREAPIA; RT 001; RW 001	04	KANREAPIA	TOMBOLOPAO
338	246	730610	01	07	83	0012	RAHMAN	GOWA	01	07	1983	B	1	BONTO LEBANG; RT 002; RW 01	02	KANREAPIA	TOMBOLOPAO
	172	730610	01	07	83	0012	RAHMAN	GOWA	01	07	1983	B	1	KANREAPIA; RT 002; RW 01	04	KANREAPIA	TOMBOLOPAO
339	245	730610	01	07	88	0014	UDIN	GOWA	01	07	1988	B	1	BONTO LEBANG; RT 002; RW 01	02	KANREAPIA	TOMBOLOPAO
	171	730610	01	07	88	0014	UDIN	GOWA	01	07	1988	B	1	KANREAPIA; RT 002; RW 01	04	KANREAPIA	TOMBOLOPAO
340	520	730610	11	02	86	0001	AGUS	BONTONA	02	11	1986	B	1	BONTONA	01	KANREAPIA	TOMBOLOPAO
	35	730610	11	02	86	0001	AGUS	BONTONA	11	02	1986	B	1	KANREAPIA; RT 002; RW 002	03	KANREAPIA	TOMBOLOPAO
341	405	730610	41	07	42	0010	NABIAH	BIRING PANTING	07	01	1942	S	2	BONTONA	01	KANREAPIA	TOMBOLOPAO
	25	730610	41	07	42	0010	NABIAH	BIRINGPANTING	01	07	1942	S	2	KANREAPIA; RT 001; RW 001	04	KANREAPIA	TOMBOLOPAO
342	287	730610	41	07	74	0015	SARI	KANREAPIA	01	07	1974	S	2	KANREAPIA; RT 002; RW 002	03	KANREAPIA	TOMBOLOPAO
	201	730610	41	07	74	0015	SARI	KANREAPIA	01	07	1974	S	2	KANREAPIA; RT 002; RW 002	04	KANREAPIA	TOMBOLOPAO
343	404	730610	50	11	77	0001	BARA	KANREAPIA	11	10	1977	S	2	BONTONA	01	KANREAPIA	TOMBOLOPAO
	24	730610	50	11	77	0001	BARA	KANREAPIA	10	11	1977	S	2	KANREAPIA; RT 001; RW 001	04	KANREAPIA	TOMBOLOPAO
344	377	730610	57	04	90	0001	EDA	KANREAPIA	17	04	1990	B	2	BONTOLEBANG RT 02 RW 01	02	KANREAPIA	TOMBOLOPAO
	36	730610	57	04	90	0001	EDA	KAMREAPIA	17	04	1990	B	2	KANREAPIA; RT 002; RW 001	04	KANREAPIA	TOMBOLOPAO
345	267	730611					MALIK	SAPAYA	07	01	1985	S	1	NYULU ; RT 007; RW 033	05	SAPAYA	BUNGAYA
	428	730611					NANANG	TUMBU	31	12	1953	B	2	TUMBU; RT 011; RW 024	08	SAPAYA	BUNGAYA
	261	730611					NURLIAH.Y	KARAMASA 0	01	03	1991	S	2	TAMMULOE; RT 002;RW 002	05	BERUTALLASA	BIRINGBULU

	407	730611					TE'NE	BATUMENTENG	06	07	1940	S	2	BATUMENTENG; RT 002;RW 002	06	BERUTALLASA	BIRINGBULU
	406	730611					LONCI	BATUMENTENG	18	07	1940	S	2	BATUMENTENG; RT 002;RW 002	06	BERUTALLASA	BIRINGBULU
	79	730611					SUDI	BORONGARA	20	07	1985	S	1	BORONGARA; RT 001;RW 001	07	BERUTALLASA	BIRINGBULU
	357	730611					SITUNG	JENEPONTO	01	07	1966	S	2	TALLANGA; RT 002;RW 002	07	BERUTALLASA	BIRINGBULU
	281	730611					MARIANA	BORONG A'RA	09	11	1987	B	2	BORONG A'RA; RT 001;RW 001	08	BERUTALLASA	BIRINGBULU
	285	730611					FIRDA	BORONG A'RA	19	05	1990	B	2	BORONG A'RA; RT 001;RW 001	08	BERUTALLASA	BIRINGBULU
	97	730611					SARIALANG	KAMPUNG BERU	04	08	1990	B	2	BUNGA SUNGGU; RT 002;RW 003	09	BERUTALLASA	BIRINGBULU
	318	730611					MALANA	GOWA	01	07	1990	B	2	KAMPUNG BERU; RT ;RW	09	BERUTALLASA	BIRINGBULU
	12	730611					SE'RE. H	GOWA	01	07	1971	S	1	KAMPUNGBERU; RT 002;RW 001	10	BERUTALLASA	BIRINGBULU
346	390	730611	01	07	60	0069	YARASA	TARING	01	07	1960	S	2	TARING; RT 001;RW 001	02	TARING	BIRINGBULU
	387	730611	01	07	60	0069	YARASA	TARING	01	07	1960	S	1	TARING II RT 001 RW 001	04	TARING	BIRINGBULU
347	370	730611	01	07	62	0318	BONDO ERO	TARING	01	07	1962	S	1	TARING; RT 003;RW 003	02	TARING	BIRINGBULU
	41	730611	01	07	62	0318	BONDO"	TARING	01	07	1962	S	1	BANGKALA; RT 002;RW 003	07	TARING	BIRINGBULU
348	194	730611	01	07	77	0001	MUSA	JENEPONTO	01	07	1981	S	1	TAMMULOE; RT 003;RW 002	05	BERUTALLASA	BIRINGBULU
	125	730611	01	07	77	0001	SIMPUNG	KAMPUNGBERU	01	07	1982	S	1	KAMPUNGBERU; RT 002;RW 001	10	BERUTALLASA	BIRINGBULU
349	429	730611	01	07	77	0284	UDHIN	TARING	01	07	1977	S	1	TARING; RT 001;RW 002.	02	TARING	BIRINGBULU
	107	730611	01	07	77	0284	BASO .	GOWA	01	07	1977	S	1	KAMPUNG PARANG; RT 003;RW 003	10	TARING	BIRINGBULU
350	17	730611	01	07	81	0091	ANSAR TOMPO	GOWA	01	07	1981	S	1	PANNYAWAKKANG; RT 003;RW 001	08	TARING	BIRINGBULU
	176	730611	01	07	81	0091	ANSAR	PANNYAWAKKANG	16	08	1990	B	1	PANNYAWAKKANG; RT 003;RW 001	09	TARING	BIRINGBULU
351	183	730611	01	07	82	0001	SITTI	KAMPUNG BERU	06	06	1958	B	2	TAMMULOE; RT 003;RW 002	05	BERUTALLASA	BIRINGBULU
	255	730611	01	07	82	0001	NASIRUDDIN	BORONG A'RA	31	07	1985	S	2	BORONG A'RA; RT 001;RW 001	08	BERUTALLASA	BIRINGBULU
352	392	730611	01	07	85	0228	SABUDDIN Y	TARING	01	07	1988	S	1	TARING; RT 001;RW 001	02	TARING	BIRINGBULU
	389	730611	01	07	85	0228	SARIPUDDIN	TARING	01	07	1985	S	1	TARING II RT 001 RW 001	04	TARING	BIRINGBULU
353	51	730611	01	07	86	0001	SAILI	BINAARUNG	11	05	1978	S	2	TAMMULOE; RT 002;RW 002	05	BERUTALLASA	BIRINGBULU
	323	730611	01	07	86	0001	M. SAMIR	GOWA	01	07	1960	S	1	KAMPUNG BERU; RT ;RW	10	BERUTALLASA	BIRINGBULU
354	77	730611	01	07	90	0001	IKMA	SANRANGAN	01	07	1956	B	2	SANRANGANG; RT 001;RW 002	03	BERUTALLASA	BIRINGBULU
	62	730611	01	07	90	0001	SINA	BATUMENTENG	29	11	1962	B	2	TAMMULOE; RT 002;RW 002	05	BERUTALLASA	BIRINGBULU

	244	730611	01	07	90	0001	MASSU	GOWA	01	07	1939	B	1	KAMPUNG BERU; RT ;RW	10	BERUTALLASA	BIRINGBULU
355	153	730611	01	09	66	0001	SUMMA	LOMPODEPA	15	05	1978	S	1	TAMMULOE; RT 004;RW 002	05	BERUTALLASA	BIRINGBULU
	188	730611	01	09	66	0001	SYAMSIAH HP	BATUMENTENG	11	09	1968	S	2	BINAARUNG; RT 002;RW 001	06	BERUTALLASA	BIRINGBULU
356	64	730611	01	10	88	0001	MURUNG	BORONGNGIRA	16	07	1972	S	1	BORONGARA; RT 001;RW 001	07	BERUTALLASA	BIRINGBULU
	34	730611	01	10	88	0001	MUHLIS	BORONG A"RA	31	10	1985	B	1	BORONG A"RA; RT 001;RW 001	08	BERUTALLASA	BIRINGBULU
357	140	730611	06	03	62	0001	MUHAMMADONG S,pdi	BINAARUNG	12	11	1948	S	2	TAMMULOE; RT 004;RW 002	05	BERUTALLASA	BIRINGBULU
	21	730611	06	03	62	0001	DANDE NAI	BINAARUNG	04	01	1962	S	1	BINAARUNG; RT 004;RW 002	06	BERUTALLASA	BIRINGBULU
358	180	730611	06	07	72	0001	SANIA	BORONG A"RA	21	11	1972	S	2	BORONGARA; RT 001;RW 001	07	BERUTALLASA	BIRINGBULU
	154	730611	06	07	72	0001	SAMSUDDIN	BORONG A"RA	02	07	1959	S	1	BORONG A"RA; RT 001;RW 001	08	BERUTALLASA	BIRINGBULU
359	141	730611	06	09	68	0001	LALA	TARING	06	09	1968	S	1	BANGKALA; RT 004;RW 002	07	TARING	BIRINGBULU
	113	730611	06	09	68	0001	DINA	TATOR	06	09	1968	S	2	PATAUNG; RT 004;RW 003	11	TARING	BIRINGBULU
360	123	730611	06	11	68	0001	SALI	BORONGARA	01	07	1970	S	2	BORONGARA; RT 001;RW 001	07	BERUTALLASA	BIRINGBULU
	44	730611	06	11	68	0001	RABA	BORONG A"RA	21	06	1976	S	1	BORONG A"RA; RT 001;RW 001	08	BERUTALLASA	BIRINGBULU
361	169	730611	07	06	72	0001	MURI	BORONG A"RA	14	02	1929	S	2	BORONGARA; RT 001;RW 001	07	BERUTALLASA	BIRINGBULU
	57	730611	07	06	72	0001	BASRI	BORONG A"RA	10	01	1969	S	1	BORONG A"RA; RT 001;RW 001	08	BERUTALLASA	BIRINGBULU
362	108	730611	07	08	81	0001	LEDA	BORONGARA	07	01	1959	S	2	BORONGARA; RT 001;RW 001	07	BERUTALLASA	BIRINGBULU
	33	730611	07	08	81	0001	BAHTIAR	BORONG A"RA	01	10	1988	B	1	BORONG A"RA; RT 001;RW 001	08	BERUTALLASA	BIRINGBULU
363	118	730611	10	10	87	0001	LIMANG	BAROCIA	17	04	1958	B	1	BAROCIA; RT 003;RW 003	04	BERUTALLASA	BIRINGBULU
	154	730611	10	10	87	0001	ABDUL AZIS	BATU MENTENG	15	12	1989	S	1	BINAARUNG; RT 002;RW 001	06	BERUTALLASA	BIRINGBULU
364	77	730611	12	10	40	0001	MUSLIM	BINAARUNG	16	04	1943	S	1	TAMMULOE; RT 002;RW 002	05	BERUTALLASA	BIRINGBULU
	5	730611	12	10	40	0001	PANGKA	BINAARUNG	15	12	1945	P	1	BINAARUNG; RT 004;RW 002	06	BERUTALLASA	BIRINGBULU
365	166	730611	13	12	88	0001	MAJID	GOWA 9	31	12	1969	S	2	BINAARUNG; RT 002;RW 001	06	BERUTALLASA	BIRINGBULU
	233	730611	13	12	88	0001	JABBA	BORONG A"RA	14	03	1954	P	2	BORONG A"RA; RT 001;RW 001	08	BERUTALLASA	BIRINGBULU
366	155	730611	14	01	72	0001	MANIA	BORONG A"RA	20	06	1976	S	2	BORONGARA; RT 001;RW 001	07	BERUTALLASA	BIRINGBULU
	137	730611	14	01	72	0001	SUDDIN	BORONG A"RA	15	05	1965	S	2	BORONG A"RA; RT 001;RW 001	08	BERUTALLASA	BIRINGBULU
367	174	730611	14	03	54	0001	SALIARUNG	BORONG A"RA	21	04	1962	S	2	BORONGARA; RT 001;RW 001	07	BERUTALLASA	BIRINGBULU
	237	730611	14	03	54	0001	MANNENG	BORONG A"RA	14	03	1932	B	1	BORONG A"RA; RT 001;RW 001	08	BERUTALLASA	BIRINGBULU

368	75	730611	16	04	87	0001	SEMBO	BINAARANG 2	06	05	1982	S	2	BINAARUNG; RT 002;RW 001	06	BERUTALLASA	BIRINGBULU
	12	730611	16	04	87	0001	HASAN	BORONG ARA	28	06	1989	B	1	BORONGARA; RT 001;RW 001	07	BERUTALLASA	BIRINGBULU
369	10	730611	20	09	59	0001	SATTUMANG	BORONGA"RA	13	05	1972	S	1	BORONGARA; RT 001;RW 001	07	BERUTALLASA	BIRINGBULU
	224	730611	20	09	59	0001	SATTUMANG	BORONG A"RA	11	10	1973	P	1	BORONG A"RA; RT 001;RW 001	08	BERUTALLASA	BIRINGBULU
370	190	730611	20	09	85	0001	BA"LI	BORONG A"RA	21	01	1961	S	2	BORONGARA; RT 001;RW 001	07	BERUTALLASA	BIRINGBULU
	234	730611	20	09	85	0001	BAHARUDDIN	BORONG A"RA	23	11	1959	S	1	BORONG A"RA; RT 001;RW 001	08	BERUTALLASA	BIRINGBULU
371	8	730611	22	05	62	0001	TANGNGA	BORONGARA	30	11	1959	S	1	BORONGARA; RT 001;RW 001	07	BERUTALLASA	BIRINGBULU
	8	730611	22	05	62	0001	ARSAD	BORONG A"RA	13	09	1976	S	1	BORONG A"RA; RT 001;RW 001	08	BERUTALLASA	BIRINGBULU
372	72	730611	27	06	82	0001	CINA	BORONG ARA	31	12	1973	S	2	BORONGARA; RT 001;RW 001	07	BERUTALLASA	BIRINGBULU
	11	730611	27	06	82	0001	SAHIRI	BORONG A"RA	12	06	1970	B	1	BORONG A"RA; RT 001;RW 001	08	BERUTALLASA	BIRINGBULU
373	37	730611	27	07	54	0001	MARSUKI	BORONGARA	06	08	1959	S	1	BORONGARA; RT 001;RW 001	07	BERUTALLASA	BIRINGBULU
	37	730611	27	07	54	0001	MARSUKI	BORONG A"RA	08	10	1982	S	1	BORONG A"RA; RT 001;RW 001	08	BERUTALLASA	BIRINGBULU
374	1	730611	27	07	72	0001	AMIRUDDIN	BORONGARA	06	10	1982	S	1	BORONGARA; RT 001;RW 001	07	BERUTALLASA	BIRINGBULU
	50	730611	27	07	72	0001	SAING	BORONG A"RA	29	08	1979	S	1	BORONG A"RA; RT 001;RW 001	08	BERUTALLASA	BIRINGBULU
375	230	730611	28	12	84	0001	RAJA	GOWA	01	07	1985	S	1	KAMPUNG BERU; RT ;RW	09	BERUTALLASA	BIRINGBULU
	372	730611	28	12	84	0001	RAJA	GOWA	01	07	1985	S	1	KAMPUNG BERU; RT ;RW	10	BERUTALLASA	BIRINGBULU
376	60	730611	29	12	81	0001	RUSLAN	SANRANGAN	16	10	1958	B	1	SANRANGANG; RT 001;RW 001	03	BERUTALLASA	BIRINGBULU
	242	730611	29	12	81	0001	LIMA	LOMPODEPA	14	07	1968	P	1	TAMMULOE; RT 002;RW 002	05	BERUTALLASA	BIRINGBULU
377	3	730611	41	06	86	0001	SURIANI	BORONGARA	01	07	1979	S	2	BORONGARA; RT 001;RW 001	07	BERUTALLASA	BIRINGBULU
	29	730611	41	06	86	0001	SURI	BORONG A"RA	26	10	1982	S	2	BORONG A"RA; RT 001;RW 001	08	BERUTALLASA	BIRINGBULU
378	391	730611	41	07	67	0191	MANI	TARING	01	07	1962	S	2	TARING; RT 001;RW 001	02	TARING	BIRINGBULU
	388	730611	41	07	67	0191	MANI	TARING	01	07	1967	S	2	TARING II RT 001 RW 001	04	TARING	BIRINGBULU
379	398	730611	41	07	67	0312	MADAENG	TARING	01	07	1967	S	2	TARING; RT 001;RW 001	02	TARING	BIRINGBULU
	142	730611	41	07	67	0312	MADAENG	TARING	01	07	1967	S	2	BANGKALA; RT 004;RW 002	07	TARING	BIRINGBULU
380	292	730611	41	07	83	0027	SIA	SANRANGAN	01	07	1983	B	2	SANRANGANG; RT 002;RW 002	02	BERUTALLASA	BIRINGBULU
	82	730611	41	07	83	0027	SIA	KARAMASA	01	10	1982	B	2	SANRANGANG; RT 001;RW 002	03	BERUTALLASA	BIRINGBULU
381	198	730611	43	10	76	0001	SUNU	BORONG A"RA	04	05	1990	S	1	BORONGARA; RT 001;RW 001	07	BERUTALLASA	BIRINGBULU



	242	730611	43	10	76	0001	RABANIA	BORONG A"RA	04	06	1988	S	1	BORONG A"RA; RT 001;RW 001	08	BERUTALLASA	BIRINGBULU
382	2	730611	46	10	82	0001	BASMIATI	BORONGARA	01	06	1986	S	2	BORONGARA; RT 001;RW 001	07	BERUTALLASA	BIRINGBULU
	39	730611	46	10	82	0001	CACCE	BORONG A"RA	11	10	1942	S	2	BORONG A"RA; RT 001;RW 001	08	BERUTALLASA	BIRINGBULU
383	178	730611	47	10	48	0001	KALLING	KARAMASA	07	10	1948	S	2	KARAMA5A; RT 001;RW 001	01	BERUTALLASA	BIRINGBULU
	253	730611	47	10	48	0001	SAYATI	BATUMENTENG	15	10	1976	S	1	BINAARUNG; RT 001;RW 001	06	BERUTALLASA	BIRINGBULU
384	177	730611	50	05	85	0002	MUSTARI	BORONG A"RA	30	08	1985	S	1	BORONGARA; RT 001;RW 001	07	BERUTALLASA	BIRINGBULU
	240	730611	50	05	85	0002	TIA	BORONG A"RA	24	05	1968	B	1	BORONG A"RA; RT 001;RW 001	08	BERUTALLASA	BIRINGBULU
385	63	730611	51	06	89	0001	MUHLIS	BORONGNGARA	21	03	1972	B	1	BORONGARA; RT 001;RW 001	07	BERUTALLASA	BIRINGBULU
	272	730611	51	06	89	0001	MIURNI	BORONG A"RA	01	07	1942	B	2	BORONG A"RA; RT 001;RW 001	08	BERUTALLASA	BIRINGBULU
386	73	730611	51	10	73	0002	SAWALA	BORONG ARA	27	10	1969	S	1	BORONGARA; RT 001;RW 001	07	BERUTALLASA	BIRINGBULU
	22	730611	51	10	73	0002	CINA	BORONG A"RA	27	12	1969	S	2	BORONG A"RA; RT 001;RW 001	08	BERUTALLASA	BIRINGBULU
387	109	730611	52	08	89	0001	H. MADONG	BORONGARA	01	07	1976	S	1	BORONGARA; RT 001;RW 001	07	BERUTALLASA	BIRINGBULU
	252	730611	52	08	89	0001	NURLAELA	BORONG A"RA	27	12	1939	S	2	BORONG A"RA; RT 001;RW 001	08	BERUTALLASA	BIRINGBULU
388	238	730611	52	10	85	0001	SAODA	BINAARUNG	26	02	1963	P	2	TAMMULOE; RT 002;RW 002	05	BERUTALLASA	BIRINGBULU
	87	730611	52	10	85	0001	LIMA	BORONG A"RA	13	06	1982	B	2	BORONG A"RA; RT 001;RW 001	08	BERUTALLASA	BIRINGBULU
389	162	730611	54	02	39	0001	SAHARIAH	BORONG A"RA	23	03	1940	S	2	BORONGARA; RT 001;RW 001	07	BERUTALLASA	BIRINGBULU
	225	730611	54	02	39	0001	JUMASIA	BORONG A"RA	24	05	1951	P	2	BORONG A"RA; RT 001;RW 001	08	BERUTALLASA	BIRINGBULU
390	117	730611	57	08	49	0001	KILANG	BINAARUNG	22	11	1985	S	2	TAMMULOE; RT 004;RW 002	05	BERUTALLASA	BIRINGBULU
	25	730611	57	08	49	0001	TIPA	KAMPUNG BERU	08	11	1977	S	2	BUNGA SUNGGU; RT 001;RW 001	09	BERUTALLASA	BIRINGBULU
391	189	730611	57	11	85	0001	BAHA	BORONG A"RA	20	09	1985	B	1	BORONGARA; RT 001;RW 001	07	BERUTALLASA	BIRINGBULU
	152	730611	57	11	85	0001	CIA	BORONG A"RA	26	11	1982	S	1	BORONG A"RA; RT 001;RW 001	08	BERUTALLASA	BIRINGBULU
392	104	730611	58	11	73	0001	LINA	KARAMASA	18	11	1973	S	2	KARAMASA; RT 002;RW 002	02	BERUTALLASA	BIRINGBULU
	137	730611	58	11	73	0001	SADO	BINAARUNG	20	04	1992	S	2	TAMMULOE; RT 004;RW 002	05	BERUTALLASA	BIRINGBULU
393	291	730611	59	07	83	0001	RAMLAH	SANRANGAN	19	07	1983	S	2	SANRANGANG; RT 001;RW 002	02	BERUTALLASA	BIRINGBULU
	80	730611	59	07	83	0001	M.RIDWAN	KARAMASA	22	07	1983	B	1	SANRANGANG; RT 001;RW 002	03	BERUTALLASA	BIRINGBULU
394	181	730611	60	12	82	0001	RABANAI	BORONG A"RA	06	01	1979	S	2	BORONGARA; RT 001;RW 001	07	BERUTALLASA	BIRINGBULU
	251	730611	60	12	82	0001	SANIA	BORONG A"RA	01	07	1982	B	1	BORONG A"RA; RT 001;RW 001	08	BERUTALLASA	BIRINGBULU

395	40	730611	67	10	69	0002	CAYA	BORONGNGIRA	16	06	1959	S	2	BORONGARA; RT 001;RW 001	07	BERUTALLASA	BIRINGBULU
	71	730611	67	10	69	0002	CAYA	BORONG A"RA	07	03	1949	S	2	BORONG A"RA; RT 001;RW 001	08	BERUTALLASA	BIRINGBULU
396	141	730611	70	08	85	0002	TAMMA	BORONG A"RA	21	07	1968	S	1	BORONGARA; RT 001;RW 001	07	BERUTALLASA	BIRINGBULU
	26	730611	70	08	85	0002	ATI	BORONG A"RA	20	02	1929	S	2	BORONG A"RA; RT 001;RW 001	08	BERUTALLASA	BIRINGBULU
397	268	730612					TIKA	SAPAYA	07	01	1988	S	2	NYULU ; RT 007; RW 034	05	SAPAYA	BUNGAYA
	429	730612					RUSDI. SP	TUMBU	07	12	1993	S	1	TUMBU; RT 011; RW 025	08	SAPAYA	BUNGAYA
	542	730612					SELVI	BONTOMANAI	11	10	1992	B	2	BONTOMANAI	02	KANJILO	BAROMBONG
	509	730612					M DG LIWANG	BONTOMANAI	12	10	1961	S	1	BONTOMANAI	03	KANJILO	BAROMBONG
	512	730612					ANDRIANI	MAKASSAR	12	06	1992	B	2	BONTOMANAI	03	KANJILO	BAROMBONG
	580	730612					RAJA	JENE PONTO	07	04	1969	S	1	BTN GRYA BRB BLOK F2/14	05	KANJILO	BAROMBONG
	585	730612					WAHIDAH YUSUF	MARAUKE	15	05	1980	S	2	BTN GRYA BRB BLOK F1/10	05	KANJILO	BAROMBONG
	574	730612					RUSMAN DG NABA	TANGALLA	26	09	1973	S	1		07	KANJILO	BAROMBONG
	588	730612					IRMAWATI	TANGALLA	09	01	1987	S	2		07	KANJILO	BAROMBONG
	579	730612					ARIANI	KANJILO	09	12	1992	B	2		08	KANJILO	BAROMBONG
398	386	730612	25	05	85	0001	MURSALIM	BILAJI	25	05	1985	B	1	BILAJI RT 001 RW 001	04	KANJILO	BAROMBONG
	86	730612	25	05	85	0001	MURSALIM	PANGKEP	12	04	1976	S	1	PERUM GRIYA BAROMBONG	05	KANJILO	BAROMBONG
399	470	730613	01	07	86	0002	AHMAD	TA"BUSALAYA	01	07	1986	S	2	DUSUN TAMALATE RT 001 RW 002	02	TIMBUSENG	PATTALASANG
	314	730613	01	07	86	0002	AHMAD DG LIPUNG	TA BUSALAYA	01	07	1986	S	1	DUSUN TAMALATE TABBUSALAYA	03	TIMBUSENG	PATTALASANG
400	304	730614	10	78	70	021	JUMARTI	BONTOMANAI	01	07	1987	B	2	BONTO MANAI RT 002 RW 00	02	KANJILO	BAROMBONG
	501	730614	10	78	70	021	JAMIAH DG MINNE	BONTOMANAI	01	07	1963	P	2	BONTO MANAI	03	KANJILO	BAROMBONG
401	87	730617	01	07	85	0020	KAMARUDDIN	TUMBURWATA	01	07	1985	B	1	RAULO RT 001 RW 001	01	MANIMBAHOI	PARIGI
	267	730617	01	07	85	0020	KAMARUDDIN	TUMBURWATA	01	07	1985	S	1	BONTOSUNGGU RT 002 RW 001	07	MANIMBAHOI	PARIGI
402	49	730617	41	07	82	0023	NAHARIA	GOWA	01	07	1982	S	2	BONTOSUNGGU RT 002 RW 001	01	MANIMBAHOI	PARIGI
	246	730617	41	07	82	0023	NAHARIA	LANGORANG	07	01	1982	S	2	LANGORANG RT 003 RW 001	06	MANIMBAHOI	PARIGI
403	150	730617	41	07	83	0019	HAWANI	RAULO	01	07	1983	S	2	RAULO RT 001 RW 003	01	MANIMBAHOI	PARIGI
	282	730617	41	07	83	0019	HAWANI	PATTIRO	01	07	1983	S	2	BONTOSUNGGU RT 002 RW 003	05	MANIMBAHOI	PARIGI
404	266	730617	51	03	50	0001	SANNGING	PATTIRO	11	03	1950	S	2	BONTOMANAI RT 003 RW 001	03	MANIMBAHOI	PARIGI

	36	730617	51	03	50	0001	SANGNGING	PATTIRO	11	03	1950	S	2	BANGKENGKAJANG RT 002 RW 001	04	MANIMBAHOI	PARIGI
405	294	730617	52	03	85	0001	SATRIAH	PATTIRO	12	03	1985	S	2	BONTO TE"NE RT 001 RW 001	02	MANIMBAHOI	PARIGI
	78	730617	52	03	85	0001	SATRIANI	PATTIRO	12	03	1985	S	2	LANGORANG RT 003 RW 001	06	MANIMBAHOI	PARIGI
406	4	730617	55	08	67	0001	JUMATI DG NGEMBONG	GOWA	15	08	1967	S	2	BONTOSUNGGU RT 002 RW 001	01	MANIMBAHOI	PARIGI
	280	730617	55	08	67	0001	NURSI AH DG NGEMBONG	MANIMBAHOI	08	10	1967	S	2	LANGORANG RT 003 RW 001	06	MANIMBAHOI	PARIGI

Ditelusuri oleh :  
 Idham Amiruddin, ST ([ldham.btg@gmail.com](mailto:ldham.btg@gmail.com))  
 Software : Sistim Informasi Pemilu Jujur

7. Bahwa tidak profesionalnya Termohon dalam melakukan pemutakhiran data pemilih dan mengabaikan keberatan Pemohon dan pasangan calon serta masyarakat merupakan pelanggaran konstitusional yang bertentangan dengan ketentuan:
- Pasal 21 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota, bahwa *"warga Negara Indonesia adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara"*
  - Pasal 19 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008, *"Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin dan mempunyai hak memilih"*.
  - Pasal 19 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008, *"Pemilih adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih"*.
  - Pasal 33 ayat (2) UU No.10 thn 2008, *"Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih"*.
  - Pasal 1 UU Nomor 23 Thn 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, *"Bahwa Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK, adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unit atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia"*.
  - Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 23 Thn. 2006, ***"Bahwa Setiap Penduduk wajib memiliki NIK"***;
  - Pasal 13 ayat (2) UU Nomor 23 Thn. 2006, *"Bahwa NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata"*.
  - Pasal 13 ayat (3) UU Nomor 23 Thn. 2006, *"Bahwa NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin*

*mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya (termasuk DPT)";*

- Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009, menyatakan bahwa "*data pemilih yang digunakan untuk menyusun daftar pemilih dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah dan dapat disandingkan dengan data pemilih Pemilu terakhir*";
8. Bahwa dari DPT yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) tersebut, jelas Termohon tidak melakukan pemutakhiran data secara akurat dan valid karena dari DPT yang tidak mempunyai NIK, NIK Ganda, Pemilih di bawah Umur dan Pemilih yang telah meninggal dunia terdaftar sebagai wajib pilih merupakan pemilih tidak bersyarat (bermasalah) sebagaimana diuraikan di atas;

#### TENTANG PELANGGARAN ADMINISTRATIF.

9. Bahwa selain terdapat 63.072 DPT wajib pilih yang tidak bersyarat (pemilih tidak ada NIK, pemilih ganda, pemilih di bawah umur, pemilih yang dimobilisasi) yang dengan sengaja dilakukan Termohon, yang dapat mempengaruhi perolehan suara pasangan calon, ternyata Termohon juga melakukan pelanggaran administrasi dan pembiaran pelanggaran yang dilakukan oleh PNS dan Pejabat Daerah Kab.Gowa, dengan cara:
- a. Pegawai Negeri Sipil, BUMN dan Pejabat daerah di Kabupaten Gowa yang menurut ketentuannya harus menjaga netralitas dan memperlakukan semua pasangan calon secara adil dan seimbang justru secara terang-terangan melakukan keberpihakan dan secara aktif melakukan kegiatan yang pada dasarnya mengarahkan masyarakat untuk mendukung dan memilih pasangan calon No.urut 4; Fakta –fakta ini diantaranya adalah sebagai berikut :
    - Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2010 bertempat di Jalan Andi Tonro No.83 B Sungguminasa sdr. Abd Madjid Hayat, SH selaku Camat Somba Opu, membuat surat undangan yang ditujukan kepada masyarakat Somba Opu untuk menghadiri acara pelantikan dan pengukuhan "Tim Relawan IYL – BAJI "(inisial

yang digunakan oleh relawan Ichsan Yasin Limpo (calon nomor 4) bertempat dilapangan Syech Yusuf Discovery

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Gowa cq Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan dalam hal ini sdr Ir. H. Achmad Syahsir telah menerbitkan Surat Tugas tertanggal 8 Juni 2010 berkenaan dengan Bakti Sosial Commite Posko Utama Ichsan Yasin Limpo – Razak Bajidu, Surat tugas tersebut merupakan bentuk dukungan kepada tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ichsan Yasin Limpo dengan Nomor urut 4.
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Gowa cq Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan dalam hal ini sdr Ir. H. Achmad Syahsir telah menerbitkan Surat Tugas tertanggal 11 Juni 2010 berkenaan dengan Bakti Sosial Commite Posko Utama Ichsan Yasin Limpo – Razak Bajidu, Surat tugas tersebut merupakan bentuk dukungan kepada tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ichsan Yasin Limpo dengan Nomor urut 4.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 22 Juni 2010 sekitar jam 21.49 wita, bertempat di BTN Gowa Mas Indah rumah kediaman ibu Fatima Suyuti (oknum Pegawai Negeri Sipil – BKD Gowa) telah terjadi pembagian sarung dan kerudung yang terdapat tulisan atau bordiran atas nama Ichsan Yasin Limpo dan kartu nama Pasangan No. 4, motif pembagian sarung dan kerudung agar masyarakat sekitar BTN Gowa Mas Indah dan BTN Minasa Indah memilih pasangan No.4 (Ichsan Yasin Limpo – Rasak Bajidu). Bahwa sehubungan dengan keterlibatan oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS), Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa telah menerima laporan berkenaan dengan pelanggaran dimaksud tersebut di atas dengan nomor bukti penerimaan laporan No. 10/Panwaslukada – GW/IV/2010.
- Bahwa Bupati Kabupatem Gowa menjelang proses tahapan Pemilukada kabupaten Gowa secara rutin melakukan pergeseran dan pelantikan pejabat dari staf tingkat kabupaten, Kecamatan, Desa sampai tingkat Kepala Dusun.

- b. Pejabat daerah Provinsi Sulawesi-Selatan yang juga adalah ketua salah satu Partai Pengusung Pasangan Calon Nomor urut 4 telah terlibat secara aktif melakukan kegiatan termasuk melakukan kampanye sebelum jadwal yang ditetapkan oleh Termohon dengan melakukan pertemuan terbuka Kabupaten Gowa dengan memanfaatkan momentum peringatan hari besar nasional tertentu dengan menghadirkan pasangan calon nomor urut 4 serta memasang atribut pasangan calon Nomor urut 4 disekitar panggung dan lapangan tempat acara dan dalam orasinya mengarahkan masyarakat yang hadir untuk mendukung dan memilih pasangan calon nomor urut 4;

## II. TENTANG POLITIK UANG.

1. Bahwa telah terjadi politik uang (*money politic*) secara meluas ditengah masyarakat Kabupaten Gowa yang dilakukan tim Pasangan Calon No.urut 4 untuk mempengaruhi pemilih agar memilih pasangan calon Nomor urut 4.
2. Bahwa telah terjadi pelanggaran kampanye secara meluas (*massive*) pada masa tenang yaitu sepanjang tanggal 20, 21, 22 Juni 2010 dimana tim pendukung pasangan calon nomor urut 4 telah mempengaruhi wajib pilih dengan cara membagi-bagi barang dalam bentuk sarung dan jilbab yang didalamnya berisi atribut pasangan calon Nomor urut 4. Fakta-fakta ini terungkap sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari selasa tanggal 22 Juni 2010 sekitar jam 21.49 wita, bertempat di BTN Gowa Mas Indah rumah kediaman ibu Fatima Suyuti (oknum Pegawai Negeri Sipil – BKD Gowa) telah terjadi pembagian sarung dan kerudung yang terdapat tulisan atau bordiran atas nama Ichsan Yasin Limpo dan kartu nama Pasangan No. 4, motif pembagian sarung dan kerudung agar masyarakat sekitar BTN Gowa Mas Indah dan BTN Minasa Indah memilih pasangan No.4 (Ichsan Yasin Limpo – Rasak Bajidu). Bahwa sehubungan dengan keterlibatan oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS), Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa telah menerima laporan berkenaan dengan pelanggaran dimaksud tersebut di atas dengan

nomor bukti penerimaan laporan No. 10/Panwaslukada – GW/IV/2010.

Bahwa dari keseluruhan penyimpangan yang dilakukan oleh Termohon tersebut di atas, menimbulkan dampak seperti merusak tatanan demokrasi dan kualitas penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Gowa dan melanggar prinsip-prinsip dasar demokrasi. Secara yuridis, Termohon dalam melaksanakan pemilu di Kabupaten Gowa melanggar UU No.32 Tahun 2004 Jo PP No.6 Tahun 2005 dan UU No. 22 Tahun 2007. Penyimpangan yang dilakukan Termohon dalam menyelenggarakan Pemilu Kabupaten Gowa mempengaruhi secara signifikan perolehan suara pasangan calon khususnya mengangkat perolehan suara pasangan calon nomor urut 4 dan merugikan perolehan suara Pemohon;

1. Bahwa dengan demikian Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan sendi-sendi keadilan substantif (*substantive justice*), karena fakta hukum yang ada merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilu dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat "langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
2. Bahwa terkait dengan adanya pelanggaran yang dilakukan Tim Pemenangan Calon Nomor Urut 4 dan keterlibatan PNS, dan beberapa pejabat struktural pemerintahan daerah, dan Kepala Desa oleh pasangan calon Nomor Urut 4 sebagaimana Pemohon di atas, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 64 PP Nomor 6 Tahun 2005 juncto Pasal 61 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005;
3. Bahwa tindakan atau perbuatan Termohon selaku penyelenggara Pemilu Kabupaten Gowa Tahun 2010 telah merusak sendi-sendi demokrasi atas keberpihakan dan/ atau telah berbuat curang terhadap pembuatan DPT yang memuat data tidak divalidasi yang menguntungkan kepada salah satu pasangan calon. Hal tersebut telah melanggar Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009, menyatakan, Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas, mandiri, jujur, adil,



kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektifitas;

4. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas pada bagian DPT bermasalah (pemilih ganda, pemilih yang tidak mempunyai NIK, pemilih di bawah umur, pemilih siluman), pelanggaran politik uang, pelanggaran administrasi, pelanggaran keberpihakan terhadap pasangan calon Nomor Urut 4, yang dilakukan oleh Termohon sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara sehingga mencederai konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara (vide Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia;
5. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara, menggelembungkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan mengurangi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) sehingga adalah perolehan suara pasangan calon sesuai penetapan Termohon adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA	%
1.	Ahmad Pidris Zain dan Abdul Ravy Rasyid	2.206	0,67
2.	Drs. Andi Maddusila Andi Idjo dan Jamaluddin Rustam, SH,MH	134.409	41,05
3.	Andi Mappaturung dan Bahruddin Matakko	2.165	0,66
4.	H. Ichsan Yasin Limpo dan Razak Bajidu	184.628	56,39
	<b>UNTUK SELURUH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH</b>	<b>327.408</b>	<b>100</b>

6. Bahwa setidaknya-tidaknya dari uraian pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan yang dilakukan oleh Termohon maka Mahkamah Konstitusi berwenang membatalkan Penetapan Hasil Perolehan Suara yang diperoleh setiap pasangan Calon atas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kabupaten Gowa, dan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sesuai Keputusan Nomor 12 Tahun 2010 tanggal 2 Juli 2010;

7. Bahwa Termohon telah menambah atau menggelembungkan perolehan suara pasangan calon nomor urut 4 dengan terlebih dahulu mengangkat atau memasukkan wajib pilih secara tidak bersyarat pada DPT yang jumlah sebesar 63.072 suara, bahwa kerusakan DPT pada pemilukada Kabupaten Gowa merupakan bentuk kecurangan secara sistematis dan massive yang dilakukan oleh Termohon dengan bekerjasama dan untuk menguntungkan pasangan calon tertentu yaitu pasangan calon nomor 4 yang saat ini masih menjabat sebagai Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Gowa, untuk itu suara perolehan pasangan calon nomor 4 harus dikurangkan sebanyak 63.072 sehingga perolehan suara pasangan calon nomor urut 4 adalah  $184.628 - 63.072 = 121.556$ , Berkenaan dengan itu, maka terdapat **63.072** suara yang tidak sah.

Sehingga hasil perolehan pasangan calon yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA	%
1.	Ahmad Pidris Zain dan Abdul Ravy Rasyid	2.206	<b>0,84</b>
2.	Drs. Andi Maddusila Andi Idjo dan Jamaluddin Rustam, SH,MH	134.409	<b>51,62</b>
3.	Andi Mappaturung dan Bahruddin Matakko	2.165	<b>0,83</b>
4.	H. Ichsan Yasin Limpo dan Razak Bajidu	<b>121.556</b>	<b>46,69</b>
	<b>UNTUK SELURUH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH</b>	<b>260.336</b>	<b>100 (dibulatkan)</b>

Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana terurai di atas maka mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili sengketa hasil pemilihan umum Kepala daerah dan Wakil kepala daerah Kabupaten Gowa ini agar kiranya berkenan memutuskan:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak benar hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon in casu KPU Kabupaten Gowa tentang perolehan suara pasangan calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Gowa sebagai berikut;

NO	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA	%
1.	Ahmad Pidris Zain dan Abdul Ravy Rasyid	2.206	<b>0,67</b>
2.	Drs. Andi Maddusila Andi Idjo dan Jamaluddin Rustam, SH,MH	134.409	<b>41,05</b>
3.	Andi Mappaturung dan Bahruddin Matakko	2.165	<b>0,66</b>
4.	H. Ichsan Yasin Limpo dan Razak Bajidu;	184.628	<b>56,39</b>
	<b>UNTUK SELURUH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH</b>	<b>327.408</b>	<b>100</b>

3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 12 Tahun 2010 tanggal 2 Juli 2010;
4. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA	%
1.	Ahmad Pidris Zain dan Abdul Ravy Rasyid	2.206	<b>0,84</b>
2.	Drs. Andi Maddusila Andi Idjo dan Jamaluddin Rustam, SH,MH	134.409	<b>51,62</b>
3.	Andi Mappaturung dan Bahruddin Matakko	2.165	<b>0,83</b>
4.	H. Ichsan Yasin Limpo dan Razak Bajidu;	<b>121.556</b>	<b>46,69</b>
	<b>UNTUK SELURUH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH</b>	<b>260.336</b>	<b>100</b>

5. Menyatakan pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Andi Maddusila Andi Idjo dan Jamaluddin Rustam,SH.MH adalah pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa Periode 2010-2015;
6. Memerintahkan Termohon menerbitkan Surat Keputusan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa 2010 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan subsidair.

### **SUBSIDAIR**

1. Mengabulkan permohonan subsidair Pemohon keberatan;
2. Menyatakan batal demi hukum (void ab initio) Berita Acara yang dibuat oleh Termohon Tentang Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Gowa Tahun 2010, tanggal 20 April 2010 atas nama H.Ichsan Yasin Limpo,SH.MH dan Drs.H.Abd.Razak Badjidu.
3. Menyatakan Pasangan Calon Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah Kab.Gowa atas nama H.Ichsan Yasin Limpo,SH.MH dan Drs.H.Abd.Razak Badjidu tidak memenuhi syarat menurut hukum oleh karenanya dinyatakan gugur (diskualifikasi) sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kab.Gowa pada Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Tahun 2010 periode 2010-2015.
4. Memerintahkan kepada Termohon in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa di seluruh TPS di Kab.Gowa yang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa kecuali Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H.Ichsan Yasin Limpo,SH.MH dan Drs.H.Abd.Razak Badjidu.
5. Menyatakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2010 yang telah ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 7 Mei 2010 dengan Berita Acara Nomor 11/BA/KPU-GW/V/2010 adalah Cacat Hukum oleh karenanya dibatalkan.

6. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah/tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk seluruh TPS pada daerah pemilihan di Kabupaten Gowa tersebut di atas, dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak Putusan perkara *a quo* diucapkan;
8. Memerintahkan para pihak terkait untuk tunduk dan mematuhi putusan perkara *a quo*.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-92, sebagai berikut:

1. P-1 : Surat Keputusan Nomor 12 Tahun 2010 tanggal 2 Juli 2010 telah menetapkan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 4 (empat), yakni H.Ichsan Yasin Limpo, SH,MH dan Razak Bajidu sebagai Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Gowa Periode 2010-2015 dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010;
2. P-2 : Surat Pengaduan Kelompok Masyarakat Kabupaten Gowa yaitu Gempar Indonesia Makassar Gowa Perihal Ijazah Palsu milik Ichyan Yasin Limpo yang ditujukan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
3. P-3 : Tanda Terima Laporan Pengaduan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dari Kelompok Masyarakat bernama GEMPAR Nomor : 011/LPSP-3M/68/II/2010 Tanggal 5 – 04 – 2010. Berkenaan dengan Ijazah Palsu milik Ichsan Yasin Limpo.
4. P-4 : Tanda Terima Laporan Pengaduan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dari Forum Solidaritas Masyarakat Gowa tanggal 21 Mei 2010, Perihal Ijazah Palsu milik Ichsan Yasin Limpo.

5. P-5 : Tanda Terima Laporan Pengaduan ke Sekretaris Komisi III DPR-RI dari Forum Solidaritas Masyarakat Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, berkenaan dengan Ijazah Palsu Ichsan Yasin Limpo, tertanggal 3-5-2010.
6. P-6 : Tanda Terima, Laporan Pengaduan ke Mailing Room MKRI (Mahkamah Konstitusi) dari Forum Solidaritas Masyarakat Kabupaten Gowa tentang Pengaduan Ijazah Palsu Ichsan Yasin Limpo tertanggal 30 April 2010.
7. P-7 : Tanda Terima Laporan Pengaduan Gerakan Masyarakat Penegak Kebenaran kepada KAPOLRI tertanggal 5-4-2010.
8. P-8 : Tanda Terima Laporan Forum Solidaritas Masyarakat Gowa Makassar Kepada Kapolri tertanggal 1-5-2010.
9. P-9 : Tanda Terima Laporan Forum Solidaritas Masyarakat Gowa Kepada Kabareskrim tentang Pengaduan Ijazah milik Ichsan Yasin Limpo.
10. P-10 : Surat Pengaduan dari Forum Solidaritas Masyarakat Gowa yang ditujukan kepada Bawaslu Perihal Ijazah Palsu milik Ichsan Yasin Limpo, tertanggal 24-05-2010.
11. P- 11 : Surat Pengaduan dari Forum Solidaritas Masyarakat Gowa yang ditujukan kepada Bawaslu Perihal Ijazah Palsu milik Ichsan Yasin Limpo, tertanggal 24-05-2010.
12. P-12 : Surat Pengaduan Kelompok Masyarakat yaitu Gempar Indonesia Makassar (Gowa) Perihal Ijazah Palsu milik Ichyan Yasin Limpo yang ditujukan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
13. P-13 : Surat Keterangan Kepala Sekolah SMP Jongaya No.86/422.1/6/SMP 27/2010 tanggal 21 Juni 2010. Yang menerangkan ketidak benaran Ijazah SMP milik Ichsan Yasin Limpo.
14. P-14 : Surat Keterangan Nomor 64/IV/SMPN 27/2010 tanggal 20 April 2010. Yang pada intinya menerangkan ketidakbenaran Ijazah SMP milik Ichsan Yasin Limpo.
15. P-15 : Surat keterangan No.421.6/026/SDN.MSD.I/03/2005 bertanggal Makassar 4 Maret 2005 yang berisi keterangan bahwa Ichsan

(Ichsan Yasin Limpo) pernah sekolah pada SD Pembangunan II yang sekarang menjadi SDN Monginsidi I sampai dengan kelas VII pada tahun 1976.

16. P-16 : Surat Tanda Tamat Belajar (IJAZAH) SMP Jongaya atas nama ICHSAN (Ichsan Yasin Limpo), tertanggal 10 Desember 1976. Ijazah ini adalah Ijazah yang tidak benar dengan menggunakan data milik orang lain, sehingga Ijazah dimaksud mengidap cacat yuridis.
17. P-17 : Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa, tertanggal 7 Mei 2010.
18. P-18 : Surat Tanda Tamat Belajar (IJAZAH) SMP Jongaya atas nama Ronny Gunawan Rasyid, tertanggal 10 Desember 1976. Bukti ini adalah sebagai salah satu Ijazah Pembanding milik Ichsan Yasin Limpo.
19. P-19 : Surat Keterangan tertanggal 7 Juni 2010 atas nama Nenny Aspirin Thamrin.
20. P-20 : Surat G. Daeng Kulle tertanggal 23-04-2006 yang ditujukan kepada Ichsan Yasin Limpo yang intinya menerangkan keberadaan pihak yang ikut mengupayakan terbitnya Ijazah SMP milik Ichsan Yasin Limpo.
21. P-21 : Tanda Terima Surat Pengaduan dan Informasi yang ditujukan kepada Pemimpin Redaksi TV. One, tertanggal 4-05-2010.
22. P-22 : Surat dari Forum Solidaritas Masyarakat Kabupaten Gowa untuk Keadilan yang ditujukan Kepada Menteri Dalam Negeri, tertanggal 30 April 2010. Berkenaan dengan Penggunaan Ijazah Palsu atas nama Ichsan Yasin Limpo.
23. P-23 : Tanda Terima Laporan dari Tim Pemenangan "AMAL" inisial yang digunakan oleh Pemohon (Drs. Andi Maddusila Andi Idjo dan Jamaluddin Rustam, SH, MH. Berkenaan dengan Ijazah Palsu atas nama Ichsan Yasin Limpo.
24. P-24 : Surat Tim Pemenangan "AMAL" inisial yang digunakan oleh Pemohon (Drs. Andi Maddusila Andi Idjo dan Jamaluddin Rustam, SH, MH. Berkenaan dengan Ijazah Palsu atas nama Ichsan Yasin

- Limpo yang ditujukan kepada KAPOLDA Sul-SelBar, tertanggal 29 Juni 2010.
25. P-25 : Laporan Tim Pemenangan "AMAL" inisial yang digunakan oleh Pemohon (Drs. Andi Maddusila Andi Idjo dan Jamaluddin Rustam, SH, MH. Berkenaan dengan Ijazah Palsu atas nama Ichsan Yasin Limpo yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Gowa, tertanggal 29 Juni 2010.
  26. P-26 : Laporan Tim Pemenangan "AMAL" inisial yang digunakan oleh Pemohon (Drs. Andi Maddusila Andi Idjo dan Jamaluddin Rustam, SH, MH. Berkenaan dengan Ijazah Palsu atas nama Ichsan Yasin Limpo yang ditujukan kepada Ketua Dewan Kehormatan KPUD Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 30 Juni 2010.
  27. P-27 : Laporan Tim Pemenangan "AMAL" inisial yang digunakan oleh Pemohon (Drs. Andi Maddusila Andi Idjo dan Jamaluddin Rustam, SH, MH. Berkenaan dengan Ijazah Palsu atas nama Ichsan Yasin Limpo yang ditujukan kepada Ketua Dewan Kehormatan KPUD Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 29 Juni 2010.
  28. P-28 : Laporan Tim Pemenangan "AMAL" inisial yang digunakan oleh Pemohon (Drs. Andi Maddusila Andi Idjo dan Jamaluddin Rustam, SH, MH. Berkenaan dengan Ijazah Palsu atas nama Ichsan Yasin Limpo yang ditujukan kepada Kapolwiltabes Makassar, tertanggal 29 Juni 2010.
  29. P-29(a) : Tanda Terima Surat Laporan tertanggal 1 Juli 2010 tentang pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Gowa.
  30. P-29(b) : Daftar nama-nama masyarakat Gowa yang mengadakan keberatan tentang Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa yang cenderung memihak kepada pasangan Ichsan Yasin Limpo.
  31. P-30 : Surat Panwaslu Kabupaten Gowa tertanggal 17 April 2010 Nomor: 26/PANWASLUKADA GW/IV/2010 yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum.
  32. P-31 : Berita Koran Tempo Makassar, tertanggal 22 Mei 2010 Berkenaan Penggunaan Ijazah atas nama Ichsan Yasin Limpo.



33. P-32 : Laporan Forum Solidaritas Masyarakat Kabupaten Gowa tentang Penggunaan Ijasah atas nama Ichsan Yasin Limpo.
34. P-33 : Laporan Forum Solidaritas Masyarakat Kabupaten Gowa tentang Penggunaan Ijasah atas nama Ichsan Yasin Limpo tertanggal 4 Mei 2010.
35. P-34 : Berita Koran Tempo Makassar, tertanggal 22 Mei 2010 Berkenaan Penggunaan Ijazah Palsu atas nama Ichsan Yasin Limpo.
36. P-35 : Pernyataan Sikap Forum Peduli Gowa yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa yang menghendaki netralitas KPU dalam Pemilukada Kabupaten Gowa.
37. P-36 : Pernyataan Sikap Forum Peduli Gowa yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penggunaan Ijazah Palsu Ichsan Yasin Limpo.
38. P-37 : Tanda Terima Laporan dari Forum Solidaritas Masyarakat Gowa yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum tertanggal 21-05-2010.
39. P-38 : Lembar Terima Laporan yang ditujukan kepada Kapolri tertanggal 14-6-2010.
40. P-39 : Laporan Pengaduan Masyarakat (Gempar Indonesia) yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri No. 7/B.GI/V/2010 tanggal 15 Mei 2010.
41. P-40 : Tanda Terima Surat Masuk yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenaan dengan Penggunaan Ijasah atas nama Ichsan Yasin Limpo tertanggal 14-6-2010.
42. P-41 : Tanda Terima Surat Nomor: 011/LSP-3M/GP/II/2010 tertanggal 5-4-2010 berkenaan dengan Penggunaan Ijasah Palsu.
43. P-42 : Tanda Terima Laporan tertanggal 5-4-2010. berkenaan dengan Penggunaan Ijasah Palsu.
44. P-43 : Tanda Terima berkenaan dengan Laporan Forum Solidaritas Masyarakat Gowa yang ditujukan kepada Kapolri, tertanggal 1-5-2010.
45. P-44 : Surat Pengaduan Ijasah Palsu dari Forum Solidaritas masyarakat Gowa yang ditujukan kepada Bawaslu.

46. P-45 : Surat laporan Penggunaan Ijasah Palsu oleh Pejabat Negara dari Forum Solidaritas Masyarakat Kabupaten Gowa untuk Keadilan yang ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
47. P-46 : Laporan Pengaduan Kelompok Masyarakat Kabupaten Gowa bernama Gempur Indonesia Makassar, tertanggal 6 April 2010.
48. P-47 : Tanda Terima Forum Solidaritas Masyarakat Gowa kepada Kabareskrim berkenaan dengan Pengaduan Penggunaan Ijasah Palsu atas nama Ichsan Yasin Limpo, tertanggal 21-05-2010.
49. P-48 : Laporan Pengaduan Forum Masyarakat Gowa yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri terkait Penggunaan Ijasah palsu atas nama ichsan Yasin Limpo, tertanggal 30 April 2010.
50. P-49 : Tanda Terima Laporan Forum Solidaritas Masyarakat Gowa berkenaan dengan Penggunaan Ijasah Palsu atas nama Ichsan Yasin Limpo yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi, tertanggal 30 April 2010.
51. P-50 : Daftar Nama beserta Identitas Siswa Tahun 1976 pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Jongaya tempat Ichsan Yasin Limpo mendapatkan Ijasah SMP- Dalam Daftar tersebut tidak terdapat nama Ichsan melainkan nama orang lain yang bernama Abd Rahman.
52. P-51 : Daftar Nama beserta Identitas Siswa Tahun 1976 pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Jongaya tempat Ichsan Yasin Limpo mendapatkan Ijasah SMP. Dalam Daftar tersebut tidak terdapat nama Ichsan melainkan nama orang lain yang bernama Abd Rahman.  
Bahwa Ichsan, Stb No.1191 anak dari M Yasin Limpo :
- a. Tidak pernah menjadi peserta ujian SMP Negeri Jongaya pada tahun 1976 dan tidak terdaftar dalam daftar nama-nama calon peserta evaluasi belajar tahun 1976.
  - b. Nomor Induk Siswa 1191 adalah milik Abd Rahman kelahiran Sapaya tanggal 1 Mei 1959 anak dari Lose dengan Nomor ujian 091.
53. P-52 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor: 135/KPU-GW/IV/2010, tertanggal 20 April 2010, Tentang Hasil

Penelitian Syarat Calon Kepala daerah dan wakil Kepala daerah Kabupaten Gowa Tahun 2010. Yang ditujukan kepada Pasangan Calon Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2010: Drs. Andi Maddusila Andi Idjo Jamaluddin Rustam, SH, MH.

54. P-53 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, Nomor: 06 Tahun 2010, Tanggal 21 April 2010. Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa tahun 2010.
55. P-54 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, Nomor: 01/SKIKPU-GW/PKWK/X/2009, Tanggal 21 Oktober 2009. Tentang tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa tahun 2010.
56. P-55 : Berita Acara Penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa tahun 2010, Nomor: 11BA/KPU-gw/V/2010.
57. P-56 : Laporan Lembaga Swadaya Masyarakat bernama "Gerak Masyarakat Penegak Kebenaran– GEMPAR INDONESIA) Nomor 011/LSP3M/GP/II/2010 perihal Ijazah SMP Milik Pak Ichsan Yasin Limpo palsu yang ditujukan Kepada KPU di Jakarta, KPU SulSel, KPU Kabupaten Gowa. Tanggal 10 Pebruari 2010.
- : Surat Tanda Penerimaan Laporan, Nomor: STPL/429/V/2010/SPK-RESTA, tanggal 29 Mei 2010 tentang tindak pidana penggunaan ijazah palsu dengan pelaku Ikhsan Yasin Limpo.
  - : Surat Tanda Penerimaan sebagai bukti penyerahan alat bukti tentang adanya kejahatan yang dilakukan oleh Ichsan Yasin Limpo, tertanggal 29 Juni 2010 berupa :
    - 2 (dua) bundel data nama-nama calon peserta evaluasi belajar tahun 1976, untuk mendapatkan STTB SMP Negeri Jongaya, yang berisi nama siswa, nomor ujian, nomor induk, tempat tanggal lahir, nama orang tua/wali serta alamat, yang

ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri Jongaya SUKMA S, tanggal 10 September 1976.

- 1 (satu) bundel daftar nilai peserta ujian untuk SMP Negeri Jongaya tahun 1976, yang berisi nomor evaluasi, nama peserta ujian, nomor stambuk, nilai ujian, serta keterangan yang berisi tanda tangan peserta ujian.
58. P-59 : Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-Sita/171/VI/2010/Reskrim, untuk keperluan penyitaan benda yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana menggunakan Surat Palsu, sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan pasal 263 ayat (2) KUHPidana, adapun yang disita berupa : 1(satu) bundel Asli kartu buku lengkap daftar nama-nama calon peserta evaluasi belajar tahun 1976 untuk mendapatkan STTB pada SMP Negeri Jongaya, bersama data buku nilai tahun 1976 pada SMP Negeri Jongaya.
59. P-60 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan dari Panwaslukada Kabupaten Gowa Nomor: 07/Pemilukada/Bulan/Tahun Juni 2010, tertanggal 17 juni 2010, atas pelanggaran Pemilukada yang melibatkan PNS (Camat Somba Opu) pada pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Gowa.
60. P-61 : Undangan Team IYL BAJI, Nomor: 005/Team-IYL BAJI/V/2010 tertanggal 18 Mei 2010. Yang ditembuskan kepada Bupati Gowa, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga dalam kaitan dengan pelantikan TIM RELAWAN IYL BAJI.
61. P-62 : Team IYL-BAJI inisial yang digunakan Ichsan Yasin Limpo dalam Pemilukada Kabupaten Gowa, melibatkan Pegawai Negeri Sipil.
62. P-63 : Surat Tugas Nomor:500/248/DPKP/VI/2010, tanggal 8 Juni 2010 untuk kepentingan Team IYL – BAJI inisial yang digunakan Ichsan Yasin Limpo dalam Pemilukada Kabupaten Gowa yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Gowa pada Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan.
63. P-64 : Surat Tugas Nomor:500/260/DPKP/VI12010, tanggal 11 Juni 2010 untuk kepentingan Team IYL – BAJI inisial yang digunakan Ichsan Yasin Limpo dalam Pemilukada Kabupaten Gowa yang

melibatkan Pemerintah Kabupaten Gowa pada Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan.

64. P-65 : Harian BERITA KOTA Makassar tanggal 19 April 2010. Demonstrasi Tandingan pendukung Ichsan Yasin Limpo yang melibatkan Pejabat-pejabat dari Pemerintah Kabupaten Gowa.
65. P-66 : Foto-foto Pembagian beras yang dilakukan oleh pendukung Ichsan Yasin Limpo yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil dan Penggunaan Mobil Dinas.
66. P-67 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 09/PANWASLUKADA-GW/GAKKUDU/VI/2010, tanggal 19 Juni 2010 atas Pelanggaran Pemilukada yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Ichan Yasin Limpo, jenis kasus pembagian beras yang di dalamnya terdapat photo Ichsan Yasin Limpo kepada masyarakat dengan keharusan untuk memilih Ichsan Yasin Limpo.
67. P-68 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 10/Panwaslukada-Gw/VI/2010, tertanggal 22 Juni 2010, atas Pelanggaran Pemilukada yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Ichan Yasin Limpo, jenis kasus pembagian sarung dan kerudung yang terdapat bordiran Ichsan Yasin Limpo kepada masyarakat dengan keharusan untuk memilih Ichsan Yasin Limpo.
68. P-69 : Surat Tuntan Masyarakat Gowa yang tergabung dalam Front Masyarakat Gowa (FORMAG) tentang Ijazah Palsu yang digunakan Ichsan Yasin Limpo dalam Pemilukada Kabupaten Gowa, tertanggal 7 Juni 2010.
69. P-70 : Surat Tanda Tamat Belajar dari SMP Jongaya atas nama Dahian Sudrisna, tanggal 10 Desember 1976. Ijazah dimaksud sebagai bahan perbandingan dengan Ijazah Ichsan Yasin Limpo yang Palsu.
70. P-71 : Berita Koran FAJAR tertanggal 26 Mei 2010 tentang Dugaan Ijazah Palsu Ichsan Yasin Limpo.
71. P-72 : Berita Koran KORAN TEMPO MAKASSAR tertanggal 4 Mei 2010 tentang Dugaan Ijazah Palsu Ichsan Yasin Limpo.
72. P-73 : Berita Koran KORAN TEMPO MAKASSAR tentang Ijazah Palsu Ichsan Yasin Limpo.

73. P-74 : Berita Koran KORAN TEMPO MAKASSAR tertanggal 8 Mei 2010 tentang DPT yang bermasalah, dimana TIM Pemenangan Pemohon minta dilakukan penundaan penetapan DPT.
74. P-75 : Susunan Pengurus : Tim Relawan Multi Etnis Rewata Gowa "Pemenangan Pilkada Untuk Ichsan Yasin Limpo, SH, MH dan H. Abd.Razak Badjidu, S.Sos", Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa Periode 2010-2015. Tim Relawan tersebut di atas telah melibatkan Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa.
75. P-76 : Surat dari Tim Pemenangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan A. Maddusila Andi Idjo-Jamaluddin Rustam yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia di Jakarta, Perihal: Dugaan Ijazah Palsu milik Ichsan Yasin Limpo, Nomor: 1252/ TPA/VII/2010, tanggal 05 Juli 2010.
76. P-77 : Surat dari Tim Pemenangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan A.Maddusila Andi Idjo-Jamaluddin Rustam yang ditujukan kepada Menteri dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, perihal: Dugaan Ijazah Palsu milik Ichsan Yasin Limpo, Nomor: 1251/ TPA/VII/2010, tanggal 05 Juli 2010.
77. P-78 : Surat dari Tim Pemenangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan A.Maddusila Andi Idjo — Jamaluddin Rustam yang ditujukan kepada Komisi III DPR Republik Indonesia di Jakarta, Perihal . Permohonan Penegakan Hukum dan Penangguhan Pelantikan Hasil Penetapan Pemilukada KPU Kab. Gowa, Nomor: 1254/ TPAJVII/2010, tanggal 05 Juli 2010.
78. P-79 : Surat bapak Ismail (Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Gowa) Perihal Keberatan atas Ancaman dan Intimidasi yang ditujukan kepada Bupati Gowa, tertanggal 19 Mei 2010.
79. P-80 : Surat dari Dinas Pertanian kabupaten Gowa Nomor: 521.1/240/V/Diperta/2010 tertanggal 17 Mei 2010, Perihal Instruksi Penugasan penyuluh yang dikeluarkan Kepala Dinas

Pertanian Kabupaten Gowa. Bahwa Surat tersebut dikeluarkan menjelang Pemilihan Kepala Daerah kabupaten Gowa, sebagai upaya sistematis yang dilakukan Pejabat dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa untuk mensukseskan terpilihnya kembali Ichsan Yasin Limpo sebagai Bupati Kabupaten Gowa periode 2010-2015.

80. P-81 : Surat dari Tim Pemenangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan A. Maddusila Andi Idjo-Jamaluddin Rustam yang ditujukan kepada Menteri dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, Perihal: Dugaan Ijazah Palsu milik Ichsan Yasin Limpo, Nomor: 1251/TPA/VII/2010, tanggal 05 Juli 2010.
81. P-82 : Rekapitulasi Data Pemilih pada Pemilukada Kabupaten Gowa Tahun 2010 tanpa NIK (Nomor Induk Kependudukan).
82. P-83 : Rekapitulasi Data Pemilih pada Pemilukada Kabupaten Gowa Tahun 2010 dengan NIK Rekayasa.
83. P-84 : Rekapitulasi Data Pemilih pada Pemilukada Kabupaten Gowa Tahun 2010 dengan Pemilih di Bawah Umur.
84. P-85 : Rekapitulasi Data Pemilih pada Pemilukada Kabupaten Gowa Tahun 2010 dengan NIK Ganda dalam TPS yang Sama.
85. P-86 : Rincian NIK Ganda Lintas Kecamatan pada Pemilukada Kabupaten Gowa Tahun 2010.
86. P-87 : Rincian NIK Ganda Lintas TPS pada Pemilukada Kabupaten Gowa Tahun 2010.
87. P-88 : Data Pemilih dengan NIK Ganda pada DPT Pemilukada Kabupaten Gowa Tahun 2010.
88. P-89 : Rincian nama dan alamat sama pada DPT Pilkada Gowa 2010.
89. P-90 : Data Pemilih dengan NIK Rekayasa / NIK Invalid pada DPT Pemilukada Kabupaten Gowa Tahun 2010.
90. P-91.1 : Data Pemilih Tanpa NIK pada DPT Pemilukada Kabupaten Gowa Tahun 2010.
91. P-91.2 : Data Pemilih Tanpa NIK pada DPT Pemilukada Kabupaten Gowa Tahun 2010.

92. P-91.3 : Data Pemilih Tanpa NIK pada DPT Pemilukada Kabupaten Gowa Tahun 2010.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 23 Juli 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

**A. EKSEPSI :**

**Permohonan Pemohon Diajukan Telah Lewat Waktu.**

1. Pemohon telah mengajukan keberatan penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Gowa berupa Permohonan sesuai Berkas PHPU pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2010;
2. Permohonan *a quo* telah diserahkan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi setelah tengat batas akhir penyerahan permohonan, paling lambat 3 (tiga) hari setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara pemilukada di Kabupaten Gowa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Hasil Perolehan Suara Pemilu Kada dan Wakada Kab. Gowa, yaitu dilakukan pada tanggal 28 Juni 2010 .
3. Bahwa sedangkan Keputusan KPU Gowa Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Gowa Periode 2010-2015, tertanggal 2 Juli 2010.
  - a. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan dengan tegas *"permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara pemilukada di daerah yang bersangkutan"*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas karena Permohonan Pemohon di daftarkan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 Juli 2010, sedangkan Termohon menetapkan hasil penghitungan suara pemilukada tanggal 28 Juni 2010 maka menurut hukum permohonan Pemohon diajukan telah lewat, oleh karena itu Termohon Mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sela sebelum melakukan pemeriksaan pokok perkara, dengan menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.



### **Permohonan Pemohon Tidak Berkaitan Hasil Penghitungan Suara Yang Mempengaruhi Terpilihnya Pasangan Calon .**

4. Ada beberapa hal penting yang telah diatur secara eksplisit di dalam suatu permohonan, yaitu:
  - a. Permohonan berupa keberatan penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah “... hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon ...” dan “ ... hasil penghitungan suara ... yang ditetapkan Termohon yang mempengaruhi ... terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah ....”,sesuai Pasal 106 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
  - b. Berdasarkan Pasal 31 Undang Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi jo Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, maka permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
    - i. Kesalahan hasil penghitungan suara yang dtetapkan oleh Termohon;
    - ii. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
    - iii. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

### **Permohon Pemohon Melampaui Kompetensi Absolut Mahkamah Konstitusi**

Bahwa, Permohonan Pemohon dalil-dalilnya sebagian besar membahas masalah dugaan ijazah palsu yang digunakan salah satu pasangan calon nomor 4, Termohon sebagai penyelenggara pemilu tidak mempunyai kewenangan penyelidikan dan penyidikan , Termohon hanya punya kompetensi untuk meneliti dugaan tersebut dari segi formal administratif, menyangkut kebenaran materiil dugaan *a quo* penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Pidana yang akan membuktikan kebenaran materiilnya. Oleh karena Permohonan Pemohon

menyangkut dugaan pemalsuan ijazah calon nomor 4 adalah bukan merupakan kompetensi Mahkamah Konstitusi untuk menentukan apakah dugaan ijazah palsu tersebut benar atau tidak, apalagi saat ini proses penyidikannya sedang berjalan di Kepolisian. Dengan demikian Permohonan Pemohon berkaitan dengan dugaan ijazah palsu telah melampaui kompetensi absolut dari Mahkamah Konstitusi sehingga mohon ditolak.

5. Pemohon dalam permohonannya tidak meminta Pembatalan Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilu Kada Kabupaten Gowa yang tertuang dalam Berita Acara tanggal 28 Juni 2010, dimana dalam berita acara *aquo* memuat hasil penghitungan perolehan suara masing-masing calon yang ikut dalam Pemilu Kada Kabupaten Gowa Tahun 2010.
6. Bahwa pemohon hanya mengajukan keberatan terhadap penetapan dan pengesahan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2010, pada hal penetapan dan pengesahan *a quo* berdasarkan pada hasil rekapitulasi yang termuat dalam Berita Acara tanggal 28 Juni 2010. Oleh karena Pemohon dalam permohonannya tidak meminta pembatalan Berita penghitungan maka dengan demikian Pemohon secara hukum tidak keberatan dan mengakui kebenaran terhadap hasil penghitungan yang tertuang dalam berita acara, dengan demikian karena berita acara tidak dibatalkan maka dengan sendirinya penetapan dan pengesahan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2010 adalah penetapan yang sah. Berdasarkan hal tersebut Permohonan Pemohon merupakan Permohonan yang salah alamat. Oleh karenanya mohon Majelis Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon setidaknya-tidaknya tidak menerima Permohonan Pemohon.
7. Bahwa perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon nomor 4 adalah sebesar lebih dari 60.000 suara, Pemohon tidak mampu menunjukkan secara langsung apa kaitannya dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon apalagi dikaitkan dengan masalah ijazah calon nomor 4 yang telah diakui kebenarannya oleh instansi yang mengeluarkannya. Termohon bukan institusi penyidik, Pemohon adalah penyelenggara Pemilu Kada, dengan demikian dalil Pemohon menyatakan

Pemohon berkaitan dengan diloloskannya calon nomor 4 Termohon telah melakukan pelanggaran hukum yang mengakibatkan suara Pemohon kehilangan suara adalah dalil Termohon yang mengada-ada dan tidak relevan.

8. Bahwa berdasarkan uraian seperti tersebut di atas maka telah cukup terbukti bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memuat hal-hal ataupun alasan-alasan yang memuat fakta hukum berkenaan dengan:
  - a. hasil penghitungan yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon;
  - b. adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon;
  - c. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
  - d. Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
9. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah tidak sesuai atau setidaknya dapat dikualifikasi tidak memenuhi uraian yang cukup sebagaimana layaknya suatu permohonan yang baik dan/atau permohonan tidak memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal Pasal 106 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jjs Pasal 31 Undang Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
10. Bahwa dengan demikian, sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, eksepsi ini haruslah dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan permohonan dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo*.

## **B. POKOK PERKARA :**

Setelah mempelajari permohonan Keberatan Pemohon, terdapat empat isu yang menjadi pokok keberatan yakni: (1) Ijazah SD dan Ijazah SMP yang diduga palsu, (2) DPT fiktif, (3) Netralitas PNS, dan (4) Money politik. Bahwa apabila *breakdown*, dari keempat isu tersebut, maka Tim Kuasa Hukum KPU dapat memformulasikan sebagai berikut:

### **I. IJASAH DIDUGA PALSU**

Bahwa Pemohon dalam keberatannya menganggap Termohon telah merugikan pemohon dan menguntungkan pihak terkait yaitu pasangan H. Ichsan Yasin Limpo, SH, dengan alasan sebagai berikut :

- (1) Pada proses pendaftaran H. Ichsan Yasin Limpo tidak melampirkan ijazah asli, hanya melampirkan SK.No.421.6/026/SDN.MSD.I/03/2005, tanggal 4 Maret 2005 yang berisi keterangan bahwa yang bersangkutan pernah sekolah pada SD Pembangunan II yang sekarang menjadi SDN Mongisidi I sampai dengan kelas VII pada tahun 1976, dan tidak dapat dijadikan sebagai pengganti ijazah SD apalagi secara substansi tidak dijelaskan secara jelas apakah yang bersangkutan telah menamatkan pendidikannya atau tidak.
- (2) Pada tahun 1976 semua SD yang ada, tidak ada yang menyelenggarakan pendidikan sampai kelas VII, semuanya hanya menyelenggarakan sampai kelas VI, sehingga semakin menambah kejelasan bahwa yang bersangkutan tidak pernah bersekolah secara normal pada SD tersebut.
- (3) Sesuai ketentuan, calon Kepala Daerah harus melampirkan *fotocopy* ijazah SD yang telah dilegalisir dan bukan dalam bentuk surat keterangan lainnya.
- (4) Selain ijazah SD, Ijazah SLTP yang diklaim diperoleh dan dikeluarkan SMP Negeri Jongaya yang sekarang menjadi SMP Negeri 27 Makassar dianggap terdapat kejanggalang. Ijazah No. 1191 yang digunakan oleh Ichsan Yasin Limpo terdaftar an. Abd Rahman demikian pula dengan angka-angkanya.
- (5) Stempel yang tertera pada ijazah Ichsan Yasin Limpo disatu sisi berstempel SMP Jongaya dan di sisi lainnya berstempel SMP Negeri 27.
- (6) Foto Ijazah Ichsan Yasin Limpo memakai baju kaos bergaris-garis, padahal ketentuan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan siswa SMP harus menggunakan seragam untuk foto ijazah.
- (7) Pengakuan Kepala Sekolah SMP Jongaya dengan Surat Keterangan No. 86/422.1/6/SMP.27/2020 tgl 21/6/10 di tegaskan jika Ichsan Yasin Limpo

tidak terdaftar di SMP Jongaya (kini SMPN 27) sedangkan Surat Keterangan No.64/IV/SMPN 27/2010 dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP 27 karena tekanan dari Idris Faisal Kadir Dalle.

- (8) Atas Ijazah tersebut masyarakat yang tergabung dalam LSM Gempar melaporkan ke Panwaslukada dan laporan tersebut ditindak lanjuti oleh panwaslukada namun Termohon mengabaikan surat Panwaslukada No. 26/Panwaslukada-GW/IV/2010 tanggal 17 April 2010.
- (9) Dari rangkaian tersebut di atas KPU Gowa (*in casu* Pemohon) tidak melakukan klarifikasi dan cenderung melakukan pembiaran.

Terhadap keberatan Pemohon tersebut di atas, Termohon tidak dapat menerima dengan alasan sebagai berikut :

- (1) **Untuk ijazah SD**, apa yang dijadikan keberatan tersebut, pihak Termohon merujuk kepada surat keterangan No.421.6/026/SDN.MSD.I/03/2005 tertanggal 4 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Muhammad Asaf, Kepala sekolah Monginsidi I Kel. Maricaya Baru, Kec.Makassar, Kota Makassar yang menyatakan benar sdr Ichsan Yasin Limpo telah menempuh proses pendidikan pada sekolah dasar Negeri Monginsidi I Maricaya sampai kelas VII pada tahun 1976 yang telah mendapat penegasan dari Diknas Kota Makassar berdasarkan Surat Keterangan No. 421.2/o889/DPK/IV/2005, Drs H. Muhammad Asmin, M.Pd, yang pada dasarnya menyatakan Ichsan Yasin Limpo adalah siswa belajar program sekolah dasar pembangunan berkelas 8 (delapan) tahun, bahwa dalam program tersebut siswa yang telah menyelesaikan pendidikan sampai kelas VII disetarakan telah lulus sekolah dasar, namun untuk program ini belum mendapatkan STTB dikarenakan sistem ini utuh satu paket sampai sekolah menengah pertama.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Diknas Kota Makassar tersebut, Termohon menganggap Ijazah SD Ichsan YL telah memenuhi prasyarat sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat 2 Peraturan KPU No. 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- (2) **Untuk Ijazah SMP**; fotokopi ijazah SLTP yang dilampirkan pada berkas pencalonan H. Ichsan Yalin Limpo, telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah SMPN 27 Makassar, sehingga pada tahap verifikasi awal (tanggal 21-27 Maret 2010) ijazah tersebut, oleh Termohon dianggap telah memenuhi syarat

secara Administrasi (MS), sehingga tidak lagi dipertanyakan kepada calon yang bersangkutan pada surat penyampaian dan pemberitahuan hasil penelitian. Bahwa mengenai Keberatan Masyarakat tentang dugaan ijazah SMP Ichsan Yasin Limpo palsu, baru diterima oleh Termohon pada tanggal 16 April 2010, tepatnya 3 hari sebelum penetapan. Namun demikian pihak Termohon telah melakukan klarifikasi sebelum menerima surat rekomendasi panwaslukada pada tanggal 17 April 2010., artinya pihak Termohon lebih dahulu melakukan klarifikasi sebelum surat rekomendasi panwaslukada diterima oleh pihak Termohon.

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b Peraturan KPU No. 68 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa *"KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dilarang melakukan penelitian kembali terhadap poin-poin berkas yang dalam penelitian tahap pertama telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali memperoleh rekomendasi dari Panwas atau mendapat laporan tertulis dari masyarakat"*, Atas dasar ketentuan tersebut, sekalipun ijazah SLTP Ichsan YL telah dinyatakan memenuhi syarat pada verifikasi awal dan sebelum Termohon menerima rekomendasi Panwaslu Kada Kab. Gowa tanggal 17 April 2010, yang baru diterima pada tanggal 18 April 2010 sesuai bukti lembar disposisi . Termohon telah melakukan klarifikasi kepada Kepala Sekolah SMPN 27 Makassar pada tanggal 17 April 2010 berdasarkan bukti surat klarifikasi KPU Gowa No. 13/KPU-GW/IV/2010 , yang diterima langsung oleh Kepala Sekolah SMPN 27 Makassar, Drs Neny Aspirin Thamrin, M.pd berdasarkan bukti tanda terima surat. Pada waktu itu, kepala sekolah tidak berada di sekolah, maka tim verifikasi KPU Kab. Gowa menemui di rumahnya.

Namun, dengan alasan hari Sabtu dan sudah sore, Kepala Sekolah belum juga bisa memberikan klarifikasi secara tertulis kepada Termohon dan ia menjanjikan akan memberikannya pada hari Senin tanggal 19 April 2010.

Pada tanggal 19 April 2010, Termohon kembali datang ke SMP Negeri 27 Makassar namun, tidak ketemu dengan Kepala Sekolah sehingga tidak mendapatkan klarifikasi tertulis. Sementara sesuai jadwal tahapan, pada tanggal 19 April 2010 adalah waktu penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kab. Gowa tahun 2010, maka dengan pertimbangan bahwa ijazah SMP Ichsan YL telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang yaitu Kepala Sekolah SMPN 27 Makassar dan sampai hari penetapan tidak ada surat

keterangan dari Kepala Sekolah atau pejabat yang berwenang lainnya yang berbantah keabsahan ijazah Ichsan Yasin Limpo, serta dengan mempertimbangkan ketentuan pasal 9 ayat (2) huruf f Peraturan KPU No. 68 tahun 2009 yang menegaskan bahwa *“apabila terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah bakal pasangan calon di semua jenjang pendidikan, kewenangan atas laporan tersebut diserahkan kepada pihak pengawas Pemilu dan kepolisian, sampai dengan terbitnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*.

Selain itu, tidak ada satupun ketentuan yang mengatur bahwa dalam hal adanya laporan tentang ijazah palsu, maka KPU harus menunda penetapan pasangan calon . Oleh karena itu, Termohon memutuskan tetap melakukan penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan menetapkan ijazah SMP Ichsan YL telah memenuhi syarat secara administrasi(MS).

Bahwa diloloslkannya ijazah Ichsan Yasin Limpo oleh pihak Termohon oleh karena, secara yuridis pihak termohon tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan ke absahannya SK No.421.6/026/SDN.MSD.I/03/2005, tgl 4 Maret 2005 yang telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar. Demikian pula tentang keabsahan ijazah SMP Ichsan Yasin Limpo oleh karena pihak yang berwenang untuk menyatakan apakah SK tersebut sah atau tidak tentunya harus melalui proses hukum sebagaimana ketentuan Peraturan KPU No. 68 Tahun 2010 Pasal 9 ayat (2) huruf f tentang pedoman teknis tata cara pencalonan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Bahwa pihak Panwaslu telah meneruskan laporan ijazah Ichsan YL kepada aparat kepolisian, dan oleh pihak kepolisian menganggap persolan ijazah Ichsan Yasin Limpo tidak dapat ditindaklanjuti mengingat apa yang dilaporkan oleh Panwaslukada telah kadaluarsa dan berkasnya dikembalikan kepada Panwaslu Kada Kabupaten Gowa pada tanggal 27 Mei 2010 dengan surat nomor B/746/V/2010/Reskrim, sehingga kasus ini tidak dapat diproses dalam pidana pemilukada dan tetap dilanjutkan oleh aparat kepoilsian dan masuk di wilayah tindak pidana umum bukan kejahatan Pemilukada. Oleh karena, kasus tersebut dalam proses hukum, maka menurut Termohon, hak Konstitusi Ichsan Yasin Limpo tidak dapat dihalangi atau dibatasi untuk mencalonkan sebagai calon

Bupati, sebelum adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## **II. DAFTAR PEMILIH TETAP**

Pada keberatan sebagaimana terurai di dalam surat permohonannya, pihak Pemohon menganggap Termohon telah menggelembungkan perolehan suara dengan cara mengangkat DPT sebanyak 63.073. Termohon tidak professional melaksanakan tugas, dimana Termohon tidak melakukan pemutakhiran atau klarifikasi data sebelum menetapkan DPT, sehingga terhadap kelalaian Termohon tersebut berakibat pula pada banyaknya pemilih tidak terdaftar dan tidak dapat surat panggilan atau undangan untuk memilih. Tindakan termohon tersebut dianggap telah merugikan Pemohon dan menguntungkan pasangan no. urut 4. Pemohon memberikan formulasi keberatan tersebut sebagai berikut :

- (1) Sebelum penetapan DPT, Pemohon telah melakukan upaya keberatan terhadap Termohon tentang banyaknya masalah dalam DPT tetapi Termohon tetap mempertahankan DPT yang dianggap bermasalah dan cacat yuridis.
- (2) DPT yang ditetapkan oleh Termohon terdapat wajib pilih yang bermasalah dengan kategori :
  - 32.244 pemilih yang tidak memiliki NIK;
  - 27.639 Pemilih dengan NIK Rekayasa
  - 170 Pemilih di bawah umur atau belum cukup 17 tahun pada tanggal 23 Juni 2010
  - 3.019 penggandaan pemilih dengan NIK ganda dalam DPT.
- (3) Pemohon memastikan bahwa 63.073 pemilih terdaftar pada DPT yang dianggap bermasalah adalah memilih Pasangan Nomor Urut 4.

Bahwa apa yang dipersoalkan oleh pihak Pemohon sebagaimana alasan keberatan tersebut di atas, adalah tidak benar dengan alasan sebagai berikut:

- (1) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan KPU No. 67 Tahun 2009, jelas diuraikan proses pemutakhiran data pemilih mulai DPS yang diumumkan untuk mendapatkan masukan masyarakat kemudian ditetapkan oleh PPS, memberikan kesempatan kepada masyarakat yang telah memenuhi syarat pemilih tetapi tidak terdaftar pada DPS untuk mendaftarkan dirinya ke PPS.



Kemudian DPS ditambah pemilih tambahan diumumkan kembali untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat sebelum ditetapkan sebagai DPT oleh PPS dan selanjutnya dilakukan rekapitulasi jumlah DPT oleh PPK dan pengimputan data. Atas dasar itu KPU Kabupaten menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam rapat pleno terbuka. Berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU No. 67 Tahun 2009, rapat tersebut menghadirkan pasangan calon.

Bahwa begitu panjang proses dan waktu yang diberikan kepada seluruh masyarakat yang ingin menggunakan haknya dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kab. Gowa di seluruh desa/kelurahan se Kabupaten Gowa, dan bukan hanya untuk pendukung pasangan no. urut 4. Oleh karena itu, tuding bahwa Termohon telah menggelembungkan perolehan suara dengan cara mengangkat DPT sebanyak 63.073 adalah sangat tidak masuk akal, apalagi jika dianggap bahwa 63.073 pemilih dipastikan memilih pasangan no. urut 4 adalah pendapat yang sangat tidak berdasar.

Bahwa sejak pemilihan umum tahun 2004 hingga saat ini, sudah 7 (tujuh) kali pemilihan umum dilakukan di Kab. Gowa dengan proses pemutkhiran yang sama, sehingga sudah sewajarnya ketika tim-tim pemenang peserta pemilu sudah memahami betul kapan dan dimana seharusnya diperoleh informasi tentang terdaftar tidaknya seseorang yang telah memenuhi syarat untuk memilih, untuk kepentingan calonnya. Oleh karena itu, keberatan pemohon untuk menyampaikan banyaknya masalah dalam DPT pada saat Termohon melakukan penetapan DPT Pemilu Kada dalam rapat pleno terbuka pada tanggal 7 Mei 2010 adalah tindakan yang keliru karena seharusnya disampaikan pada saat diumumkan untuk mendapatkan masukan atau tanggapan dari masyarakat di masing-masing desa/kelurahan oleh PPS, dan PPS tidak punya kewajiban untuk mendata dari rumah ke rumah tetapi sangat diperlukan partisipasi masyarakat untuk proaktif dalam pendaftaran pemilih. Sehingga kemungkinan adanya masyarakat yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah tidak terdaftar pada DPT tetap ada, namun bukan karena unsur kesengajaan.

Menurut Termohon, sangat penting untuk dipahami bahwa memilih dalam suatu pemilihan umum adalah hak WNI sehingga disebut pemilih, dan bukan

wajib pilih karena tidak ada sanksi bagi WNI yang tidak mau menggunakan hak pilihnya. Hal ini telah terbukti bahwa dari 447.690 pemilih terdaftar pada DPT pemilu kada Kabupaten Gowa, terdapat 113.666 orang yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Gowa pada tanggal 23 Juni 2010 berdasarkan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2010.

- (2) DPT yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah sudah melalui proses yang disyaratkan oleh ketentuan Peraturan KPU No. 67 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan terhadap beberapa kategori DPT bermasalah menurut Pemohon akan ditanggapi satu persatu, sebagai berikut :

- **DPT yang tidak memiliki NIK**

Bahwa sekalipun terdapat pemilih yang tidak memiliki NIK yang menurut pemohon jumlahnya 32.244, namun pemilih dimaksud adalah bukan pemilih siluman karena yang bersangkutan adalah warga dari masing-masing wilayah dimana mereka terdaftar dan telah memenuhi syarat sebagai pemilih. Hal ini dapat dibuktikan dengan pernyataan dari Kepala Desa/Lurah dari masing-masing wilayah dimaksud pada DPT (seperti yang terlampir dalam bukti). Sekalipun mereka terdaftar pada DPT, bukan jaminan bahwa mereka semua adalah pemilih yang memilih pasangan no. urut 4 tetapi boleh jadi sebagaian atau seluruhnya memilih Termohon atau pasangan calon lainnya bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa mereka sebagian atau semuanya tidak menggunakan hak pilihnya, mengingat terdapat 113.666 pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, alasan pemohon yang menganggap semua pemilih terdaftar yang tidak memiliki NIK adalah memilih pasangan H. Ichsan Yasin Limpo, adalah alasan yang tidak berdasar.

- **DPT dengan NIK Rekayasa**

Demikian pula dengan pemilih yang oleh pemohon dikategorikan sebagai pemilih dengan NIK invalid atau NIK apapun namanya yang jumlahnya 27.639 adalah tidak berdasar apabila dipastikan bahwa sejumlah pemilih

tersebut adalah memilih pasangan H. Ichsan Yasin Limpo karena tidak menutup kemungkinan pemilih dimaksud memilih pasangan lainnya termasuk Pemohon atau sebagian atau semuanya tidak menggunakan hak pilihnya.

- **DPT di bawah umur**

Bahwa syarat pemilih bukan hanya telah berusia 17 tahun berdasarkan pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan KPU No. 67 tahun 2010, tetapi pada huruf b disebutkan bahwa *“belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin”*. Dengan demikian, maka pemilih yang terdaftar pada DPT yang usianya belum cukup 17 tahun yang menurut versi Pemohon sebanyak 170 orang tidak bisa secara serta merta dianggap sebagai orang yang tidak mempunyai hak pilih. Pada faktanya masih sangat banyak penduduk yang belum berusia 17 tahun tetapi sudah menikah. Oleh karenanya, alasan Pemohon bahwa 170 orang pemilih yang terdaftar di DPT yang umurnya belum cukup 17 tahun adalah pemilih bermasalah adalah tidak benar. Pada jadwal pemutakhiran data pemilih, Termohon telah melakukan upaya maksimal agar tidak terdapat pemilih di bawah umur ataupun pemilih ganda. Hal ini dapat dibuktikan dengan surat No. 139/KPU-GW/IV/2010 perihal hasil validasi DPT, tanggal 23 April 2010 yang ditujukan kepada PPK se Kabupaten Gowa, dan meminta agar PPK segera melakukan klarifikasi terhadap ditemukannya data yang diduga data ganda dan pemilih masih di bawah umur, kemudian segera melaporkan sebelum pada akhir April 2010. Dari 170 pemilih tersebut juga tidak logis ketika dipastikan memilih pasangan Ichsan YL dengan alasan bahwa sekuat apapun saksinya tidak akan mungkin bisa mengetahui pilihan semua orang dalam bilik suara.

- **NIK ganda/Pemilih ganda**

Terhadap NIK ganda ataupun pemilih ganda juga tidak bisa dengan serta merta dianggap sebagai suatu kesalahan yang disengaja atau direncanakan oleh Termohon. Pemilih ganda dapat terjadi apabila seseorang mempunyai lebih dari satu tempat tinggal sehingga memungkinkan terdaftar di dua tempat apabila yang bersangkutan atau keluarganya tidak menjelaskan atau memberikan informasi kepada PPS atau PPDP. Demikian pula dengan NIK ganda, sekalipun NIKnya sama

tetapi namanya berbeda atau identitas lainnya berbeda maka keberadaannya bukan dikelembungkan namun semata karena kesalahan program/system IT yang digunakan belum mampu menolak pemilih ganda atau NIK ganda. Selain itu belum tentu bahwa pemilih ganda/NIK ganda tersebut menggunakan haknya secara ganda dan belum tentu memilih pasangan Ichsan YL sehingga tidak dapat dikatakan menguntungkan pasangan Ichsan YL.

Terhadap persoalan DPT tersebut di atas, sangat jelas dan tidak berdasar hukum bahwa keberadaan sejumlah pemilih yang oleh Pemohon dianggap bermasalah dengan berbagai kategori tersebut dapat mempengaruhi perolehan suara. Bahkan sangat tidak masuk akal dan tidak berdasar hukum apabila secara keseluruhan dari 63.073 pemilih tersebut dipastikan memilih pasangan Ichsan YL. Karena dari 447.690 pemilih terdaftar pada DPT pemilu pada Kabupaten Gowa, masih terdapat 113.666 yang tidak menggunakan hak pilihnya pada tanggal 23 Juni 2010. Sehingga bisa saja sebagian atau secara keseluruhan tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih pasangan lainnya termasuk Pemohon.

### III. NETRALITAS PNS

Bahwa apa yang dijadikan keberatan oleh pihak pemohon dalam kaitan adanya PNS sebagaimana diuraikan dalam permohonannya terlibat dalam dukungan kampanye kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4.

Bahwa apa yang dituduhkan tersebut sepenuhnya adalah tidak benar, oleh karena berdasarkan penelitian pihak Termohon ternyata jauh-jauh hari pihak Sekda Gowa sudah menghimbau PNS untuk tidak melakukan dukungan kepada salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati, hal ini bersandar pada surat 07/033/BKDH tgl 22 Januari 2010 perihal Pemilukada Kabupaten Gowa Periode Tahun 2010-2015 telah menghimbau kepada setiap PNS dan pejabat Pemkab Gowa agar tidak melakukan mobilisasi dan memberikan dukungan kepada salah satu calon kepala daerah.

Dengan adanya surat ini, oleh Termohon menganggap Ichsan YL atau Calon Nomor 4 atau sebagai *incumbent* tidak melakukan atau mengintruksi PNS untuk melanggar surat himbauan tersebut. Apa yang dilakukan oleh pihak PNS

sebagaimana keberatan pihak Pemohon merupakan tindakan pribadi bukan atas perintah Calon Nomor 4. Di samping itu persoalan ini telah ditangani oleh pihak panwaslukada sehingga, persoalan tersebut menjadi kewenangan pihak panwaslukada dan pihak panwaslukadalah yang berhak memeriksa apakah benar pihak PNS tersebut suruhan Calon Nomor 4 atau merupakan salah satu tim kampanye calon No. 4 hal ini dapat dilihat pada bukti Termohon, dengan demikian persoalan tersebut bukan kewenangan pihak Termohon dan seandainya apa yang dilakukan oleh PNS tersebut adalah benar maka, pihak Termohon menganggap Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menyelesaikan persoalan tersebut (*vide* Putusan MK Nomor 13/PHPU.D-VIII/2010).

#### **IV. Money politik**

Demikian dengan persoalan money politik yang dilakukan oleh salah satu PNS sebagaimana alasan diatas maka, hal tersebut bukan menjadi kewenangan Termohon pula namun menjadi kewenangan pihak Panwaslukada dan Penyidik untu memprosesnya seandainya apa yang dilakukan oleh PNS tersebut adalah benar maka, pihak Termohon menganggap Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menyelesaikan persoalan tersebut (*vide* putusan MK No.13/PHPU.D-VIII/2010).

#### **PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian seperti telah dikemukakan di atas maka mohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

##### **DALAM PROVISI.**

Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima Karena Diajukan ke Makamah Konstitusi Telah Lewat Waktu.

##### **I. DALAM EKSPESI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan eksepsi Termohon diterima karena Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

##### **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohomam Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan mengikat; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor: 12 Tahun 2010, tertanggal 2 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Hasil Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten . Gowa ternggal 28 Juni 2010.
3. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima dan/atau ditolak karena tidak memenuhi syarat dan tidak mempunyai alasan sebagai sebuah Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

[2.4] Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-51 sebagai berikut:

1. T.1 Fotokopi Surat Keputusan KPU Gowa Nomor: 01/SK/KPU-GW//PKWK/X/2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2010
2. T.2 Foto Copy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, tanggal 28 Juni 2010.
3. T.3 Foto Copy Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa Periode 2010-2015, Nomor : 21/BA/KPU-GW/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010
4. T.4 Foto Copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Gowa Periode 2010-2015, tanggal 2 Juli 2010.
5. T.5 Foto Copy Surat Keterangan dari SD Mongisidi I Makassar dahulu SD Pembangunan II Makassar, No. 421.6/026/SDN. MSD.I/03/2010, tanggal 4 Maret 2005.

6. T.6 Foto Copy Surat Keterangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar, Nomor 421.2/0889/DPK/IV/2005, tanggal 20 April 2005.
7. T.7 Foto copy Ijazah SMP calon Bupati atas nama Ichsan Yasin Limpo
8. T.8 Foto copy Akta Kelahiran, No. 281/D1/85
9. T.9 Fotocopy Surat Keterangan dari SD Mongisidi I Nomor: 421.6/027/SDN.MSD.I/03/2005 tentang tanggal lahir Ichsan YL.
10. T.10 Foto Copy Surat Penyampaian dan Pemberitahuan Hasil Penelitian awal kepada pasangan calon, nomor 113/KPU-GW/III/2010
11. T.11 Foto copy Surat perihal permintaan klarifikasi tentang ijazah SMP calon Kepala Daerah atas nama Ichsan Yasin Limpo kepada Kepala SMP Neg. 27 Makassar, tertanggal 17 April 2010.
12. T.12 Foto copy tanda terima surat klarifikasi oleh Kepala Sekolah, tanggal 17 Juli 2010
13. T.13 Foto Copy Surat Panwaslukada, Nomor: 26/PANWASLUKADA-GW/IV/2010, perihal Ijazah Palsu Pak Ichsan Yasin Limpo, tanggal 17 April 2010.
14. T.14 Foto copy hasil verifikasi Administrasi Pasangan Calon H. Ichsan Yasin Limpo, SH dan H. Razak Badjidu, S.Sos
15. T.15 Foto Copy Berita Acara Penetapan Hasil Penelitian Syarat Pengajuan Calon dan Syarat Administrasi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa
16. T.16 Foto copy Risalah Berita Acara Pleno Penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Gowa Periode 2010-2015.
17. T.17 Foto Copy Berita Acara penetapan pasangan calon Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Gowa Periode 2010-2015
18. T.18 Foto Copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa No. 05 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Gowa Tahun 2010.

19. T.19 Foto copy Berita Acara Penetapan No. Urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Gowa, Nomor 09/BA/KPU-GW/IV/2010
20. T.19a Foto copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa No. 6 Tahun 2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2010
21. T.20 Foto copy surat Kapolres Nomor: B/746/V/2010/Reskrim, perihal Pengembalian Berkas Limpahan Panwaslu Kabupaten Gowa, tanggal 27 Mei 2010
22. T.21 Foto Copy Surat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor : 197/470/DKCS/2009 Tentang Penyerahan DP4 dari Catatan Sipil ke KPU Kabupaten Gowa.
23. T.22 Foto copy Berita Acara Penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Gowa, No. 11/BA/KPU-GW/V/2010, tanggal 7 Mei 2010.
24. T.23 Foto copy Rekapitulasi Jumlah Pemilih yang tidak memiliki NIK Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2010 menurut versi Termohon.
25. T.24 – Foto Copy Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah  
T.45
26. T.46 Foto Copy Surat Nomor: 139/KPU-GW/V/2010, perihal : Hasil Validasi DPT ditujukan kepada PPK se-Kab. Gowa.
27. T. 47 Foto Copy Surat Ketua Pokja Pemutakhiran Data Pemilih Nomor : 55/KPU-GW/II/2010 tentang Permasalahan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Kada Kab. Gowa Tahun 2010
28. T.47a Foto Copy Dokumentasi Pengumuman DPT di PPS se Kecamatan Tompobulu Kab. Gowa
29. T.48 Foto Copy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa atas nama Bupati Gowa, No. 072/033/BKD, perihal Pilkada Kab. Gowa Periode 2010-2015, tanggal 22 Januari 2010 yang ditujukan kepada Para Kepala Badan, Dinas, Kantor, Kepala Bagian dan



Para Camat se-Kabupaten Gowa.

30. T.49 Foto copy daftar tim kampanye pasangan Ichsan Yasin Limpo
31. T.50 Fotocopy Surat Keterangan dari saksi Nomor Urut 2 di TPS 2 Desa Bissoloro Kec. Bungaya
32. T.51 Foto Copy Surat Mandat Saksi No. Urut 2 di TPS 2 Desa Bissoloro Kec. Bungaya
33. T.52 Foto copy Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan tertulis dalam persidangan tanggal 23 Juli 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Pemohon telah mengajukan keberatan tertanggal 6 Juli 2010 terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa tanggal 28 Juni 2010 sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Sah Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa; dan Keputusan KPU tanggal 2 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan WAKIL Kepala Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2010 yang menetapkan Pasangan Nomor Urut 4, H Ichsan YAsin Limpo, S.H. dan H Abd. Razak Badjidu, sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa seperti tersebut dalam permohonan sesuai registrasi PPHU Nomor 82/PPHU.D-VIII/2010;
2. Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon harus diajukan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara di daerah yang bersangkutan (dalam

hal ini Pemilukada di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan) sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 15 Tahun 2008;

3. Bahwa sesuai butir 1 di atas, KPU Kabupaten Gowa pada 28 Juni 2010 telah menetapkan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa, kendati penetapan pasangan calon terpilih baru ditetapkan tanggal 2 Juli 2010 dengan Keputusan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tanggal 2 Juli 2010. Sesuai butir 2 di atas, permohonan harus diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon melakukan rekapitulasi dan dan penghitungan suara hasil pemilukada, dan bukan penetapan pasangan calon terpilih. Fakta ini hendak menegaskan bahwa permohonan yang diajukan Pemohon melanggar Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2008 sehingga permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau dengan kata lain permohonan Pemohon telah daluarsa;
4. Berkenaan dengan permohonan, ada beberapa hal penting yang telah diatur secara eksplisit di dalam suatu permohonan, yaitu:
  - a. permohonan berupa keberatan penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah "... hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon ..." dan "... hasil penghitungan suara ... yang ditetapkan Termohon yang mempengaruhi ... terpilihnya pasangan sebagai kepala daerah ...", sesuai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto Pasal 4 huruf b PMK 15/2008;
  - b. berdasarkan Pasal 31 UU 24/2003 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK 15/2008, maka permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
    - i. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
    - ii. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
    - iii. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
5. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak menjelaskan sedikitpun perihal adanya kesalahan hasil penghitungan suara

yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 31 UU 24/2003 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008;

6. Bahwa posita yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan permohonan menggunakan frasa kata “sistematis” dan “massif”, namun dirumuskan dengan sangat abstrak dan absurd. Ada beberapa hal yang dapat menyimpulkan hal tersebut, yaitu sebagai berikut:
  - a. Pemohon tidak menjelaskan secara elaboratif, apa yang dimaksud dengan frasa kata “sistematis” dan “massif”;
  - b. Tindakan Pemohon a quo hanya berupa klaim dan sinyalemen, tidak didasarkan atas fakta konkret yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta hanya ditujukan untuk mendiskreditkan dan membangun opini negatif terhadap kinerja Termohon dan sekaligus menuduh Pihak Terkait terlibat dan bertanggung jawab atas hal dimaksud. Padahal ada cukup banyak fakta dan bukti yang justru memperlihatkan tindakan tidak terpuji yang justru dilakukan oleh Pemohon secara masif dan sistematis;
  - c. dalam permohonan Pemohon halaman 17 sampai dengan halaman 82 pada angka 1-8 Pemohon mempersoalkan masalah DPT. Pemohon membuat kesimpulan yang sangat sumir dan simplistis dengan menyatakan bahwa jumlah DPT yang tidak bersyarat adalah 63.072, dan harus dikurangkan dari perolehan suara sah Pihak Terkait sehingga komposisinya berubah menjadikan suara Pihak Terkait hanya 121.556 atau 46,69% berbeda dengan yang ditetapkan Termohon sebanyak 184.628 atau 56,39%. Kesimpulan ini dibangun dari logika yang meloncat, sewenang-wenang, dan absurd;
7. Pokok posita permohonan Pemohon di dalam poin 10 hingga 12 pada halaman 6-17 yang menuding mengenai ijazah palsu yang dituduhkan kepada Ichsan Yasin Limpo. Bilamana alasan dan fakta yang diajukan di dalam permohonan dimaksud dikaji secara lebih teliti, maka dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Mengenai keberatan Pemohon atas Termohon yang meluluskan H Ichsan Yasin Limpo sebagai Calon Kepala Daerah pada Pemilukada Kabupaten Gowa Tahun 2010 dengan melampirkan Surat Keterangan Nomor 421.6/026/SDN.MSD.I/03/2005 adalah keberatan yang tidak berdasar dan

- cenderung hanya sebagai upaya sistematis untuk mencemarkan nama baik Ichsan Yasin Limpo;
- b. Pemohon membuat sinyalemen adanya suatu pelanggaran tetapi tuduhan dimaksud bersifat sumir untuk dapat dikualifikasi sebagai bersifat sistematis dan masif;
  - c. Seluruh tuduhan yang diajukan kepada Pihak Terkait adalah tidak berdasar dan tidak benar dan akan ditanggapi/dijawab oleh Pihak Terkait pada bagian pokok perkara;
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan, permohonan dari Pemohon tersebut hanya secara sumir mempersoalkan secara umum hal-hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pemilukada yang tidak disertai dengan alat bukti yang cukup kuat, sesuai daftar bukti yang diajukan, untuk mendukung sinyalemen yang diajukan oleh Pemohon. Rumusan pokok tersebut bukan hanya tidak benar dan harus ditolak tetapi juga tidak dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang bersifat sistematis dan masif, justru upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemohon dengan menghalalkan segala cara guna melakukan pembunuhan karakter terhadap Pihak Terkait;
9. Bahwa petitum yang diajukan Pemohon tidak jelas karena mengurangi perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 63.072 suara dan menuduh Termohon bekerjasama dengan Pihak Terkait untuk menambah atau menggelembungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 in casu Pihak Terkait dengan dalih memasukkan wajib pilih yang tidak bersyarat adalah statement yang tidak mempunyai dasar dan hanya karangan atau fantasi semata dari Pemohon, sebab mengenai DPT Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2010 yang dilakukan oleh seluruh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Gowa masih dalam tenggang waktu yang ditentukan PAsal 22 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Bahwa berdasarkan uraian seperti tersebut di atas maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

- a. tidak dapat diterima karena melanggar Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2008;
  - b. tidak sesuai atau setidaknya dikualifikasi sebagai tidak memenuhi uraian yang cukup sebagaimana layaknya suatu permohonan yang baik dan/atau permohonan tidak memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 106 ayat (3) UU 32/2004 jis Pasal 31 UU 24/2003 serta PAsal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008;
  - c. memuat diktum petitum yang kontradiktif antara klaim jumlah suara dan prosentasenya;
11. Bahwa dengan demikian, sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK 15/2008, eksepsi ini haruslah dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008;

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

12. Bahwa hal-hal yang tersebut dan diuraikan di dalam bagian Eksepsi di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;
13. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh alasan, fakta, dan dalil-dalil yang diajukan Pemohon di dalam permohonan, khususnya seperti yang tersebut dalam posita mengenai terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis dan masif, kecuali secara tegas dan nyata diakui oleh Pihak Terkait;
14. Bahwa benar Termohon telah melakukan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2010 Nomor 6 Tahun 2010 dengan komposisi sebagai berikut:
1. Nomor Urut 1 adalah Ahmad Pidris Zain dan Abdul Ravy Rasyid;
  2. Nomor Urut 2 adalah Drs. Andi Maddusila Andi Idjo dan Jamaluddin Rustam, S.H., M.H.;
  3. Nomor Urut 3 adalah Drs. Andi Mappaturung dan Drs. HM Burhanuddin Matakko;

4. Nomor Urut 4 adalah H Ichsan Yasin Limpo, S.H. dan H Abd Razak Badjidu, S.Sos.
15. Bahwa benar Termohon melaksanakan Pemilukada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Periode 2010-2015 pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2010;
16. Bahwa menurut pandangan dan pendapat Pihak Terkait, Termohon telah menjalankan seluruh proses tahapan dan pelaksanaan pemilukada Kabupaten Gowa sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam perundang-undangan yang ada sesuai dengan prinsip dan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan demikian, Pihak Terkait menolak seluruh tuduhan dan sinyalemen yang menyatakan bahwa Termohon telah tidak bertindak dan tidak menunjukkan sikap dan perilaku yang jujur dan memihak;
17. Bahwa mengenai ijazah Ichsan Yasin Limpo yang “divonis” oleh Pemohon sebagai ijazah palsu merupakan tuduhan yang mengada-ada dan tidak berdasar fakta. Tuduhan tersebut sengaja disebar dan dikembangluaskan sedemikian rupa melalui berbagai media bahkan dengan aksi-aksi demonstrasi hanya berlandaskan pada fotokopi-an ijazah yang sudah tidak sesuai lagi dengan aslinya;
18. Bahwa sehubungan dengan dalil dan tuduhan Pemohon (*vide* permohonan butir 12, halaman 7-16), Pihak Terkait perlu menjelaskan pada forum persidangan yang mulia ini fakta-fakta yang sesungguhnya berkenaan dengan ijazah dimaksud sebagai berikut:
  - a. bahwa pada tahun 1976, Ichsan Yasin Limpo telah menempuh Evaluasi Belajar Tahap Akhir (EBTA) pada SMP Negeri Jongaya, Ujung Pandang, yang kini sudah berubah menjadi SMP Negeri 27 Makassar dan dinyatakan lulus sehingga berhak memperoleh ijazah SMP (STTB) dengan nomor seri XXIII Bb 12541 atas nama Ichsan (Bukti PT-5);
  - b. bahwa dalil Pemohon pada butir 3 halaman 9 menyebutkan, “*pada cap stempel di bagian belakang ijazah tersebut dicap dengan stempel SMP 27*” semata-mata karena kekurangtelitian Pemohon saja dalam melihat ijazah (dalam bentuk *copy-an*) tersebut. Bahwa cap stempel SMP 27 dimaksud adalah cap stempel pengesahan yang dilakukan pada tahun

2005 dimana pada tahun itu SMP Negeri Jongaya sudah berubah nama menjadi SMP Negeri 27;

- c. bahwa sungguh keliru dan tidak berdasar hukum dalil Pemohon pada butir 4 halaman 9 yang menyatakan foto dengan baju kaos dan rambut agak panjang sebagai bukti ketidakeaslian ijazah Ichsan Yasin Limpo, padahal Kepala Sekolah SMP Negeri Jongaya Tahun 1976 yang menandatangani ijazah dimaksud, saat ini masih menjadi saksi hidup dan menyatakan serta mengakui keaslian ijazah dan keaslian tanda tangannya pada ijazah tersebut;
- d. bahwa keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri Jongaya Nomor 86/422.1/6/SMP.27/2010 bertanggal 21 Juni 2010 sebagaimana dimaksud dalam permohonan Pemohon yang menyatakan Ichsan tidak pernah menjadi peserta ujian SMP Negeri Jongaya pada tahun 1976 ternyata bertentangan isinya dengan surat keterangan yang sama dan juga dibuat oleh Kepala SMP Negeri 27 bernomor 64/IV/SMPN27/2010 bertanggal 20 April 2010 yang menyatakan Ichsan telah menamatkan pendidikannya pada tahun 1976 dan memperoleh ijazah Nomor XXIII Bb 12541 tanggal 10 Desember 1976 dan pengesahan STTB bersangkutan sah sesuai dengan aslinya;

Pengakuan Kepala SMP Negeri 27 yang menyatakan membuat surat pernyataan bernomor 64/IV/SMPN27/2010 bertanggal 20 April 2010 karena ditekan dan dipaksa oleh seorang pria yang bernama Idris Faisal adalah pernyataan yang sangat meragukan dan tidak dapat dipercaya karena Kepala SMP tersebut juga pernah dengan terpaksa (karena tertekan) menandatangani surat pernyataan bertulisan tangan yang disodorkan oleh demonstran yang menghendaki Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ichsan Yasin Limpo dan Abd Razak Badjidu dianulir pencalonannya oleh KPU Gowa *in casu* Pemohon;

- e. bahwa Pihak Terkait tidak hanya melampirkan surat keterangan Nomor 421.6/026/SD.MSD.I/03/2005 bertanggal 4 Maret 2010 sebagai bukti pernah menempuh pendidikan di sekolah dasar (Bukti PT-1), tetapi juga Surat Keterangan Nomor 421.6/027/SD.MSD.I/03/2010 bertanggal 5 Maret 2010 yang berisi revisi mengenai tanggal dan tahun kelahiran

Ichsan (Bukti PT-2), Akta Kelahiran Catatan Sipil Kotamadya Tk. II Ujung Pandang Nomor 281/D1/85 atas nama Ichsan (Bukti PT-3), serta Surat Keterangan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Nomor 421.2/0889/DPK/IV/2005 yang member penegasan atas Surat Kepala SD Unggulan Monginsidi I Nomor 421.6/026/SDN.MSD.I/03/2005 mengenai program Paket Pendidikan Penyetaraan Sekolah Menengah Pertama (Bukti PT-4);

- f. bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Nomor Daftar Induk 1191 adalah atas nama Abdul Rahman, sebab senyatanya Abdul Rahman yang dimaksud bukanlah siwa SMP Negeri Jongaya tetapi adalah siswa SMP Mahajaya dengan Nomor Stb 721 (Bukti PT-7);
19. Bahwa dalil Pemohon pada butir 10 halaman 6 yang menyatakan syarat formal pendaftaran calon di KPU harus melampirkan ijazah asli adalah alasan dan dalil yang dibuat-buat, karena aturan dan persyaratan yang benar adalah melampirkan *copy* ijazah yang dilegalisir, dan syarat tersebut sudah dipenuhi oleh Pihak Terkait sehingga karenanya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh Termohon selaku institusi yang sah dan berwenang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 jo. Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan, “Ketentuan berkenaan dengan syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c: a. sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat, bakal pasangan calon wajib melampirkan: 1) foto copy ijazah yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau 2) foto copy STTB yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau 3) foto copy surat keterangan ...; 4) foto copy ijazah SD, SLTP, atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang berwenang;
  20. Bahwa Keputusan Termohon yang tetap melanjutkan proses pencalonan Pasangan Pihak Terkait adalah keputusan yang benar dan berdasar hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 Pasal 9 ayat (2) huruf f yang menyatakan, “*apabila terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah bakal calon di semua jenjang pendidikan, kewenangan atas laporan tersebut diserahkan kepada pihak pengawas*



*Pemilu dan Kepolisian, sampai dengan terbitnya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”;*

21. Bahwa upaya Pemohon untuk menganulir pencalonan Pihak Terkait yang notabene telah ditetapkan sebagai pemenang Pemilukada Kabupaten Gowa Tahun 2010 telah dilakukan sedemikain rupa sejak bulan Februari 2010 mulai dari laporan ke Panwas Pemilukada Kabupaten Gowa yang diteruskan ke Kepolisian, mulai dari tingkat Polres sampai ke Mabes Polri dan termasuk juga ke Mahkamah Konstitusi RI, yang dibarengi dengan kegiatan demonstrasi yang terus-menerus dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan pendukung Pemohon (*vide* permohonan halaman 11-12), telah menimbulkan kesan buruk masyarakat terhadap Pihak Terkait, khususnya Ichsan YAsin Limpo. Bahwa upaya yang mengarah ke *black campaign* tersebut telah merugikan Pihak Terkait yang seharusnya meraih suara lebih besar dalam Pemilukada Kabupaten Gowa Tahun 2010;
22. Bahwa keseluruhan dalil-dalil keberatan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah objek sengketa dari PHPU yang berupa ada-tidaknya kesalahan dalam penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sehingga alasan hukum yang diajukan oleh Pemohon patut untuk dikesampingkan dan tidak dapat diterima;
23. Bahwa selain yang tersebut pada butir 22 di atas, Pemohon juga tidak dapat menunjukkan bukti dan uraian yang jelas dan rinci mengenai jumlah pemilih dalam DPT yang tidak bersyarat sebesar 63.072 (versi Pemohon) yang dikonversi menjadi digelembungkan untuk kepentingan Pihak Terkait;
24. Bahwa Pemohon juga mempersoalkan adanya keterlibatan aparaturnya pemerintahan yang mendukung Pihak Terkait. Tuduhan dimaksud harus ditolak secara tegas karena Pihak Terkait tidak melakukan dan/atau menyuruh melakukan tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai melibatkan aparat pemerintahan di dalam kampanye dan melakukan *money politic* yang dapat mempengaruhi para pemilih di dalam pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa. Jikapun ada kerja bakti sosial dan kegiatan amal lainnya maka hal tersebut tidak dilakukan dan ditujukan untuk kepentingan pemungutan suara yang dapat mempengaruhi hasil suara dalam Pemilukada Kabupaten Gowa. Tidak ada laporan Panwas

yang dapat digunakan untuk menjustifikasi bahwa Pihak Terkait melakukan tindakan seperti yang dituduhkan oleh Pemohon. Pihak Terkait menolak secara tegas sinyalemen terjadinya pelanggaran pemilu secara sistematis dan massif;

25. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon yang menyatakan dalam Pemilukada Kabupaten Gowa telah terjadi pelanggaran secara sistematis dan massif, tuduhan Pemohon yang didasarkan pada sinyalemen adanya pelanggaran kampanye dengan mempengaruhi pemilih agar memilih pasangan calon nomor 4 adalah dalil-dalil yang sifatnya mendiskreditkan Pihak Terkait. Seharusnya Pemohon mengambil tindakan berupa melapor kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Gowa. Demikian halnya dengan tuduhan pelanggaran kampanye harusnya diproses melalui Panwas Pemilukada untuk dapat diselesaikan baik secara administratif maupun pidana;
26. Bahwa tidak benar selutruh tuduhan yang bersifat insinuatif yang ditujukan kepada PIHAK TERKAIT yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya seperti;
  - a. pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2010 bertempat di jalan Andi Tonro No. 83 B Sungguminasa Sdr. Abd. Mjdid hayat, SH selaku Camat Somba Opu, membuat surat Undangan yang ditujukan untuk menghadiri acara pelantikan dan pengukuhan "TIM RELAWAN IYL – BAJI (PIHAK TERKAIT) bertempat di lapangan Syech Yusuf Discovery;
  - b. Pemerintah Kab. Gowa cq Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan, Sdr. Ir. H. Ahmad Syahrir menerbitkan Surat Tugas tertanggal 8 Juni 2010 berkenaan dengan bakti sosial Commite posko Utama Ichsan Yasin Limpo – Razak Badjidu;
  - c. bahwa pada hari Selkasa tanggal 22 Juni 2010 sekitar jam 21.49 wita, bertempat di BTN Gowa Mas Indah rumah kediaman Ibu fatimah Suyuti (Oknum Pegawai Negeri Sipil – BKD Gowa) telah terjadi pembagian sarung dan kerudung agar masyarakat sekitar BTN Gowa mas Indah dan BTN Mas Indah memilih pasangan calon No. 4 (Ichsan Yasin Limpo – Razak badjidu)
  - d. Bahwa Bupati Kabupaten Gowa menjelang proses tahapan Pemilukada kabupaten Gowa secara rutin melakukan pergeseran dan pelantikan

Pejabat dari tingkat Staf tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa sampai tingkat Kepala Dusun;

- e. Pejabat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang juga Ketua salah satu partai Pengusung Pasangan Calon Nomor 4 terlibat secara aktif melakukan kegiatan kampanye sebelum jadwal yang ditetapkan oleh Termohon dengan melakukan pertemuan terbuka, memanfaatkan momentum peringatan hari besar nasional;

27. Bahwa atas tuduhan tersebut diatas, PIHAK TERKAIT menyatakan hal tersebut adalah tidak benar dan cenderung sebagai fitnah belaka. Adapun jawaban PIHAK TERKAIT yang merupakan fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa surat undangan tersebut yang sebenarnya adalah undangan untuk penyematan tanda jabatan untuk Kepala Lingkungan se-Kabupaten Gowa yang kebetulan menjadi tuan rumah adalah Kecamatan Somba Opu sehingga wajar jika undangan untuk acara penyematan tanda jabatan dikeluarkan oleh Abd. Majid Hayat selaku Camat Somba Opu. Sedangkan untuk acara Pelantikan dan Pengukuhan Tim Relawan IYL-BSJI merupakan acara yang terpisah dari Penyematan Tanda Jabatan dan yang mengundang adalah ketua tim atas nama Saharudin Hayat, jadi tidak benar dalil Pemohon yang menyebut Sdr. Majid Hayat selaku Camat Somba Opu membuat undangan untuk pelantikan relawan IYL – BAJI. Bahwa tuduhan tersebut semakin memperlihatkan sikap Pemohon yang senantiasa selalu melakukan upaya-upaya yang sistematis untuk mendiskreditkan PIHAK TERKAIT;
- b. Bahwa dalil yang menyebutkan Sdr. Ir. Achmad Syahrir telah menerbitkan Surat Tugas tertanggal 8 Juni 2010 adalah dalil yang tidak benar;
- c. Bahwa tuduhan yang menyebutkan adanya pembagian sarung dan kerudung di kediaman Ibu Fatimah Suyuti adalah fitnah yang tidak pernah dilakukan oleh Ibu Fatimah Suyuti;
- d. Bahwa sampai saat ini Bupati kabupaten Gowa belum mengisi kekosongan jabatan yang ada dalam pemerintahan Kabupaten Gowa mengingat Bupati tidak ingin memanfaatkan momentum Pilkada sehingga jabatan yang masih lowong tersebut masih ditangani oleh asisten Pemerintah Bupati Kabupaten Gowa;

- e. Bahwa dalil Pemohon tentang ketua salah satu Paerati Pengusung melakukan kegiatan kampanye sebelum jadwal, adalah pernyataan yang tidak berdasar, mengingat PIHAK TERKAIT selaku Bupati yang masih aktif tentunya akan menghadiri setiap kegiatan selaku pejabat daerah termasuk peringatan hari besar;
28. Bahwa Bupati Kabupaten Gowa dalam bernagai kesempatan senantiasa mengingatkan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Gowa untuk senantiasa berlaku netral dan tidak ikut dalam hiruk pikuk Pemilu, dan Bupati Kabupaten Gowa akan menindak secara tegas PNS yang terbukti menjadi tim sukses.
29. Berdasarkan uraian tersebut maka dalil-dalil pemohon yang menyatakan dalam pelaksanaan Pemilu Kabupaten Gowa telah terjadi pelanggaran sistematis dan masif adalah tidak benar dan tidak berdasarkan bukti yang dibenarkan secara hukum. Dalil-dalil pemohon hanya bersifat asumsi dan tuduhan yang tidak berdasar hukum bahkan cenderung bersifat fitnah dan insinuatif;
30. Bahwa Petition yang diajukan oleh Pemohon bukan petition mengenai kesalahan hasil penghitungan suara, permintaan untuk membatalkan perhitungan suara dan/ atau menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut versi pemohon. Petition yang sedemikian seyogianya tidak dapat diterima dan/atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagai sebuah permohonan dan tidak mempunyai alasan dan dasar hukum untuk dikabulkan;

### **C. DALAM PETITION**

Berdasarkan seluruh uraian di atas maka mohon kepada Hakim Agung Mahkamah Konstitusi untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan pemberian keterangan/ eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena lewat waktu atau Daluwarsa;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan pemberian keterangan/ tanggapan PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat yang tersebut dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 dan Harus Ditolak;
3. Menyatakan sah dan mengikat Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala daerah Kabupaten Gowa tanggal 28 Juni 2010 sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan hasil Perolehan Suara sah pasangan calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah kabupaten Gowa; dan Keputusan KPU tanggal 02 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa Tahun 210 yang menetapkan Pasangan Nomor Urut 4, H. Ichsan Yasin Limpo, SH dan H. Abd. Razak Badjidu, sebagai Pasangan calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa;

Sekiranya majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-11 sebagai berikut:

1. PT-1 : Surat Keterangan Nomor: 421.6/026/SDN.MSD.I/03/2005 tanggal 4 Maret 2005 tentang Surat Keterangan dari Kepala SDN Unggulan Monginsidi I Kelurahan Maricaya Baru, Kecamatan Makassar, yang ditandatangani oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat.
2. PT-2 : Surat Keterangan Nomor 421.6/027/SDN.MSD.I/03/2005 tanggal 5 Maret 2005 tentang Perbaikan Surat Keterangan Nomor

- 421.6/026/SDN.MSD.I/03/2005 menyangkut tanggal kelahiran Ichsan.
3. PT-3 : Akta Kelahiran atas nama Ichsan Yasin Nomor 2881/DI/85 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.
  4. PT-4 : Surat Keterangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Nomor 421.2/0889/DPK/IV/2005 tentang Penegasan atas Surat Kepala SDN Unggulan Monginsidi I Nomor 421.6/026/SDN.MSD.I/03/2005 tentang Program Paket Pendidikan Penyetaraan.
  5. PT-5 : STTB Nomor XXIII Bb 12541 atas nama Ichsan pada SMPN Jongaya tanggal 10 Desember 1976 (aslinya dalam penyitaan Polisi)
  6. PT-6 : Surat Tanda Penerimaan Sitaan dari Kepolisian Wilayah Kota Besar Makassar tanggal 22 Juni 2010.
  7. PT-7 : Surat Keterangan Nomor 64/IV/SMPN27/2010 tanggal 20 April 2010 dari Kepala SMPN 27 Makassar yang menerangkan bahwa Ichsan telah menamatkan pendidikannya pada tahun 1976 dan memperoleh ijazah serta pengesahan STTB yang bersangkutan sah sesuai aslinya.
  8. PT-8 : Daftar nilai ujian EBTA atas nama Abd. Rahman dengan nomor stambuk 721 yang dikeluarkan oleh SMP Mahajaya.
  9. PT-9 : Buku Induk SMPN Jongaya atas nama Iriana L nomor stambuk 1191 yang berhenti sekolah pada Kelas II SMPN Jongaya, dan nomornya menjadi stambuk Ichsan seperti tertera dalam ijazah.
  10. PT-10 : Pernyataan sumpah mantan Kepala SMPN tahun 1976 atas nama Sukma Sungkeng yang menandatangani ijazah Ichsan dan menyatakan keaslian ijazah tersebut, karena Ichsan dinyatakan lulus pada Ujian EBTA SMPN Jongaya tahun 1976.

11. PT-11 : Pernyataan sumpah mantan Kepala SMPN 27 Makassar atas nama Drs. Achyani Natsir yang menyatakan ijazah Ichsan adalah asli sehingga yang bersangkutan mengesahkan *fotocopy*-nya pada tahun 2005.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa Periode 2010-2015, bertanggal 2 Juli 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*";



Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa mengenai objek permohonan, Mahkamah akan memberikan penilaian dalam bagian Pendapat Mahkamah;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2010, bertanggal 21 April 2010, Pemohon adalah peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2010-2015 Nomor Urut 2;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan memberikan penilaian pada uraian tentang Pendapat Mahkamah;

### **Dalam Eksepsi**

[3.10] Menimbang bahwa dalam jawabannya, Termohon dan Pihak Terkait, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Eksepsi Termohon**

1. Permohonan Pemohon melampaui tenggang waktu;
2. Permohonan Pemohon tidak berkaitan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon; dan
3. Permohonan Pemohon melampaui kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi;

#### **Eksepsi Pihak Terkait**

1. Permohonan Pemohon telah daluarsa;
2. Permohonan Pemohon tidak menjelaskan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon; dan
3. Permohonan Pemohon kabur (*obscur libel*);

### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, dalam penyelenggaraan pemilukada, mengabaikan asas kepastian hukum, sehingga Calon Bupati H. Ikhsan Yasin Limpo dapat mencalonkan diri sebagai Calon Bupati padahal syarat formal pendidikan yang dapat dibuktikan dengan ijazah [yaitu ijazah Sekolah Dasar (SD/MI) dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP)] tidak dapat diperlihatkan aslinya dan tidak dilampirkan dalam persyaratan calon;

Bahwa masalah keaslian ijazah atas nama Ichsan Yasin Limpo telah dilaporkan masyarakat Kabupaten Gowa dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di kabupaten Gowa kepada Termohon sebelum penetapan pasangan calon oleh Termohon, di antara yang melaporkan mengenai keaslian ijazah tersebut adalah sebagai berikut:

LSM Gempar melaporkan masalah ijazah tersebut kepada Panwaslukada Kabupaten Gowa dengan Laporan Pengaduan No.011/LSP3M/GP/II/2010 bertanggal 10 Februari 2010 perihal Ijazah SMP Milik Pak Ichsan Yasin Limpo

Palsu. Surat pengaduan tersebut ditindaklanjuti oleh Panwaslukada Kabupaten Gowa dengan mengirim kepada KPU Kabupaten Gowa Surat Nomor 26/Panwaslukada-GW/IV/2010 bertanggal 17 April 2010, yang pada intinya meminta agar KPU kabupaten Gowa melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang berkompeten mengenai permasalahan ijazah Ichsan Yasin Limpo. Rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Gowa tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Gowa.

Forum Solidaritas Masyarakat Gowa mengadukan permasalahan ijazah Ichsan Yasin Limpo kepada Ketua Bawaslu dengan surat bertanggal 24 Mei 2010, namun Bawaslu tidak memberikan tanggapan.

Masalah ijazah Ichsan Yasin Limpo juga telah dilaporkan Polwiltabes Makassar dan saat ini prosesnya dalam tahap penyidikan.

Dengan demikian, menurut Pemohon, Ichsan Yasin Limpo tidak dapat ditetapkan oleh Termohon sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Gowa untuk mengikuti Pemilukada Kabupaten Gowa Tahun 2010 karena syarat pencalonannya bertentangan dengan syarat wajib sebagaimana yang dimaksud Pasal 58 huruf c UU 32/2004, UU 12/2008, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, dan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai ijazah Pasangan Calon Nomor 4 yang diduga palsu, Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon tidak memiliki kewenangan menyidik dugaan ijazah palsu tersebut. Pemohon menganggap ijazah SD dan SMP milik Ichsan Yasin Limpo telah memenuhi syarat Pasal 9 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berdasarkan adanya Surat Keterangan SD Mongisidi I Makassar (dahulu SD Pembangunan II Makassar) Nomor 421.6/026/SDN.MSD.I/03/2010, bertanggal 4 Maret 2005, dan Surat Keterangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Nomor 421.2/0889/DPK/IV/2005, bertanggal 20 April 2005.

Bahwa Pihak Terkait pada pokoknya menolak dalil Pemohon mengenai dugaan ijazah palsu.

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan banyak warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilukada Kabupaten Gowa tidak terdata dan tidak tercantum dalam DPT, di sisi lain terjadi penambahan jumlah pemilih

yang berdomisili di luar wilayah Kabupaten Gowa dan pemilih di bawah umur. Pemohon mengajukan keberatan tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Termohon.

Menurut perhitungan Pemohon, terdapat:

- a. 32.244 pemilih dalam DPT yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan;
- b. 27.639 Pemilih dengan NIK Rekayasa;
- c. 170 Pemilih di Bawah Umur yaitu pemilih yang telah terdaftar dalam DPT tetapi belum berumur 17 (tujuh belas) tahun pada tanggal 23 Juni 2010;
- d. 3.019 Penggandaan pemilih pada kategori NIK Ganda dalam DPT.

Bahwa wajib pilih fiktif (rekayasa) yang terdaftar dalam DPT tersebut di atas yang tergolong sebagai pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif totalnya berjumlah 63.072 pemilih yang tersebar di 18 (delapan belas) Kecamatan, yaitu Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Tinggi Moncong, Kecamatan Barombong, Kecamatan Bontonompo, Kecamatan Tombolopao, Kecamatan Bontolempangan, Kecamatan Bajeng Barat, Kecamatan Pattalasang, Bontomarannu, Kecamatan Bajeng, Kecamatan Manuju, Kecamatan Biringbulu, Kecamatan Paranglae, Kecamatan Parigi, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kecamatan Pallangga dan Kecamatan Bungaya.

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa DPT telah disusun dengan mendasarkan pada Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selain itu, menurut Termohon adalah tidak masuk akal dalil Pemohon yang menyatakan bahwa 63.073 pemilih bermasalah dalam DPT adalah pemilih Pasangan Nomor Urut 4.

Termohon menyatakan bahwa (i) sejumlah 32.244 pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak memiliki NIK adalah warga dari masing-masing wilayah dimana mereka terdaftar yang sesuai dengan keterangan Kepala Desa/Lurah masing-masing; dan (ii) sejumlah 27.639 pemilih yang terdaftar dalam DPT dengan NIK invalid adalah tidak bisa dipastikan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa tuduhan mengenai kerja sama antara Termohon dan Pihak terkait untuk menambah perolehan suara Pihak Terkait dengan cara memasukkan pemilih tidak bersyarat dalam DPT adalah tuduhan yang tidak berdasar;

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon membiarkan pelanggaran yang dilakukan oleh PNS dan Pejabat Daerah Kabupaten Gowa

yang secara terang-terangan berpihak dan aktif melakukan kegiatan yang pada dasarnya mengarahkan masyarakat untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Pemohon mendalilkan:

- a. Pada Jumat, 18 Mei 2010, bertempat di Jalan Andi Tonro Nomor 83B Sungguminasa, Abd Madjid Hayat, S.H. (Camat Somba Opu) membuat surat undangan yang ditujukan kepada masyarakat Somba Opu untuk menghadiri acara pelantikan dan pengukuhan "Tim Relawan IYL-BAJI" di lapangan Syech Yusuf Discovery;
- b. Pemerintah Kabupaten Gowa cq Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan (Ir. H. Achmad Syahsir) menerbitkan Surat Tugas bertanggal 8 Juni 2010 dan 11 Juni 2010 berkenaan dengan Bakti Sosial Commite Posko Utama Ichsan Yasin Limpo-Razak Bajidu;
- c. Pada Selasa, 22 Juni 2010 sekitar pukul 21.49 WITA, bertempat di BTN Gowa Mas Indah rumah kediaman Fatima Suyuti (PNS BKD Gowa) telah terjadi pembagian sarung dan kerudung yang terdapat tulisan atau bordiran atas nama Ichsan Yasin Limpo dan kartu nama Pasangan No. 4, motifnya agar masyarakat sekitar BTN Gowa Mas Indah dan BTN Minasa Indah memilih pasangan No. 4 (Ichsan Yasin Limpo-Razak Bajidu). Hal tersebut dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dengan nomor bukti penerimaan laporan No. 10/Panwaslukada – GW/IV/2010.
- d. Bupati Kabupaten Gowa menjelang proses tahapan Pemilukada Kabupaten Gowa secara rutin melakukan pergeseran dan pelantikan pejabat dari staf tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa, sampai tingkat Kepala Dusun.
- e. Pejabat daerah Provinsi Sulawesi-Selatan yang juga adalah ketua salah satu Partai Pengusung Pasangan Calon Nomor urut 4 telah terlibat secara aktif melakukan kampanye sebelum jadwal yang ditetapkan oleh Termohon pada peringatan hari besar nasional tertentu dengan menghadirkan pasangan calon nomor urut 4 dan mengarahkan masyarakat yang hadir untuk mendukung dan memilih pasangan calon nomor urut 4;

Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa melalui Surat Nomor 07/033/BKDH bertanggal 22 Januari 2010 perihal Pemilukada Kabupaten Gowa Tahun 2010-2015, telah menghimbau seluruh PNS dan Pejabat Pemerintah Kabupaten Gowa agar tidak

melakukan mobilisasi dan memberikan dukungan kepada salah satu calon Kepala Daerah.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa:

- a. Undangan dari Abd Madjid Hayat, S.H. (Camat Somba Opu) pada Jumat, 18 Mei 2010, di Jalan Andi Tonro Nomor 83B Sungguminasa, adalah untuk acara penyematan tanda jabatan untuk kepala lingkungan se-Kabupaten Gowa;
- b. Tidak benar terdapat Surat Tugas bertanggal 8 Juni 2010 dari Pemerintah Kabupaten Gowa cq Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan (Ir. H. Achmad Syahsir);
- c. Ibu Fatima Suyuti tidak pernah membagikan sarung dan kerudung yang terdapat tulisan atau bordiran atas nama Ichsan Yasin Limpo dan kartu nama Pasangan Nomor 4;
- d. Hingga saat ini Bupati Kabupaten Gowa belum mengisi kekosongan jabatan yang ada dalam pemerintahan Kabupaten Gowa dan jabatan tersebut masih ditangani oleh Asisten Pemerintahan Bupati Kabupaten Gowa.
- e. Pihak Terkait selaku Bupati Gowa yang masih aktif menghadiri setiap kegiatan selaku pejabat daerah;

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pelanggaran-pelanggaran tersebut menggelembungkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan mengurangi perolehan suara Pemohon, sehingga perolehan suara pasangan calon sesuai penetapan Termohon adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA	%
1.	Ahmad Pidris Zain dan Abdul Ravy Rasyid	2.206	0,67
2.	Drs. Andi Maddusila Andi Idjo dan Jamaluddin Rustam, SH,MH	134.409	41,05
3.	Andi Mappaturung dan Bahruddin Matakko	2.165	0,66
4.	H. Ichsan Yasin Limpo dan Razak Bajidu	184.628	56,39
	<b>UNTUK SELURUH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH</b>	<b>327.408</b>	<b>100</b>

Karena Termohon telah menambah atau menggelembungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan terlebih dahulu memasukkan wajib pilih secara tidak bersyarat pada DPT sejumlah 63.072 pemilih, maka perolehan suara

Pasangan Calon Nomor 4 harus dikurangi sejumlah 63.072, sehingga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah  $184.628 - 63.072 = 121.556$ . Sehingga hasil perolehan pasangan calon yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA	%
1.	Ahmad Pidris Zain dan Abdul Ravy Rasyid	2.206	0,84
2.	Drs. Andi Maddusila Andi Idjo dan Jamaluddin Rustam, SH,MH	134.409	51,62
3.	Andi Mappaturung dan Bahruddin Matakko	2.165	0,83
4.	H. Ichsan Yasin Limpo dan Razak Bajidu	121.556	46,69
	<b>UNTUK SELURUH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH</b>	<b>260.336</b>	<b>100 (dibulatkan)</b>

[3.15] Menimbang bahwa dari dalil Pemohon, jawaban para pihak, serta bukti-bukti surat yang diajukan, terdapat fakta hukum yang diakui maupun fakta hukum yang diperselisihkan.

Bahwa fakta hukum yang diakui adalah:

12. Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2010;
13. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan oleh Termohon pada Rabu, 23 Juni 2010;
14. Pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2010 dilaksanakan pada Senin, 28 Juni 2010;
15. Pleno penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dilaksanakan pada Jumat, 2 Juli 2010;
16. Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi pada Rabu, 7 Juli 2010;

Bahwa fakta hukum yang diperselisihkan adalah:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

2. Objek permohonan perselisihan hasil pemilihan umum;
3. Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap; dan
4. Praktek politik uang (*money politics*);

[3.16] Menimbang bahwa sepanjang perselisihan hukum mengenai objek permohonan dan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan memberikan penilaian pada bagian Pendapat Mahkamah;

### **Pendapat Mahkamah**

[3.17] Menimbang bahwa Mahkamah dalam mencermati secara mendalam esensi pokok permohonan yang termuat dalam posita dan petitum Pemohon, jawaban Termohon, jawaban Pihak Terkait, dan bukti surat para pihak, serta permasalahan perselisihan hukum sebagaimana terurai di atas, akan dipertimbangkan secara runtut di bawah ini;

#### **I. Dalam Eksepsi**

[3.18] Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya selain membantah dalil pokok permohonan juga mengajukan tiga macam eksepsi, yaitu eksepsi tentang tenggang waktu pengajuan permohonan, eksepsi tentang *obscuur libel*, dan eksepsi tentang kompetensi absolut;

#### **Eksepsi Tenggang Waktu**

[3.19] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait, masing-masing membantah permohonan Pemohon dengan alasan hukum pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 106 ayat (1) menyatakan, "*Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah*", dan ayat (2) menyatakan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*";



- b. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pasal 5 menyatakan, "*Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";

Bahwa hasil perolehan suara *a quo* terkadang dimuat dalam berita acara hasil perolehan suara hasil perolehan suara yang berarti *objectum litis* pemilukada adalah rekapitulasi hasil perolehan suara, bukan penetapan calon terpilih, yang menjadi dasar pengajuan sengketa Pemilukada yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Terkadang pula ditetapkan dalam penetapan tersendiri, bahkan terkadang ditetapkan menjadi satu kesatuan antara hasil perolehan suara dengan penetapan calon terpilih.

Bahwa dalam praktiknya, Mahkamah menemukan adanya disvaritas keputusan dan/atau penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menunjukkan perbedaan pemahaman bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan sengketa pemilihan umum kepala daerah yang sangat merugikan Pemohon;

Bahwa Mahkamah dalam berbagai putusannya telah menentukan *objectum litis* yang digariskan undang-undang adalah keputusan atau penetapan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota tentang hasil perolehan suara bagi peserta Pemilukada;

Bahwa fakta hukum menunjukkan Pemohon dengan mendasarkan permohonannya pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa Periode 2010-2015, bertanggal 2 Juli 2010 (*vide* Bukti P-1), telah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi pada 7 Juli 2010 sebagaimana tercantum pada Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 263/PAN.MK/2010. Sedangkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa adalah bertanggal 28 Juni 2010 (*vide* Bukti T-2), dengan demikian, seharusnya tenggang waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum adalah 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal 28 Juni 2010, yaitu Selasa, 29 Juni 2010; Rabu, 30 Juni 2010; dan Kamis, 1 Juli 2010. Karena pengajuan

permohonan Pemohon pada Rabu, 7 Juli 2010, telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan, Mahkamah menilai isi eksepsi Pemohon dan Pihak Terkait berdasar dan beralasan hukum, sehingga permohonan Pemohon harus dikesampingkan;

### **Eksepsi tentang Kompetensi Absolut**

[3.20] Menimbang bahwa baik Termohon maupun Pihak Terkait membantah dalil hukum Pemohon dengan menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara ini dengan alasan bahwa *objectum litis* seperti permasalahan ijazah palsu, penggelembungan suara pemilih, ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil, adalah ranah Panwaslu, Kepolisian, atau penegak hukum lainnya;

Bahwa di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan beberapa pelanggaran pemilukada, antara lain, pelanggaran administrasi Pemilukada; pelanggaran kode etik; perselisihan hasil Pemilukada; sengketa dalam proses Pemilukada; dan pelanggaran pidana Pemilukada seperti *money politic*, penganiayaan, intimidasi, yang *notabene* jenis-jenis pelanggaran *a quo* masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu maupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukum melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas, yaitu dalam penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, Mahkamah tidak hanya terpaku pada ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 maupun Pasal 4 PMK 15/2008 yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 106 ayat (1) menyatakan, "*Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah*", dan ayat (2) menyatakan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*";
- b. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pasal 4

menyatakan, “Objek perselisihan hasil Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”;

Bahwa dalam mengemban misinya sebagai pengawal konstitusi, tidak dapat memainkan peranannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis, yang berarti Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan yang nyata-nyata terbukti adanya suatu tindakan hukum yang mencederai hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses pemilu atau pemilu hanya berlangsung tanpa ketertiban hukum yang pada akhirnya melanggar prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jika demikian, maka Mahkamah selaku institusi negara hanya menjadi “tukang stempel” saja dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota, yang hal tersebut melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa pemilu tidak hanya membedah permohonan yang hanya melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, masif, dan terstruktur, dan ini terbukti berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan perkara baik dalam rangka pengujian undang-undang maupun dalam perkara perselisihan hasil pemilu ataupun pemilu;

Berdasarkan pandangan hukum di atas maka eksepsi Termohon tentang ruang lingkup kewenangan Mahkamah adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilu untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilu;

### **Eksepsi tentang *Obscuur Libel***

[3.21] Menimbang bahwa baik Termohon maupun Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon kabur, tidak jelas, dan

semata-mata hanya asumsi belaka, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi *a quo* tidak tepat menurut hukum karena substansi eksepsinya berkaitan dengan pokok perkara (*bodem geschil*) sehingga eksepsi *a quo* harus dikesampingkan;

## II. Dalam Pokok Perkara

[3.22] Menimbang bahwa dengan dikabulkannya sebagian eksepsi yang berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon dan menolak eksepsi lainnya, maka menurut hukum terhadap pokok perkara tidak dipertimbangkan;

## 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sepanjang mengenai objek permohonan dan tenggang waktu pengajuan permohonan berdasar dan beralasan hukum; dan
- [4.4] Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

## 5. AMAR PUTUSAN

**Mengadili,**

Menyatakan:

**Dalam Eksepsi:**

- Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sepanjang mengenai objek permohonan dan tenggang waktu pengajuan permohonan;
- Menyatakan objek permohonan adalah keliru atau salah dan pengajuan permohonan melewati tenggang waktu;
- Menolak eksepsi untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Pokok Perkara:**

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat tanggal dua puluh tiga bulan Juli tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh enam bulan Juli tahun dua ribu sepuluh oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**M. Arsyad Sanusi**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**PANITERA PENGGANTI**

**ttd.**

**Mardian Wibowo**